

**INVENTARIS ARSIP
SEKRETARIAT NEGARA RI
1945-1949**

**DISUSUN OLEH:
NUR MAS INTAN BERLIANA MARPAUNG**

**ARSIP NASIONAL RI
JAKARTA
1995**

KATA PENGANTAR

Salah satu masalah yang menarik sebagai obyek penelitian sejarah di Indonesia ialah mengenai bagaimana pemerintah melaksanakan manajemen pemerintahan. Sekretariat Negara sebagai lembaga pembantu Presiden adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan tampaknya memiliki peranan yang khas dalam sistem politik di Indonesia saat itu.

Arsip Sekretariat Negara 1945-1949 disajikan kepada peneliti dan peminat arsip pada umumnya untuk mempermudah mereka mengumpulkan dan mendapatkan data sebagai pelengkap informasi terutama tentang berbagai kegiatan pemerintahan pada kurun waktu tersebut.

Arsip Sekretariat Negara 1945-1949 ini merupakan hasil pengaturan yang dikerjakan oleh Saudari Nur Mas Intan Beliana Marpaung dari Subbidang Pengolahan dan Inventarisasi Arsip Dari Sesudah Tahun 1945, kepadanya diucapkan terima kasih atas ketelitian dan ketekunan kerjanya.

Jakarta, Maret 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	iv
DAFTAR PUSTAKA	viii
INVENTARIS	1
I. KESEKRETARIATAN	1
A. Tata Usaha dan Rumah Tangga	1
B. Kepegawaian	4
C. Keuangan	4
D. Hubungan Masyarakat	5
II. KELEMBAGAAN NEGARA	14
A. KNIP	14
B. DPA	17
C. DPR	18
D. BPK	18
III. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	19
A. UUD/NKRKS/UUDS/UUD'45	19
B. Organisasi Pemerintahan	19
C. Pengelolaan Dana dan Keuangan Negara	37
D. Agama	51
E. Pendidikan dan Kebudayaan	52
F. Administrasi Pegawai	56
G. Kesejahteraan Rakyat	83
H. Industri dan Perdagangan	86
I. Hubungan Indonesia-Belanda	91
J. Keamanan Dalam Negeri	97
K. Organisasi Massa dan Kepartaian	112
LAMPIRAN	
Indeks Nama Orang dan Wilayah	117
Daftar Singkatan	129

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

A. ORGANISASI

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pertama RI yang dikenal dengan nama Kabinet Presidentiil pada tanggal 2 September 1945. Di dalamnya terdiri dari 12 Menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Negara. Pada saat yang sama juga di antaranya adalah Sekretariat Negara yang dijabat oleh Mr. A.G. Pringgodigdo.

Sejak pembentukan Kabinet, Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah juga dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Hubungan kerja antara Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan Sekretaris Negara masih belum diatur secara rinci melainkan mirip tradisi organisasi pada umumnya, dengan Sekretaris Negara bertindak sebagai penulis dan penyelenggara segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri baik dalam lapangan pemerintahan maupun dalam lapangan ketatausahaan.

Kabinet Presiden yang merupakan Kabinet Pertama RI ini hanya bertahan sampai tanggal 14 November 1945, sehingga lahirnya Kabinet Kedua dengan Sistem Parlemerter, dengan pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan lebih populer dengan nama Kabiner Sutan Sjahrir I. Itulah awal dari Kabinet Sjahrir yang kemudian dilakukan berbagai perubahan hingga terbentuk Kabinet Sjahrir II dan Kabinet Sjahrir III. Dengan adanya perubahan Kabinet Presidentiil ke Sistem Kabinet Parlemerter, sebenarnya tugas Sekretaris Negara sebagai penyelenggara ketatausahaan negara telah berkurang karena mulai berfungsinya kantor Menteri Kehakiman, meskipun karena beberapa hal tugas ketatausahaan negara itu tetap diselenggarakan oleh Sekretaris Negara.

Ketika keadaan di Jakarta semakin buruk akibat aksi-aksi teror tentara Belanda, dan pendaratan Pasukan Marinir Belanda tanggal 30 Desember 1945 di Tanjung Priok, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Jogjakarta, dan ibukota RI pun turut pindah ke Jogjakarta, sedangkan Perdana Menteri Sjahrir tetap di Jakarta. Keadaan Pemerintah RI di Jogjakarta yang belum stabil dan yang sedang dalam perjuangan melawan Belanda mempengaruhi keadaan arsip-arsip Pemerintah RI, termasuk arsip-arsip Sekretariat Negara. Itulah sebabnya, arsip-arsip Pemerintah RI di Jogjakarta, khususnya arsip-arsip Sekretariat

Negara dalam keadaan tidak lengkap. Setelah pengakuan kedaulatan RI dan kembalinya ibukota RI ke Jakarta dan arsip-arsip Sekretariat Negara ikut dipindahkan kembali ke Jakarta, berpengaruh pada kondisi arsip-arsip tersebut. Kurangnya kesadaran dan kemampuan untuk penanganan arsip pada masa itu menyebabkan timbul berbagai kesulitan karena perpindahan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak diketahui apakah selama pemindahan tersebut terdapat bagian arsip yang hilang. Lebih memprihatinkan lagi ialah bahwa pada saat ini sudah tidak dikenali lagi sistem pengaturan arsipnya pada saat itu. Terasa lengkaplah faktor-faktor yang menyebabkan koleksi arsip Sekretariat Negara periode 1945-1949, sebagai suatu bagian yang sulit untuk diidentifikasi, baik informasi maupun sistem pengaturannya.

B. ARSIP

Arsip-arsip Sekretariat Negara diserahkan ke Arsip Nasional RI dari tahun 1972-1973 secara bertahap dan dalam keadaan belum dilakukan pengaturan. Pada mulanya arsip-arsip yang berperiode 1945-1949 tergabung dalam koleksi arsip Kabinet Presiden, tetapi setelah diadakan penelitian lebih lanjut ternyata arsip-arsip periode 1945-1949 terdiri dari beberapa koleksi arsip, di antaranya koleksi arsip Sekretariat Negara 1945-1949.

Jumlah koleksi arsip Sekretariat Negara ada 30 boks kecil, atau kurang lebih 3 M³. Secara fisik koleksi arsip Sekretariat Negara 1945-1949 cukup baik, meskipun keadaannya sudah tidak lengkap, tidak teratur dan merupakan lembaran-lembaran lepas. Juga pengaturannya belum memadai sehingga sulit untuk mengetahui sistem apakah yang dipergunakan pada masa arsip tersebut masih bersifat dinamis.

II. PENGATURAN

Arsip Sekretariat Negara RI diterima oleh Arsip Nasional RI dalam satu paket dengan arsip Kabinet Presiden. Setelah dilakukan penelitian secara cermat, arsip Sekretariat Negara dapat dipisahkan sesuai asal-usul lembaga penciptanya, meskipun tidak dikenali lagi sistem pengaturannya. Karena itu pengaturan dalam inventaris arsip ini disusun sesuai dengan permasalahannya.

Arsip Sekretariat Negara RI di dalam riwayat pengaturannya mengalami dua kali pembenahan. Pembenahan yang pertama dilakukan oleh karyawan Arsip Nasional. Pengaturannya meliputi dua bagian yaitu: Bagian I. Umum, berupa Peraturan Perundang-

undangan yang disusun berdasarkan jenis peraturan. Bagian II. Khusus, berupa jenis arsip yang bukan Peraturan Perundang-undangan misalnya: surat-surat, laporan, dll. Pembinaan yang kedua dilakukan oleh karyawan Arsip Nasional juga ialah Nur Mas Intan Berliana Marpaung dan dibantu oleh Syafran Djauhad sampai pendeskripsian pada kartu. Di dalam pembinaan yang kedua terjadi perubahan penataan dari yang pertama kali dilakukan pembinaan.

Urutan-urutan kerja pada penataan yang kedua ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan arsip-arsip koleksi arsip Sekretariat Negara yang masih tercecer pada koleksi arsip Kabinet Presiden.
2. Memilah arsip dengan non arsip yang masih ada.
3. Memberkaskan arsip-arsip yang berisi informasi spesifik sejenis dan mendeskripsikannya ke kartu-kartu meskipun kenyataannya masih lebih banyak arsip-arsip lepas, yang tidak bisa ditemukan kelompoknya karena tercecer (lihat penjelasan di A. Organisasi).
4. Membuat skema permasalahan yang ada dengan memperhatikan struktur organisasinya.
5. Memanuver kartu-kartu berdasarkan skema.
6. Memberi nomor definitif pada kartu-kartu.
7. Memindahkan deskripsi kartu dalam lembaran inventaris arsip sesuai nomor definitif pada sampul arsip dan menempatkan dalam boks sesuai nomor urutnya.

Untuk mempermudah pemahaman maka pengaturannya disusun menjadi tiga bab, yaitu: Bagian I, mengenai acara kenegaraan. Bagian ini meliputi 4 sub bagian yaitu: 1. Tata Usaha dan Rumah Tangga, 2. Kepegawaian, 3. Keuangan, dan 4. Hubungan Masyarakat. Di dalam ketiga sub bagian pertama mencakup masalah intern Sekretariat Negara. Namun demikian bagian tata usaha dan rumah tangga tidak hanya mengenai urusan tata usaha dan rumah tangga intern Sekretariat Negara tetapi juga masalah-masalah lain yang perlu diketahui oleh Sekretariat Negara, misalnya tentang perubahan cap Kementerian Pertahanan dan permintaan bantuan kertas. Sub bagian yang keempat meliputi tiga sub-sub bagian, yaitu: 1. Protokoler, 2. Hubungan Pribadi dan 3. Dokumentasi. Bagian II, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kelembagaan negara seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Masalah-masalah yang terdapat pada bagian II adalah pengangkatan-pengangkatan anggota lembaga negara tersebut baik di pusat maupun di daerah dan terutama berupa Peraturan Perundang-undangan.

Bagian III, mengenai masalah-masalah pemerintah dan bagian ini meliputi 10 sub bagian, yaitu: 1. Undang-undang Dasar, 2. Organisasi Pemerintahan, 3. Pengelolaan Dana dan Keuangan Negara, 4. Agama, 5. Pendidikan dan Kebudayaan, 6. Administrasi Pegawai, 7. Kesejahteraan Rakyat, 8. Industri dan Perdagangan, 9. Keamanan Dalam Negeri dan 10. Organisasi Massa dan Kepartaian. Bagian III inipun terutama berupa Peraturan Perundang-undangan.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada saudara Syafran Djauhad yang telah membantu penyelesaian inventaris arsip ini hingga pada deskripsi kartu dan kepada Bapak Drs. Sauki Hadiwardoyo yang memberikan saran dan bimbingan selama proses penyelesaian.

Jakarta, Maret 1995

Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

Suprpto, Bibit. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia. Indonesia: Ghalia, 1985

Djamily, Mizwar Drs. Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka. PT Kreasi Jaya Utama, 1986

Wawancara Lisan dengan Bapak Soemarwoto, Pejabat Sekretariat Negara di Kantor Sekretariat Negara pada bulan Pebruari 1986.

I. KESEKRETARIATAN

A. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

1. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 62 tgl. 6 November 1948 tentang hak untuk mempergunakan gedung-gedung dan lain sebagainya di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Konsep
3 lembar
2. Menteri Negara Ri Koordinator Keamanan: Peraturan No. R.I/4 tgl. 4 Juli 1949 tentang mempergunakan gedung-gedung. Risalah peringatan wafatnya K.H. Hasyim Asyari.

Stensilan
6 lembar
3. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. A/609/1948 tgl. 9 November 1948 tentang perubahan cap Kementerian Pertahanan disertai surat pengantar.

Salinan
2 lembar
4. Wakil Sekretaris Negara: Surat Edaran No. 357/P/49 tentang permintaan bantuan kertas.

Stensilan
4 lembar
5. Struktur organisasi Urusan Rumah-Tangga Presiden RI.
N.B.: Tanpa tanggal

Konsep
1 lembar
6. Peta Meja Makan Bersama Presiden, C.G. Belgi v.d. Stichelen.
N.B.: Tanpa tanggal

Fisik arsip tidak ada
7. Daftar barang-barang perak tahun 1948.

Asli
1 sampul
8. Setneg kepada Suryocondro: Telegram No. 452/K-48 tgl. 20 Maret 1948 tentang pemeriksaan penyakit Presiden RI ditangguhkan dahulu.

Pertinggal
2 lembar
9. Setneg kepada Mr. Surjotjondro: Telegram No. 472/K-48 tgl. 23 Maret 1948 tentang permohonan ruangan besar untuk kantor para Koordinator Kementerian Kemakmuran.

Pertinggal
1 lembar
10. Telegram dari Pejabatan Kantor Radio-BC tgl. 24 Juni 1948 tentang telegram-telegram yang tidak sampai.

Turunan
1 lembar

11. Surjotjondro kepada Setneg: Telegram No. 549/di/48 tgl. 28 Juni 1948 tentang inventaris barang Gedung Pegangsaan.
Tembusan
1 lembar
12. Jadwal Perhubungan Kawat Jakarta-Jogjakarta tgl. 28 Juli 1948.
Konsep
3 lembar
13. Telegram-telegram tgl. 19 Februari 1948-20 Agustus 1948 tentang pengiriman barang.
1 sampul
14. Sekretaris Delegasi kepada Setneg: Surat tgl. 20 Mei 1949 tentang kantor-kantor di Kepatihan.
Asli
1 lembar
15. Surat-surat tgl. 12 Mei 1947-9 Juli 1949 tentang cara pengiriman kawat/telegram.
8 lembar
16. Intedance Presidenan: Surat tgl. 29 Juli 1949 tentang permintaan disediakan kopi.
Asli, salinan
2 lembar
17. Kepala Muda Penjabatan Bea dan Cukai kepada Setneg: Surat tgl. 19 Agustus 1949 tentang pembukaan kembali Kantor Besar Penjabatan Bea dan Cukai.
Asli
1 lembar
18. Jawatan Pos Telegrap dan Telepon RI: Surat-surat tgl. 8 Agustus 1949-19 September 1949 tentang pemasangan sambungan telepon.
1 sampul
19. Parmadipura kepada Ngatidjo, pegawai Kantor Intendance Istana Presiden: Surat tanda terima penyerahan barang-barang tgl. 12 Oktober 1949.
Salinan
1 lembar
20. Surat-surat tgl. 14 Desember 1948-13 Oktober 1949 tentang perwakilan/pelimpahan jabatan dari berbagai kementerian.
6 lembar
21. Pengadilan Tinggi Jogja kepada Presiden: Surat tgl. 15 Oktober 1949 tentang permintaan gedung untuk Pengadilan Tinggi Jogjakarta, disertai surat pengantar 26 Oktober 1949.
Asli
2 lembar

22. Setneg kepada Kementerian Penerangan: Surat-surat tgl. 18 Oktober 1949 tentang peminjaman alat pengeras suara.
Asli, pertinggal
2 lembar
23. Perusahaan Tembak Indonesia: Surat-menyurat tgl. 19 Oktober 1949-26 Oktober 1949 tentang pesanan rokok.
Asli
3 lembar
24. Surat-surat tgl. 1 April 1947-11 November 1949 tentang penggunaan cap/stempel.
Asli, salinan
1 sampul
25. Pimpinan Tata Usaha Koperasi Perusahaan Pemborongan SEPerti di Jakarta kepada Presiden: Surat tgl. 14 November 1949 tentang permohonan mendapat pekerjaan memperbaiki istana.
Asli
1 lembar
26. Surat-surat tgl. 22 November 1948-23 November 1949 tentang perlengkapan di Istana Presiden.
Asli, pertinggal
4 lembar
27. Surat-surat tgl. 27 Februari 1948-26 November 1949 tentang pengadaan perlengkapan pada Kantor Setneg.
Asli
1 sampul
28. Setneg kepada Soetopo di Jawatan Gedung-gedung: Nota tgl. 26 November 1949 tentang perbaikan pada Kantor Setneg.
Asli
1 lembar
29. Surat-surat tgl. 11 Juni 1947-1 Desember 1949 tentang nama-nama pejabat dan orang terkemuka dari berbagai Kementerian.
Asli, salinan
1 sampul
30. Daftar surat-surat masuk tgl. 29 November 1949-5 Desember 1949.
Salinan
3 lembar
31. Surat-surat pengantar tgl. 10 Januari 1946-15 Desember 1949.
Asli, pertinggal
1 sampul
32. Surat-surat tgl. 6 Februari 1948-21 Desember 1949 tentang alamat-alamat kantor.
Asli, salinan
1 sampul

33. Surat-surat tgl. 27 Mei-21 Desember 1949 tentang kendaraan bermotor.
Asli, salinan
1 sampul

B. KEPEGAWAIAN

34. Prof. Asikin kepada Setneg: Telegram tgl. 17 Agustus 1948 tentang pemberitahuan sakit.
Asli
1 lembar
35. Daftar pegawai dan gaji pegawai Setneg tgl. 19 Juli 1949.
Asli, salinan
1 sampul
36. Surat-surat tgl. 11 Juli 1949 dan 20 Agustus 1949 tentang pemberitahuan pegawai Setneg.
Asli, pertinggal
3 lembar
37. Daftar Penetapan Pemberhentian Pegawai Setneg (Presidenan) no. 6/U.P./49 tgl. 23 Agustus 1949.
Konsep
5 lembar
38. Yusuf Surjoprayitno, pegawai Setneg kepada Setneg: Surat tgl. 5 Oktober 1949 tentang permohonan perpanjangan waktu libur.
Asli
1 lembar
39. Daftar Riwayat Hidup Pegawai Setneg tgl. 1 April 1947-8 Oktober 1949.
Asli, konsep, salinan
1 sampul
40. Kementerian Perburuhan dan Sosial: Surat tgl. 9 November 1949 tentang pegawai Setneg yang ikut kursus administrasi pegawai rendah, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
41. Surat-surat Keterangan Pegawai Setneg berkenaan dengan tugas kantor, 29 September 1948-24 Desember 1949.
Asli, salinan
10 lembar

C. KEUANGAN

42. Daftar Ongkos Perjalanan Pegawai Setneg tgl. 15 Oktober 1947-3 November 1947.
Pertinggal
1 sampul
43. Setneg kepada Kementerian Keuangan: Surat tgl. 15 Desember 1948 tentang pengiriman rencana anggaran belanja tahun 1949.

- Pertinggal
1 lembar
44. Kepala Intendance Istana Presidenan: Daftar pemasukan dan pengeluaran uang untuk peryaan 17 Agustus 1949 di Istana Presidenan.
Konsep
1 lembar
45. Pembangunan-OpBOW: Bon-bon pembelian bulan Oktober 1949 tentang pembelian barang.
Asli, salinan
3 lembar
46. Ny. Kasm (?) kepada Setneg: Surat Desember 1949 tentang permohonan mendapat uang gaji bulan November dan Desember 1949.
Asli
4 lembar
47. Kementerian Keuangan kepada Setneg: Surat tgl. 20 Desember 1949 tentang kredit Setneg pada Bank Negara Indonesia.
Asli
1 lembar
48. Setneg kepada Kementerian Keuangan: Surat-surat tgl. 12 Juli 1949-21 Februari 1950 tentang permintaan kredit anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Asli, pertinggal
1 sampul

D. HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Protokoler

49. Menteri Luar Negeri kepada Kolonel Vanderpost d/a Setneg di Jogjakarta: Telegram no. 551/11/47=S tgl. 21 April 1947 tentang pergantian tanggan keberangkatan kapal yang meninggalkan Kolombo.
Fisik arsip tidak ada
50. Presiden kepada Presiden Negara Indonesia Timur: Surat tgl. 28 Februari 1948 tentang kunjungan Komisi Parlementer Negara Indonesia Timur.
Konsep
1 lembar
51. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Panglima Besar Angkatan Perang Mobil: Surat Perintah No. 6/P.T./48 tgl. 25 Maret 1948 tentang rencana makan malam bersama dengan Opsir-opsir dari Staf Angkatan Perang Mobil di Presidenan.
Konsep
1 lembar
52. Daftar-daftar Pembesar yang diundang pada Jamuan Makan Malam di Presidenan tgl. 17 Juli 1949 menyambut Dr. Van Royen cs.
Salinan
3 lembar

53. Panitia Pusat Peringatan 17 Agustus 1949 kepada Ajudan Presiden: Surat tgl. 15 Agustus 1949 tentang pelayan-pelayan untuk Jamuan Resepsi tgl 17 Agustus 1949 malam.
Tembusan
1 lembar
54. Mr. Iwa Kusuma Sumatri kepada Setneg: Surat-menyurat tgl. 17 dan 18 Agustus 1949 tentang penolakan Nyonya Iwa Kusuma Sumatri menghadiri Upacara Bendera.
Asli, pertinggal
2 lembar
55. Sekretaris Dewan Menteri kepada Badan Pekerja Nasional Pusat: Surat-menyurat tgl. 23 dan 24 September 1949 tentang penyambutan Anggota Kongres USA.
Tembusan
2 lembar
56. Surat-surat dan Telegram tgl. 29 April 1948-29 September 1949 tentang peringatan dan ucapan selamat hari-hari besar.
1 sampul
57. Rencana Press Release berhubung dengan Hari Angkatan Perang RI tgl. 1 Oktober 1949.
Fisik arsip tidak ada
58. Surat-surat dan telegram-telegram tgl. 12 Februari 1948-6 Oktober 1949 tentang kunjungan-kunjungan ke daerah.
1 sampul
59. Pimpinan Redaksi Harian Pagi Nasional kepada Presiden: Surat tgl. 31 Oktober 1949 tentang Hari Ulang Tahun ke-3 Harian Pagi Nasional.
Asli
1 lembar
60. Surat-surat dan telegram-telegram tgl. 21 Maret 1948-1949 tentang pemberitahuan meninggal dunia dan ucapan turut berduka-cita.
1 sampul
61. Surat-surat dan telegram-telegram tgl. 4 Juni 1946-16 Desember 1949 tentang undangan-undangan kenegaraan, resepsi dan pertunjukan amal.
Konsep
1 sampul

2. Hubungan Pribadi

62. Rencana pekerjaan yang dapat dikerjakan di Daerah Kediri yang dibuat oleh Karmidi di Kediri tgl. 39 Januari 1948.
Turunan
2 lembar

63. M. Djoni, bekas Internering dari Boven Digul tahun 1939: Surat tgl. 15 Februari 1948 tentang ikut rombongan Pemerintah RI dengan kapal terbang ke Medan.
Asli
1 lembar
64. Surat-surat dan Telegram-telegram tgl. 4 Agustus 1948-14 Agustus 1948 tentang ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri.
1 sampul
65. Telegram-telegram tgl. 15 Juni 1948-15 Oktober 1948 tentang Keluarga Mr. Ratmoko.
Asli, tembusan
1 sampul
66. Arifin Harahap kepada Setneg: Telegram No. 1044/s/Del. tgl. 20 Oktober 1948 tentang permohonan alamat anaknya Dr. Soeatmadji.
Tembusan
1 lembar
67. A. Ruslan di Jln. Karang Anyar No. 23 Sampit Kalimantan kepada Setneg: Surat tahun 1949 tentang permintaan gambar-gambar orang terkemuka dari RIS.
N.B.: Tanpa tanggal
Asli
1 lembar
68. Wakil Komisaris Besar Umum/Pemimpin Penuntun Cabang Jakarta kepada Presiden: Surat, tgl. 2 Agustus 1949 tentang permohonan untuk mendapat hadiah korek-api dengan tanda dari Presiden untuk digunakan menyalakan Unggun Api Merdeka.
Asli
2 lembar
69. Sutjipto Hargonotedjo di Kranggan Jogjakarta kepada Presiden: Surat tgl. 17 Agustus 1949 tentang Anggaran Dasar Negara RI, disertai lampiran.
Asli
8 lembar
70. Presiden kepada Teuku Daud Beureuh, Gubernur Militer Aceh di Kutaraja: Surat tgl. 19 Agustus 1949 tentang rencana pertemuan Teuku Daud Beureuh dengan Presiden RI di Jogjakarta.
Fisik arsip tidak ada
71. Mrs. Phoa di Jakarta kepada Presiden: Surat tgl. 24 Agustus 1949 tentang ijin masuk ke Jogjakarta.
N.B.: Dalam bahasa Inggris.
Asli
1 lembar
72. Achmad Aminullah di Jakarta kepada Presiden: Surat tgl. 1 September 1949 tentang riwayat perjuangannya dalam beberapa partai antara lain Partai Indonesia Labur Pati, Partai Liberal Nasional Indonesia, disertai lampiran.

Asli
8 lembar

73. Ned Christeluke Sociale Corporative, UNIE Frans J.A. van Dooren kepada Presiden: Surat tgl. 5 September 1949 tentang pandangan mengenai kemerdekaan, disertai lampiran.

Fisik arsip tidak ada

74. Anwar Saleh di Jln. Serdang 142 Medan kepada Setneg: Surat-menyurat tgl. 3 September 1949 dan 15 September 1949 tentang keinginan mengabdikan ke[ada Keluarga Presiden.

Asli, pertinggal
3 lembar

75. Sanikem Sastrodjumiko di Sungailiat Bangka kepada Kepala Pemerintahan Negeri di Jogjakarta: Surat tgl. 23 September 1949 tentang permohonan mendapat kabar mengenai orangtuanya dan saudara-saudaranya yaitu Sastrodjumiko, Temu Sastrodjumiko, Tugimen Sastrodjumiko, dan Ngadilin Sastrodjumiko.

Asli
1 lembar

76. Panitia Hari Besar Islam kepada Presiden: Surat tgl. 27 September 1949 tentang hewan qurban.

Fisik arsip tidak ada

77. Surat-surat dan telegram tgl. 29 Januari 1947-6 Oktober 1949 tentang simpati bangsa asing kepada Indonesia.

Asli, salinan
9 lembar

78. Sekretariat gerakan Pandu Indonesia Tenggara di Kalimantan Timur: Surat tgl 12 Oktober 1949 tentang pemberian korek-api.

Pertinggal
1 lembar

79. Masyarakat kepada Setneg: Surat-surat tgl. 5 September 1949 dan 14 Oktober 1949 tentang permintaan untuk dapat tinggal di Jogjakarta.

Asli
2 lembar

80. Bank Rakyat Maluku kepada Presiden: Surat tgl. 26 Oktober 1949 tentang permohonan sumbangan 1 peci Presiden sebagai contoh.

Asli
1 lembar

81. Masyarakat kepada Presiden: Surat-surat tgl. 15 Agustus 1949-30 Oktober 1949 tentang pemberian nama bayi oleh Presiden.

Asli
4 lembar

82. Masyarakat kepada Setneg: Surat-surat tgl. 1 Agustus 1949-1 November 1949 tentang pemberian tanda mata.

- Asli
3 lembar
83. Masyarakat kepada Presiden: Surat-surat tgl. 22 September 1949-4 November 1949 tentang permintaan untuk biaya hidup dan meneruskan sekolah.
- Asli
1 sampul
84. Abd. Rahman Rusly di Padang kepada Presiden: Surat-surat tgl. Desember 1949 tentang permohonan untuk dapat memberikan komentar atas pidato penerangan politiknya di radio mengenai masalah propaganda Komunis dan propaganda Jepang, disertai lampiran.
- Asli
3 lembar
85. Kiai Haji Achmad di Palembang kepada Presiden: Surat-surat tgl. 27 September 1949-9 Desember 1949 tentang usul menjodohkan Sultan Hamengku Buwono IX dengan R. Ayu Chodidjah binti R.H. Achmad Nanang.
- Asli
5 lembar
86. Masyarakat kepada Presiden: Kartupos-kartupos tgl. 2 Juli 1949-12 Desember 1949.
- Fisik arsip tidak ada**
87. Masyarakat dan Organisasi Profesi: Surat-surat tgl. 9 April 1947-16 Desember 1949 tentang keinginan menghadap Presiden.
- Asli
5 lembar
88. Surat-surat tgl. 19 Juli 1949-22 Desember 1949 tentang permohonan mendapat pekerjaan.
- Asli
1 sampul
89. Surat-surat tgl. 30 Juli 1948-23 Desember 1949 tentang ucapan selamat dan terima kasih.
- 1 sampul

3. Dokumentasi

90. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram No. 111/D2/48 tgl. 1948 tentang permohonan daftar nama hakim, dokter, struktur organisasi departemen-departemen, nama surat-surat kabar, advokat dan insinyur-insinyur swasta, keempat pengurus partai politik, dll.
- Asli
1 lembar
91. Panitia Istimewa kepada Setneg: Daftar tgl. 9 Februari 1948 tentang nama anggota Panitia Istimewa, disertai surat pengantar.
- Salinan
2 lembar

92. Wakil Setneg kepada Kementerian Luar-negeri: Surat tgl. 21 April 1948 tentang permintaan pengiriman kembali Undang-undang No. 2 tahun 1948, disertai lampiran.
Pertinggal
1 sampul
93. Wakil Setneg kepada Kementerian Keuangan: Surat tgl. 26 April 1948 tentang permintaan pengiriman naskah-naskah Undang-undang No. 29/BP3/48U, No. 30/BP3/48U dan No. 31/BP3/48U yang sudah definitif untuk disahkan oleh Presiden.
Pertinggal
1 lembar
94. Setneg kepada Wakil Setneg di Bukittinggi: Telegram No. 1123/K-48 tgl. 29 Juni 1948 tentang masalah Buku Sarinah karangan Presiden Soekarno.
Asli
1 lembar
95. G.L. Talolo di Balige kepada Presiden: Surat tgl. 22 Juli 1949 tentang kiriman naskah mengenai hubungan Indonesia-Belanda yang tidak diterbitkan.
Asli
1 lembar
96. Panitia Penyelenggara Perayaan Peringatan: Surat tgl. 13 Agustus 1949 tentang pidato radio menyambut 17 Agustus 1949.
Asli
1 lembar
97. Kementerian Penerangan kepada Setneg: Surat tgl. 9 September 1949 tentang perubahan dalam alinea pendahuluan dalam artikel mengenai Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Ben F. Crowson di Washington USA, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
98. Kementerian Penerangan kepada Setneg: Surat-menyurat tgl. 10 September 1949 tentang bahan-bahan buku 17 Agustus.
Asli, pertinggal
2 lembar
99. Kepala Staf Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa II/DIV II kepada Presiden: Surat tgl. 29 September 1949 tentang bahan-bahan dari Daerah Territorium Gubernur Militer Daerah Istimewa II yang akan dimasukkan dalam isi pidato Paduka Yang Mulia selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI pada Peringatan Hari Angkatan Perang RI yang ke-4 pada tgl. 5 Oktober 1949.
Asli
1 lembar
100. Surat-surat tgl. 6 Agustus 1949-10 Oktober 1949 tentang permintaan naskah Pidato Presiden.
Asli, pertinggal
8 lembar

101. Toko Buku Usaha Kita di Jogjakarta: Surat tgl. 25 Oktober 1949 tentang sudah tercetaknya Buku Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad SAW.
Asli
1 lembar
102. Surat-surat tgl. 10 september 1949-11 November 1949 tentang permohonan tulisan Presiden.
Asli
3 lembar
103. Surat-surat dan Kawat-kawat tgl. 5 Maret 1948-15 November 1949 tentang permintaan dan pengiriman peraturan perundangan.
1 sampul
104. Surat-surat tgl. 15 April 1948-21 November 1949 tentang langganan dan pengiriman buku-buku dan majalah.
Asli, pertinggal
1 sampul
105. Surat-surat dan teks tgl. 23 Februari 1948-20 Desember 1949 tentang amanat Presiden.
Asli, pertinggal
1 sampul
106. Wakil Kepala Dokumentasi G.III.SAD Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Darat kepada Kepala Bagian Tata Hukum Setneg: Surat tgl. 23 Desember 1949 tentang permohonan mengutip Berita Negara.
Asli
1 lembar
107. Puteri Merdeka: Kumpulan Lagu-lagu Jawa untuk Presiden Soekarno.
N.B.: Tanpa tanggal
Salinan
1 sampul
108. Anggodo: Karangan Riwayat Perjuangan Kemerdekaan.
N.B.: Tanpa tanggal
Salinan
1 lembar
109. Dr. Prijono: Karangan berjudul Perwujudan Cita-cita.
N.B.: Tanpa tanggal
Salinan
1 lembar
110. Rencana Campagne Penerangan mengisi Kemerdekaan Kita.
N.B.: Tanpa tanggal
Salinan
3 lembar
111. Piagam Atlantic Charter.
N.B.: Tanpa tanggal, dalam bahasa Indonesia dan Belanda.
Salinan

- 2 lembar
112. Uraian Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking tentang pengertian ekonomi.
N.B.: Tanpa tanggal
- Salinan
1 sampul
113. Daftar Para Kepala Negara, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri seluruh dunia.
N.B.: Tanpa tanggal
- Salinan
1 lembar
114. Teks Proklamasi Kemerdekaan RI tgl. 17 Agustus 1945.
- Stensilan
2 lembar
115. Daftar Himpunan Perundang-undangan Negara RI tahun 1945-1946.
- Konsep
1 sampul
116. Daftar Isi menurut jenis peraturan tahun 1946.
- Konsep
1 lembar
117. Riwayat Jawatan Perkapalan Daerah Jawa Tengah (Gunseikanbu Zosenkyoku Semarang Sibu) sesudah perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan setelah pecah pertempuran ke II dengan Inggris/Nica di Semarang pada tanggal 17 November 1946.
- Salinan
6 lembar
118. Buku tgl. Desember 1946 tentang Maklumat-maklumat Menteri Keuangan No. 1 s/d No. 21.
- Konsep
1 eksemplar
119. Index Berita Negara RI tahun 1947, disertai lampiran.
- Turunan
1 sampul
120. Mr. Soedarisman Poerwokerto kepada Presiden: Surat tgl. 9 Januari 1947 tentang karangan yang berjudul "Menghadapi Sidang Pleno KNI Pusat", disertai lampiran.
- Asli
8 lembar
121. Kedaulatan Rakyat": Kutipan tgl. 19 Maret 1947 No. 141 tentang didudukinya Mojokerto oleh pihak Militer Belanda.
- Salinan
2 lembar

122. J.A. Ritman kepada Kementerian Luar-Negeri: Surat tgl. 20 Mei 1947 tentang ucapan terima-kasih, disertai surat pengantar dan lampiran.
Fisik arsip tidak ada
123. Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dengan Mesir.
Salinan
1 lembar
124. Pidato Radio tgl. 16 November 1947 tentang Komisi Tiga Negara.
N.B.: Dalam bahasa Sunda dan Jawa.
Fisik arsip tidak ada
125. Daftar Penetapan Pemerintah 1946-1948.
Konsep
6 lembar
126. Panitia Tanah Conversie: Buku tgl. 1948 tentang Pertimbangan Panitia Tanah Conversie.
Konsep
1 sampul
127. Koesnodiprodjo: Buku Penuntun tahun 1948 tentang himpunan perundang-undangan Pemerintah RI.
Konsep
1 eksemplar
128. Panitia Persiapan Kenegaraan: Laporan-laporan Seksi pada Mukthamar Federal Bandung tahun 1948 tentang Negara Indonesia Serikat.
Stensilan
1 jilid
129. Panitia Program Nasional: Notulen-notulen rapat tgl. 21 Juni 1948, 12 Juli 1948, 14 Juli 1948 dan 27 Juli 1948 tentang pembuatan Program-program Nasional.
Konsep
1 sampul
130. Notulen Rapat di Ampat Angkat tgl. 10 Agustus 1948 tentang rencana pembentukan daerah otonom di Ampat Angkat.
N.B.: Tidak lengkap
Konsep
1 lembar
131. Mr. Pringgodigdo: Karangan berjudul "Mengapa Bangsa Indonesia Tidak Dapat Menerima Kembali Pimpinan Bangsa Belanda".
Salinan
5 lembar
132. Daftar Undang-undang tahun 1948 tgl. 1 September 1948.
Konsep
2 lembar

133. Menteri Kemakmuran: Artikel tgl. 13 Oktober 1948 tentang Garis-garis Politik Perekonomian dan Pemerintah.
Salinan
8 lembar
134. A.P. Lolong: Karangan berjudul "Sedikit tentang Pemakaian Lagu Kebangsaan dan Bendera Nasional" tgl. 11 Desember 1948.
Salinan
5 lembar
135. Ruling Dewan Keamanan tgl. 23 Maret 1949.
Salinan
1 lembar
136. Perwakilan Indonesia London: Rencana Siaran untuk publikasi tgl. 25 Juli 1949 tentang Negara Republik Indonesia Serikat.
Fisik arsip tidak ada
137. Kementerian Penerangan RI kepada Presiden: Pedoman Penerangan tgl. 2 Agustus 1949 tentang penjelasan keadaan politik pada masa sekarang (akhir Juli 1949), disertai surat pengantar.
Stensilan
4 lembar
138. Jadwal Pertunjukan Film di Bioskop tgl. 13 Agustus 1949.
Fisik arsip tidak ada
139. Pidato-pidato dan Amanat-amanat Presiden tgl. 6 Februari 1948-17 Agustus 1949.
1 sampul
140. Pidato Ketua Komite Nasional Pusat Mr. Assaat dan Amanat Presiden pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke IV tgl. 17 Agustus 1949.
Stensilan
1 jilid
141. Kementerian Penerangan: Artikel-artikel surat-kabar tgl. 16 Juli 1949-21 Oktober 1949.
Salinan
5 lembar
142. SK. Java Post: Guntingan koran tgl. 21 Oktober 1949 tentang artikel tembok prinsipil telah ditembus kearah menghilangkan kegentingan yang ditulis oleh Dr. Moerdjani, disertai surat pengantar.
Stensilan
2 lembar

II. KELEMBAGAAN NEGARA

A. KNIP

143. Undang-undang No. 1 tgl. 23 November 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

Konsep

- 1 sampul
144. Undang-undang No. 12 tgl. 8 Juli 1946 tentang pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
 Konsep
 6 lembar
145. Undang-undang No. 9 tgl. 14 April 1948 tentang kedudukan hukum Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, disertai lampiran.
 Asli
 1 sampul
146. Undang-undang No. 6 tgl. 28 November 1949 tentang penajumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
 Stensilan
 6 lembar
147. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 2 tgl. 18 April 1946 tentang pembaharuan Komite Nasional Pusat.
 Konsep, duplikat
 1 sampul
148. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 9 dan No. 12 tgl. 14 September 1946 tentang menjalankan undang-undang dan pembaharuan Komite Nasional Pusat.
 Konsep
 1 sampul
149. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 2 tgl. 30 Juli 1949 tentang penghargaan kedudukan anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.
 Asli, konsep
 2 lembar
150. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 29 tgl. 19 Desember 1949 tentang penghasilan Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.
 Konsep, stensilan
 9 lembar
151. Presiden RI: Peraturan No. 6 tgl. 29 Desember 1946 tentang penyempurnaan Susunan Komite Nasional Pusat, disertai lampiran.
 1 sampul
152. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 19/S.D. tgl. 16 September 1946 tentang pembentukan Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
 Konsep
 1 lembar
153. Presiden RI: Penetapan No. 26 tgl. 9 Oktober 1948 tentang pembubaran Badan Pembaharuan Komite Nasional Pusat.
 Salinan
 4 lembar

154. Presiden RI: Penetapan-penetapan tgl. 2 Desember 1949-23 Desember 1949 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nasional Pusat.
Konsep, stensilan
1 sampul
155. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945: Penetapan tentang pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia, Gerakan Partai Nasional Indonesia, Badan Penolong Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat.
Konsep
1 sampul
156. Presiden RI: Surat Keputusan No. 25/A.CIV/48 tgl. 27 Februari 1948 tentang pemberhentian dengan hormat S. Sardjono sebagai Anggota Badan Komite Nasional Pusat dan pengangkatan Sadjarwa sebagai penggantinya.
Konsep
1 lembar
157. Presiden RI: Surat Keputusan tahun 1949 tentang pengangkatan Mr. Roesli sebagai Sekretaris pada Sekretaris BPKNIP.
N.B.: Lampiran tidak ada.
Konsep
1 lembar
158. Presiden RI: Maklumat-maklumat tgl. 14 Februari 1947-28 Februari 1947 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nasional Pusat.
Duplikat
4 lembar
159. Wakil Presiden RI: Maklumat No. 10 tgl. 16 Oktober 1949 tentang penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
Fisik arsip tidak ada
160. Daftar nama-nama Anggota Panitia Politik Badan Pekerja KNIP.
Konsep
1 lembar
161. Gubernur Kalimantan kepada Setneg: Surat tgl. 6 Januari 1947 tentang calon penambahan Anggota Komite Nasional Pusat, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
162. Presiden kepada Mr. Amir Sjarifoedin, Dr. A.K. Gani, Drs. Setiadjit: Surat tgl. 2 Juli 1947 tentang pembentukan kabinet, disertai lampiran.
Asli
3 lembar
163. BPKNIP: Laporan Gabungan Panitia Tetap Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tgl. 17 Juni 1948 tentang RUN Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
Stensilan
2 lembar

164. Ketua KNIP kepada Pemerintah RI di Jogjakarta: Telegram tgl. 12 September 1949 tentang Pendirian Komite Nasional Indonesia Kalimantan.
Asli
1 lembar
165. Surat-surat tgl. 30 Juli 1949-19 September 1949 tentang Wakil-wakil Partai yang duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).
Asli
1 sampul
166. Setneg kepada BPKNIP: Surat tgl. 27 Oktober 1949 tentang usulan Dewan Partai Persatuan Indonesia Raya mengenai Penambahan Anggota BPKNIP, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
167. Menteri Pertahanan kepada Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat: Surat tgl. 23 November 1949 tentang jawaban atas pertanyaan Anggota BPKNIP Manai Sophiaan di Sulawesi dan Fraksi Masyumi, disertai lampiran.
Tembusan
1 sampul
168. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Presiden: Surat tgl. 5 Desember 1949 tentang usul inisiatif Rancangan Undang-undang yaitu mengenai penunjukan pemangku sementara jabatan Presiden, perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1948 dan pengadaan Peraturan-peraturan Istimewa untuk sidang ke IV Komite Nasional Pusat.
Asli
1 sampul
169. Presiden kepada Ketua BPKNIP: Surat tgl. 17 Desember 1949 tentang penerimaan Beliau sebagai Presiden.
Pertinggal
1 lembar

B. DPA

170. Sekretaris Negara kepada Menteri Kehakiman di Surakarta: Surat tgl. 20 Januari 1947 tentang pembentukan Undang-undang mengenai Dewan Pertimbangan Agung.
Salinan
1 lembar
171. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/10 tgl. 4 Juni 1949 tentang pengangkatan Ki Hajar Dewantoro sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI untuk sementara waktu dan selama M. Soetardjo Kartohadikoesoemo beristirahat.
Salinan
4 lembar
172. Telegram-telegram tgl. 22 Maret 1948 dan 23 Maret 1948 tentang pemberhentian Wiranatakusuma sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Pertinggal
2 lembar

173. Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden: Pertimbangan tgl. 6 April 1948, 16 November 1948 dan 28 September 1949 tentang Pemerintah Daerah.

Salinan
7 lembar

174. Setneg kepada Ketua Dewan Pertimbangan Agung: Surat tgl. 2 Desember 1949 tentang pemberhentian R. King Natawijogja dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung, disertai lampiran.

Pertinggal
4 lembar

C. DPR

175. Undang-undang No. 12 tgl. 24 Desember 1949 tentang Perubahan Undang-undang No. 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan anggota-anggotanya.

1 sampul

176. Undang-undang No. 13 bulan November 1949 tentang penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Surabaya, Madura, Besuki, Maang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro dan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut dan pembentukan Propinsi Jawa Timur, disertai lampiran.

Duplikat
1 sampul

177. Undang-undang No. 15 bulan November 1949 tentang penghapusan Pemerintaha Daerah Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi dan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut dan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah, disertai lampiran.

Duplikat
1 sampul

178. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 10 tgl. 26 September 1946 tentang Kantor Pusat Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konsep
3 lembar

D. BPK

179. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. 28 Desember 1946 tentang pengangkatan Raden Soerasno sebagai Ketua BPK dan Dr. M. Aboetari sebagai anggota BPK, disertai lampiran.

Konsep
2 lembar

180. Badan Pemeriksa Keuangan Negara: Surat Keputusan No. 258/um tgl. 29 November 1949 tentang penggabungan BPKN Malegalng dengan BPKN Jogjakarta.

Salinan
1 lembar

III. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. UUD/NKRKS/UUDS/UUD'45

181. Undang-undang Dasar 1945 tahun 1945 tentang Negara Republik Indonesia.
Konsep, fotocopy
1 sampul

B. ORGANISASI PEMERINTAHAN

182. Undang-undang No. 13 tgl. 14 September 1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan.
Konsep
4 lembar
183. Undang-undang No. 14 tgl. 14 september 1946 tentang perubahan syarat-syarat pemilih kepala desa.
Konsep
4 lembar
184. Undang-undang No.23 dan 24 tgl. 29 November 1946 tentang pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 9 dan No. 10 tahun 1946.
Konsep
3 lembar
185. Undang-undang No. 7 tgl. 27 Februari 1947 tentang Peraturan Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
186. Panitia II dan III: Laporan-laporan bulan Agustus 1947 tentang rencana Undang-undang Kementerian Perburuhan, Undang-undang Kecelakaan Perang, Undang-undang Pidana Tentara.
Konsep
4 lembar
187. Undang-undang No. 35 tgl. 18 Oktober 1947 tentang pengesahan Peraturan Pemerintahan No. 21 tahun 1947 mengenai Komisaris Negara.
Fisik arsip tidak ada
188. Undang-undang tahun 1948 tentang pembagian negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disertai surat pengantar dan penjelasannya.
Konsep
1 sampul
189. Undang-undang No. 3 tgl. 5 Maret 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, disertai penjelasannya.
Duplikat
1 sampul

190. Wakil Setneg kepada Wakil Presiden: Surat tgl. 23 Maret 1948 tentang Pengesahan Undang-undang No. 4, No. 6, No. 18 dan No. 24, disertai lampiran.
Pertinggal
1 sampul
191. Undang-undang No. 5 tgl. 24 Maret 1948 tentang beberapa peraturan-peraturan istimewa mengenai pencatatan jiwa.
Duplikat
1 sampul
192. Undang-undang No. 7 tgl. 30 Maret 1948 tentang pencabutan Peraturan Pemerintahan No. 22 tahun 1947.
Duplikat
1 sampul
193. Undang-undang No. 10 tgl. 15 April 1948 tentang Pemerintahan Sumatera, disertai lampiran.
Duplikat
1 sampul
194. Menteri Perburuhan dan Sosial kepada Presiden: Surat tgl. 22 April 1948 tentang pengiriman kembali Undang-undang No. 12 tahun 1948, disertai penjelasannya.
Asli
1 sampul
195. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Presiden: Surat tgl. 27 April 1948 tentang disetujuinya perubahan-perubahan Rancangan Undang-undang Pemerintah mengenai Perubahan Vorstenlandsch Grondhuureglement, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
196. Undang-undang No. 22 tgl. 10 Juli 1948 tentang Pemerintah Daerah.
N.B.: Dalam bahasa Indonesia dan Jawa.
Konsep, duplikat
1 sampul
197. Undang-undang No. 2 tgl. 30 September 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan wakil perdana menteri yang berkedudukan di Sumatera.
6 lembar
198. Undang-undang No. 14 November 1949 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disertai lampiran.
Duplikat
6 lembar
199. Undang-undang No. 11 tgl. 14 Desember 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Konsep, stensilan
8 lembar

200. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 8 tgl. 8 Agustus 1946 tentang Badan Perwakilan Rakyat di Daerah Surakarta.
Konsep
6 lembar
201. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 9 tgl. 28 Oktober 1946 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1946 dan perubahan perkataan Presiden RI menjadi perdana menteri pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1946.
Konsep
3 lembar
202. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 1 dan No. 2 tgl. 10 Oktober 1945 tentang peraturan mengumumkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dan tentang pernyataan bahwa segala Undang-undang dan Peraturan-peraturan (Badan-badan Negara) yang dulu masih berlaku, disertai penjelasannya.
Konsep
5 lembar
203. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 5 tgl. 17 Juli 1946 tentang Badan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Surakarta.
Salinan
8 lembar
204. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 5 tgl. 18 Juli 1946 tentang pembentukan Mahkamah Tentara Luar Biasa di Daerah Serang dan Pemekasan.
Konsep, salinan
6 lembar
205. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan tgl. 18 Juli 1946 tentang pembentukan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa untuk sementara.
Konsep, salinan
6 lembar
206. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan-peraturan No. 10 dan No. 11 tgl. 9 November 1946 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1946 tgl. 18 Juli 1946.
Salinan
2 lembar
207. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 4 tgl. 14 Maret 1947 tentang Pembentukan Pengadilan Tentara Luar Biasa.
Konsep
1 sampul

208. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 6 tgl. 16 April 1947 tentang aturan-aturan Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Pemerintah Pusat, Peraturan-peraturan Karesidenan Dewan Pertahanan Daerah, Kabupaten Kota dan Desa yang melarang keluar masuk barang-barang dihapuskan, Maklumat Kementerian Kemakmuran tgl. 11 Maret 1947, 18 Mei 1947 dan 31 Oktober 1947 dihapuskan.
- Salinan
1 lembar
209. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 25 tgl. 1 Juni 1947 dan 30 September 1947 tentang perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947.
- Konsep, salinan
1 sampul
210. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 3 tgl. 26 Februari 1948 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1947 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1947.
- Stensilan
3 lembar
211. Wakil Direktur Jenderal Kementerian Kemakmuran: Surat tgl. 3 Agustus 1948 tentang pembetulan Peraturan Pemerintah No. 15 tgl. 9 Juli 1948, disertai lampiran.
- Tembusan
1 sampul
212. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 37 tgl. 1 Oktober 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksanaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.
- Konsep, duplikat
7 lembar
213. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 43 tgl. 7 Oktober 1948 tentang pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1947.
- Konsep
1 lembar
214. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 49 tgl. 7 Oktober 1948 tentang perubahan beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948.
- Konsep
2 lembar
215. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 51 tgl. 23 Oktober 1948 tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Keuangan.
- Stensilan
1 lembar
216. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 60 tgl. 30 Oktober 1948 tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman.
- Stensilan

- 1 sampul
217. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 61 tgl. 6 November 1948 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948.
Konsep
1 lembar
218. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 65 tgl. 9 November 1948 tentang penambahan perubahan beberapa pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1946.
Konsep
2 lembar
219. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 66 tgl. 13 November 1948 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1948.
Konsep
1 lembar
220. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 69 tgl. 18 November 1948 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1948.
Konsep, stensilan
6 lembar
221. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan-peraturan No. 1-71 tahun 1948 tgl. 19 Januari 1948-4 Desember 1948.
Stensilan
1 bundel
222. Pemerintah RI Jogjakarta: Rencana Peraturan tahun 1949 tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum.
Konsep
1 lembar
223. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 15 tgl. 4 November 1949 tentang lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Perhubungan.
Salinan
1 sampul
224. Acting Perdana Menteri kepada Setneg: Surat tgl. 15 November 1949 tentang Rencana Peraturan Pemerintah mengenai Susunan Kementerian Agama.
Pertinggal
7 lembar
225. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 28 tgl. 16 Desember 1949 tentang penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1949 mengenai lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial.
Stensilan
4 lembar

226. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 28 tgl. 16 Desember 1949 tentang penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1949 mengenai lapangan kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial.
Stensilan
4 lembar
227. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1/SD. tgl. 27 Oktober 1945 tentang jawatan-jawatan yang masuk pada Departemen Kehakiman, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kemakmuran dan Departemen Perhubungan.
Salinan
2 lembar
228. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 3/SD. Tgl. 15 November 1945 tentang urusan agama bagian dari Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Negeri.
Salinan
1 lembar
229. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1/SD tgl. 3 Januari 1946 tentang pengadaan Departemen Agama dan Balai Pemuda yang menjadi bagian dari Departemen Sosial.
Konsep
1 lembar
230. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 2/SD tgl. 7 Januari 1946 tentang penggantian nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), penggantian nama Kementerian Keamanan menjadi Kementerian Pertahanan.
Konsep
1 sampul
231. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 4/SD tgl. 25 Januari 1946 tentang pengubahan nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi Militer Negara RI yang disusun berdasarkan Militer Internasional.
Konsep
1 lembar
232. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 7/SD tgl. 18 April 1946 tentang penunjukan tempat kedudukan sementara bagi Pengadilan Tinggi di Semarang ditempatkan di Ibukota Jogjakarta, Pengadilan Tinggi di Surabaya ditempatkan di Ibukota Jombang. Dan penentuan hakim-hakimnya bagi pengadilan-pengadilan tersebut.
Konsep
2 lembar
233. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No.8/SD tgl. 26 April 1946 tentang pemindahan Jawatan Topograp dari lingkungan Departemen Kehakiman ke Departemen Pertahanan.
Konsep
1 lembar

234. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 10/SD tgl. 25 Juni 1946 tentang penggabungan Kementerian Pertanian dan Persediaan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kementerian Kemakmuran.
Konsep
1 lembar
235. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 11 tgl. 25 Juni 1946 tentang perubahan dalam Jawatan Kepolisian yang menjadi jawatan tersendiri dibawah pimpinan Perdana Menteri.
Duplikat
1 lembar
236. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 12/SD tgl. 28 Juni 1946 tentang penyerahan urusan pergerakan pemuda kepada Menteri Negara.
Konsep
2 lembar
237. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 14/SD tgl. 8 Juli 1946 tentang penghapusan Pemerintah Istimewa Daerah Bekasi/Cikarang/Krawang/Cibinong/Cibarusan.
Konsep
2 lembar
238. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan-penetapan tgl. 18 Juni 1946-2 Desember 1946 tentang perubahan-perubahan Penetapan Pemerintah No. 2/oem tahun 1946.
Salinan
1 sampul
239. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 11/eom tgl. 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.
Konsep
2 lembar
240. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1 tgl. 21 Juni 1947 tentang tempat kedudukan sementara dari Pengadilan Tinggi di Surabaya ibukota Malang.
3 lembar
241. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 3 tgl. 25 Juli 1947 tentang pembentukan Kementerian Perburuhan.
6 lembar
242. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan bulan Februari 1948 tentang mempersatukan Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial.
Konsep
1 lembar
243. Pemerintah RI Jogjakarta: Rancangan-rancangan Penetapan No. 1 tgl. 18 Februari 1948 tentang pengoperan tugas dari suatu Kementerian kepada Kementerian lain.

- Konsep
2 lembar
244. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 2 tgl. 22 Maret 1948 tentang penyerahan beberapa tugas kewajiban dari Kementerian Perburuhan dan Sosial kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda, disertai lampiran.
5 lembar
245. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 27 tgl. 9 Oktober 1948 tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Wakil Anggota Kantor Pemilihan Pusat.
Konsep, salinan
2 lembar
246. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 6 tgl. 6 November 1948 tentang penempatan tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
Konsep
2 lembar
247. Presiden RI: Penetapan No. 5/SD tgl. 25 Maret 1946 tentang pemindahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.
Konsep
1 lembar
248. Presiden RI: Penetapan tgl. 24 Desember 1946 tentang pembentukan sebuah panitia yang terdiri dari Anggota Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang serta dari Kementerian Pertahanan yang berkewajiban memberi usul dan nasehat mengenai Susunan Ketentaraan dan Kementerian Pertahanan.
Salinan
1 lembar
249. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan tgl. 3 Juni 1947 tentang penyusunan Komando Divisi VII.
Konsep
4 lembar
250. Waperdam tgl. 6 November 1949 tentang pemilihan anggota DPD Sumatera Tengah.
Salinan
6 lembar
251. Presiden RI: Penetapan No. 8 tgl. 27 Februari 1948 tentang pembentukan Panitia Perancang Kedudukan dan Kewajiban Kepolisian Negara dan pengangkatan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Perancang Kedudukan dan Kewajiban Kepolisian Negara yaitu: Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Zainoel Baharoedin (dari BPKNIP), Prawoto Mangkoesasmito (dari BPKNIP), Mr. Wongsonegoro (dari Kementerian Dalam Negeri) dan Prof. Mr. Djokosutono.
Asli
1 lembar

252. Presiden RI: Penetapan No. 11 tgl. 6 Maret 1948 tentang pembentukan Panitia Pemberi Pertimbangan kepada Pemerintah terhadap keinginan pihak Tani yang berkehendak dihapuskannya Peraturan-peraturan yang mengenai tanah conversie dalam Daerah Surakarta dan Jogjakarta dan pengangkatan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia serta seorang sekretaris pemberi pertimbangan kepada Pemerintah yaitu: H. Gaos Hardjasoemantri, Sardjarwo, Mr. Soejono Hadinoto Brotokoesoemo, R. Soeradibrata, Ir. M. Soetedjo, Mr. Fn. Moetalib, K.R.T. Wiroboemi, Hartojo, Mr. R. Soekardono, R. Singgih Praptodihardjo (9 Sekeratris).
Salinan
1 lembar
253. Presiden RI: Penetapan-penetapan No. 4 dan No. 12 tgl. 6 Februari 1948 dan 17 Maret 1948 tentang pembentukan dan pembubaran Panitia Hijrah, disertai lampiran.
Konsep, salinan
1 sampul
254. Presiden RI: Penetapan No. 13 tgl. 26 April 1948 tentang adanya 2 Pengadilan Negeri di Karesidenan Tapanuli yaitu: Pengadilan Negeri Tapanuli Utara dan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan dan adanya 1 Pengadilan Negeri di Karesidenan Riau yaitu Pengadilan Negeri Riau.
Konsep
3 lembar
255. Presiden RI: Penetapan No. 15 tgl. 8 Mei 1948 tentang pembubaran Panitia Tanah Conversie.
Asli
1 lembar
256. Surat-surat tgl. 28 April 1948-20 Agustus 1948 tentang Penetapan Presiden mengenai Panitia Agraria.
1 sampul
257. Presiden RI: Penetapan No. 21 tgl. 23 September 1948 tentang mulai berlakunya Penetapan Presiden No. 19 tahun 1948.
Asli, konsep
2 lembar
258. Presiden RI: Penetapan No. 24 tgl. 28 September 1948 tentang pencabutan Penetapan Presiden No. 22 tahun 1948 dan pernyataan Propinsi Jawa Timur sebagai Daerah Militer Istimewa.
Konsep
2 lembar
259. Presiden RI: Penetapan No. 28 tgl. 16 November 1948 tentang pembentukan Panitia Indonesia Raya dan pengangkatan sebagai Anggota-anggota Panitia Indonesia Raya.
Asli, konsep
6 lembar

260. Wakil Perdana Menteri NRI: Penetapan No. 2/Um/WPM tgl. 6 November 1949 tentang pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Propinsi Sumatera Tengah, disertai surat pengantar.
Salinan
3 lembar
261. Presiden RI dan Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara: Surat Keputusan tgl. 5 Oktober 1946 tentang penganugerahan sebuah panji kepada masing-masing Satuan Angkatan Darat, Laut dan Udara.
Konsep, salinan
5 lembar
262. Presiden RI: Surat Keputusan No. 97-A-1947 tgl. 28 Juli 1947 tentang pembentukan Pucuk Pimpinan ALRI.
Salinan
3 lembar
263. Presiden RI: Surat Keputusan No. 43/P.Mil./48 tgl. 13 April 1948 tentang pembubaran Panitia Pertimbangan Pucuk Pimpinan Tentara dan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
Salinan
1 lembar
264. Presiden RI: Surat Keputusan No. 66/P.Civ/48 tgl. 1 September 1948 tentang pencabutan Surat Ketetapan Presiden tgl. 17 Agustus 1946 No. Pol. 3/51/53.
Konsep
1 lembar
265. Presiden RI: Surat Keputusan No. 86/A.Mil./48 tgl. 27 Oktober 1948 tentang pembentukan Dewan kehormatan Militer dan pengangkatan anggota tetap dan anggota tidak tetap Dewan Kehormatan Militer.
Salinan
3 lembar
266. Presiden RI: Surat Keputusan No. 99/A.Civ./48 tgl. 10 Desember 1948 tentang pengangkatan Mohamad Sjafii sebagai anggota Panitia Indonesia Raya, disertai surat pengantar.
Pertinggal
2 lembar
267. Presiden RI: Surat Keputusan No. 2/P/49 tgl. 15 Agustus 1949 tentang pencabutan kembali Keputusan Menteri Negara Hamengku Buwono IX No. P/10, disertai surat pengantar.
N.B.: Kertas sobek
Pertinggal
2 lembar
268. Presiden RI: Surat Keputusan No. 47/A/49 tgl. 27 Oktober 1949 tentang pembetulan daftar lampiran Surat Keputusan tgl. 16 September 1949 No. 28/A/49.
N.B.: Lampiran tidak ada
Konsep
1 lembar

269. Presiden RI: Surat Keputusan No. 77/A/49 tgl. 1 Desember 1949 tentang pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan No. 104/A/AP/49 tgl. 15 November 1949.
Asli
2 lembar
270. Pemerintah RI Jogjakarta: Maklumat tgl. 19 September 1945 tentang protes atas Maklumat Saiko Sikikan No. 5 tgl. 18 September 1945 serta keterangannya.
Konsep
1 lembar
271. Menteri Keuangan: Surat Edaran No. B.O.P.1-1-2 tgl. 22 Februari 1947 tentang pembentukan Bagian Urusan Perjalanan.
Salinan
2 lembar
272. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Setneg: Surat tgl. 30 Juni 1947 tentang pembetulan kekeliruan lampiran Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 29/BP 3/47 U yaitu perkataan pasal 4 di dalam pasal 7 ayat 1 yang seharusnya pasal 5, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
273. Kementerian Kemakmuran: Pengumuman No. 1 tgl. 15 Januari 1948 tentang pembagian barang-barang alat tulis-menulis buat kantor, bahan pakaian, obat-obatan dan alat-alat mobil dan lain-lain khusus untuk instansi-instansi pemerintah.
Stensilan
1 lembar
274. Presiden RI: Pengumuman No. 1 tgl. 29 Januari 1948 tentang penundaan pengumuman kabinet baru.
Konsep
5 lembar
275. Kepala Staf Angkatan Perang: Surat Keputusan No. A/166/1948 tgl. 21 April 1948 tentang tugas kewajiban Kantor Koordinasi Perhubungan Angkatan Perang.
Salinan
2 lembar
276. Wakil Sekretaris Negara kepada Menteri Pertahanan: Surat tgl. 13 Mei 1948 tentang pembetulan Penetapan Presiden RI No. 14 tahun 1948, disertai lampiran.
Pertinggal
1 sampul
277. Surat-surat tgl. 15 Maret 1948-22 Mei 1948 tentang permintaan tanda tangan Presiden untuk Penetapan Presiden.
Asli
6 lembar

278. Kementerian Kemakmuran: Pengumuman No. 5 tgl. 11 Juni 1948 tentang permohonan bantuan atau sokongan dari berbagai-bagai badan resmi dan tidak resmi kepada Kementerian Kemakmuran.
Stensilan
3 lembar
279. Dewan Pengawas Kantor Alat Pembayaran Luar Negeri: Surat Keputusan tgl. 15 November 1948 tentang perpanjangan waktu pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 5 dan Undang-undang No. 28 tahun 1948, disertai lampiran.
Konsep
1 sampul
280. Presiden RI: Instruksi No. 5/1948 tgl. 1 Desember 1948 tentang koordinasi jawatan-jawatan daerah.
Konsep
1 lembar
281. Menteri Negara RI Koordinator Keamanan: Maklumat No. S/4 tgl. 14 Juni 1949 tentang instruksi untuk alat-alat Pemerintah RI di masa peralihan.
Salinan
2 lembar
282. Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kutaraja: Instruksi tgl. 20 Agustus 1949 tentang hak, tugas dan kewajiban dari Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kutaraja.
Stensilan
1 lembar
283. Presiden RI: Maklumat No. 1 bulan Juni 1946 tentang Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.
Salinan
3 lembar
284. Presiden RI: Maklumat No. 2 tgl. 2 Oktober 1946 tentang pencabutan Maklumat Presiden No. 1 tahun 1946.
Konsep
1 lembar
285. Presiden RI: Makkumat No. 3 tgl. 2 Oktober 1946 tentang pengesahan Susunan Kabinet yang diajukan oleh Soetan Sjahrir.
Konsep
7 lembar
286. Presiden RI: Maklumat-maklumat No. 1 tahun 1946 dan No. 6 tahun 1947 tgl. 29 Juni 1946 dan 27 Juni 1947 tentang pengambilan kekuasaan Pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu oleh Presiden RI.
Duplikat
9 lembar

287. Presiden RI: Maklumat No. 7 tgl. 3 Juli 1947 tentang pencabutan Maklumat Presiden No. 6 tahun 1947 dan pengesahan Susunan Kabinet yang telah diajukan oleh Mr. Amir Sjarifoeddin, Dr. A.K. Gani dan Drs. Setyadjit.
Salinan
3 lembar
288. Presiden RI: Maklumat-maklumat No. 4 dan No. 5 tgl. 3 Maret 1948 dan April 1948 tentang tanah conversie dalam Daerah Surakarta dan Jogjakarta.
Konsep
4 lembar
289. Presiden RI dan Komite Nasional Pusat: Maklumat tgl. 14 Desember 1949 tentang pengakuan Kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat atas seluruh Daerah Indonesia.
Stensilan
4 lembar
290. Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang kepada Kementerian Pertahanan dan Pucuk Pimpinan Angkatan Perang: Surat Perintah No. 2/PT/48 tgl. 28 Januari 1948 tentang pengadaan/pembentukan panitia Hijrah.
Konsep, salinan
5 lembar
291. Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Surat Perintah No. 15/PT/48 tgl. 18 Maret 1948 tentang pemberian usul cara menyelenggarakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang RI dari Panglima Besar Angkatan Perang.
Konsep
1 lembar
292. Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang Besar Angkatan Perang Mobil: Surat Perintah No. 8/PT/48 tgl. 19 April 1948 tentang usul mengenai rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Parang Perang RI.
Konsep
1 lembar
293. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI: Order Harian tentang mengutamakan jiwa patriot dan jiwa militer dalam rangka menyempurnakan ABRI.
Konsep
3 lembar
294. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Panglima Divisi I Kolonel Soekono: Surat Perintah No. 15/PT/48 tgl. 20 November 1948 tentang perintah untuk menghadap di Presidenan Jogjakarta.
Konsep
1 lembar
295. Wakil Setneg kepada Kementerian Penerangan: Surat tgl. 28 Mei 1948 tentang permohonan untuk dapat diumumkan Penetapan Bersama Menteri Pembangunan dan Pemuda dan Menteri Pertahanan No. 2642/I via Pers dan Radio, disertai lampiran.
Pertinggal
4 lembar

296. Menteri Kemakmuran: Surat-surat Penetapan No. 1571/T.O. dan No. 6414/T.O. tgl. 20 Maret 1948 dan 24 September 1948 tentang pembagian daerah-daerah Jawatan Perikanan di Jawa dan Madura.
- Salinan
2 lembar
297. Menteri Kemakmuran: Surat Penetapan No. 8277/T.O. tgl. 7 Desember 1948 tentang perubahan dalam Penetapan No. 4073/T.O. tgl. 28 Juni 1948.
- Salinan
2 lembar
298. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat-surat Penetapan No. 3214//IIA dan No. K 720/I tgl. 7 Juni 1948 dan 25 Agustus 1948 tentang pembentukan dan pembubaran Panitia Interdependental transmigrasi.
- Salinan
3 lembar
299. Menteri Pertahanan: Surat Penetapan No. J/148/1948 tgl. 5 April 1948 tentang pembentukan Komisi Pemindahan Tenaga.
- Salinan
5 lembar
300. Menteri Kehakiman: Surat Penetapan No. M 97 tgl. 18 Desember 1947 tentang Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian dan Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura.
- Salinan
1 lembar
301. Menteri Keuangan: Surat Penetapan No. TNU 1/1/34 tgl. 11 Agustus 1949 tentang pembentukan Jawatan keuangan Komisariat Pemerintah untuk Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan di tempat kedudukan Komisaris Pemerintah Daerah tersebut.
- Salinan
1 lembar
302. Menteri Perburuhan dan Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat tentang penerimaan penyerahan pelaksanaan penyelesaian urusan-urusan Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang dibubarkan oleh ketiga kementerian tersebut, disertai lampiran dan surat pengantar.
- Tembusa
1 sampul
303. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 1186/D tgl. 1 Maret 1947 tentang perpindahan tempat kedudukan Kantor Inspektur Sekolah Guru dan Sekolah Rakyat untuk daerah Jawa Tengah dari Madiun ke Jogjakarta.
- Salinan
1 lembar

304. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 225/BHG.A tgl. 14 Maret 1947 tentang tugas dan kewajiban Inspektur Olah Raga, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
305. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 3973/A tgl. 15 Mei 1948 tentang pembentukan Dewan Penimbang Pengangkatan Guru Besar dan Pengangkatan sebagai Ketua Dewan Penimbang, Anggota Dewan Penimbang dan sebagai Pembantu Administratif dari Pimpinan Dewan Penimbang.
- Salinan
1 lembar
306. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 57/S tgl. 4 Agustus 1949 tentang pembatalan Putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan No. 6736/A dan susunan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salinan
8 lembar
307. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 56/C tgl. 8 September 1949 tentang perubahan Surat-surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan No. 7660/D tgl. 27 Desember 1947 dan No. 7363/E tgl. 27 Agustus 1948, disertai lampiran.
- Salinan
4 lembar
308. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 218/A tgl. 29 September 1949 tentang pembentukan Panitia Pembantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Pemuda dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Panitia tersebut.
- Salinan
2 lembar
309. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 212/S tgl. 10 Oktober 1949 tentang pembentukan Panitia Perguruan Tinggi RIS yaitu suatu badan pembantu Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salinan
2 lembar
310. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 289/A tgl. 20 Oktober 1949 tentang peraturan pemakaian sesuatu gedung yang langsung diurus/dikuasai/diawasi oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salinan
2 lembar
311. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 281/A tgl. 25 Oktober 1949 tentang perubahan pasal 2 dari Surat Keputusan dari Menteri PPK tgl. 19 Juli 1948 No. 6123/A bagian A (1) dan (2) bagian D (1) dan bagian E (1).

Salinan
1 lembar

312. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 367/C tgl. 8 September 1949 tentang kepindahan tempat kedudukan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dari Solo ke Jogjakarta.

Salinan
4 lembar

313. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 3334/Kab tgl. 1 Juni 1948 tentang pedoman cara menetapkan besarnya kerugian untuk pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan Pertanian Negara dalam Daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta.

Stensilan
1 lembar

314. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 3840/Kab tgl. 21 Juni 1948 tentang pembentukan Panitia Penyokong dan Pertimbangan bagi pelaksanaan rancangan produksi 3 tahun dan pengangkatan anggota-anggota panitia tersebut.

Salinan
2 lembar

315. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 5284/Kab tgl. 5 Agustus 1948 tentang Susunan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kemakmuran, disertai lampiran.

Salinan
6 lembar

316. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 3831/Kab tgl. 3 September 1948 tentang pembentukan suatu komisi yang berkewajiban mengadakan peninjauan keadaan dan sifat perekonomian masyarakat Indonesia, penyusunan ketua dan anggota komisi tersebut.

Salinan
2 lembar

317. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 6954/T.O. tgl. 15 Oktober 1948 tentang tetap termasuknya (sementara) Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing (PMBA) dalam Kantor Pusat Kementerian Kemakmuran dan mengenai tugas kewajiban Urusan PMBA.

Salinan
1 lembar

318. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 65/T.O. tgl. 25 Oktober 1948 tentang ditariknya Bagian Pengawasan Milik Bangsa Asing dari Jawatan Pengumpulan, Penyimpanan dan Pembagian ke bawah Pimpinan Kantor Kementerian Kemakmuran.

Salinan
2 lembar

319. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 5/Peg/3 tgl. 30 April 1948 tentang Susunan Kantor Pusat kementerian Kesehatan Jogjakarta.

- Salinan
4 lembar
320. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 20/Peg/J tgl. 29 Juni 1948 tentang pembagian tugas di lingkungan karesidenan Semarang, Karesidenan Surakarta dan Karesidenan Banyumas.
- Salinan
2 lembar
321. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 720/Peg/10/K tgl. 14 Desember 1949 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Kementerian Kesehatan di daerah Jakarta.
- Salinan
1 lembar
322. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. TNU 1/21/9 tgl. 12 September 1949 tentang pembentukan Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.
- Salinan
2 lembar
323. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. 4.43/1/10 tgl. 14 September 1949 tentang pembentukan Kantor Perbendaharaan di Jakarta.
- Salinan
1 lembar
324. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan tgl. 22 Juni 1948 tentang penyerahan kekuasaan dan kewajiban penyelenggaraan urusan-urusan penempatan tenaga yang berasal dari ketentaraan dan badan-badan perjuangan atau akibat rasionalisasi dan pemberian pekerjaan atau pendidikan dari Kementerian Pembangunan dan Pemuda kepada Jawatan Perusahaan.
- Salinan
2 lembar
325. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. A/154/1948 tgl. 13 April 1948 tentang penghapusan Bagian Politik Kementerian Pertahanan, disertai surat pengantar.
- Salinan
2 lembar
326. Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan No. S9/2/7 tgl. 14 September 1949 tentang pembubaran organisasi yang terdiri dari penggabungan Pelayaran Nasional Indonesia, Penumpukan dan Angkutan dan Badan Pengangkutan Laut.
- Salinan
1 lembar
327. Menteri Perburuhan dan Sosial: Surat Keputusan No. 2/K.U.2/5 tgl. 21 September 1949 tentang didirikan Jawatan Sosial Kementerian Perburuhan dan Sosial.
- Salinan
1 lembar

328. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 65/II/MTR tgl. 25 September 1948 dan 18 Oktober 1948 tentang pencabutan Surat Penetapan Menteri Negara Urusan Makanan No. 9/S/1947 tgl. 10 September 1947, disertai lampiran dan surat pengantar.
- Salinan
3 lembar
329. Menteri Urusan Pegawai: Surat Keputusan No. 9/S/1949 tgl. 23 Desember 1949 tentang pengubahan peraturan Menteri Urusan Pegawai No. 3/S/1949 tgl. 30 Juli 1949.
- Salinan
1 lembar
330. Menteri Negara RI Koordinator Keamanan: Surat Keputusan No. P/15 tgl. 29 Juni 1949 tentang dasar-dasar Pemerintah Daerah untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dan pembekuan Peraturan Negara mengenai Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Jogjakarta yang bertentangan dengan surat keputusan ini.
- Salinan
5 lembar
331. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/1 tgl. 27 Mei 1949 tentang pembentukan Panitia Penerimaan Penyerahan Kembali Jawatan-Jawatan berkedudukan di Jogjakarta dan pengangkatan Ketua serta Anggota Panitia tersebut.
- Salinan
4 lembar
332. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/2 tgl. 30 Mei 1949 tentang penyerahan Pimpinan Kantor Urusan Pegawai Negeri kepada Menteri Perburuahan dan Sosial untuk sementara sebelum ada keputusan Dewan Menteri RI.
- Salinan
4 lembar
333. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/4 tgl. 31 Mei 1949 tentang tugas kewajiban darurat dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, disertai lampiran.
Nb. Lampiran tidak lengkap
- Salinan
4 lembar
334. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/8 tgl. 1 Juni 1949 tentang pembentukan Panitia Penyambutan Kedatangan Pemerintah RI (Panitia Penyambutan) dengan Kedudukan di Jogjakarta dan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Penyambutan tersebut.
- Salinan
5 lembar
335. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/12 tgl. 7 Juni 1949 tentang pembentukan Kantor Urusan Barang-barang RI (KUBRI) di Jogjakarta di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran dan pengangkatan Ir. Gunung Iskandar sebagai Pimpinan KUBRI.

Salinan
4 lembar

C. PENGELOLAAN DANA DAN KEUANGAN NEGARA

336. Undang-undang No. 2 tgl. 16 Maret 1946 tentang batas waktu piutang pajak berakhir.
Konsep
4 lembar
337. Undang-undang No. 4 tgl. 29 April 1946 tentang pinjaman negara dan Undang-undang Perubahan Undang-undang Pinjaman Nasional 1946 tgl. 11 Juli 1946.
Konsep
9 lembar
338. Undang-undang No. 4 dan 5 tgl. 10 April 1946 dan 10 Mei 1946 tentang penetapan tarif pajak pendapatan 1946/1947, tambahan pokok pajak dan tarif pajak upah, disertai penjelasannya.
N.B.: Arsip rusak berat
Konsep
5 lembar
339. Undang-undang tgl. 12 Juni 1946 tentang perubahan Undang-undang No. 4 tahun 1946 mengenai pinjaman nasional.
Konsep
1 lembar
340. Undang-undang No. 10 tgl. 22 Juni 1946 tentang pembawaan uang dari daerah ke daerah lain di Jawa dan Madura.
Konsep
3 lembar
341. Undang-undang No. 11 tgl. 23 Juni 1946 tentang perubahan aturan Bea Materai 1921.
Konsep
1 lembar
342. Undang-undang No. 15 tgl. 21 September 1946 tentang penetapan tambahan pokok Pajak Bumi untuk tahun pajak 1946/1947.
Konsep
3 lembar
343. Setneg kepada Kementerian Pertahanan: Undang-undang No. 17 tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang RI (I) dan Undang-undang No. 18 tahun 1946 tgl. 1 Oktober 1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam Bank, disertai surat pengantar.
Pertinggal
1 sampul
344. Undang-undang No. 19 tgl. 25 Oktober 1946 tentang pengeluaran Uang Republik Indonesia (II).
Konsep
9 lembar

345. Undang-undang No. 21 tgl. 9 November 1946 tentang penurunan Cukai Tembakau.
Konsep
1 lembar
346. Undang-undang No. 3 tgl. 12 Februari 1947 tentang bea masuk dan bea keluar, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
347. Undang-undang No. 10 tgl. 5 Mei 1947 tentang peraturan aturan bea materai 1921, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
348. Undang-undang No. 11 tgl. 5 Mei 1947 tentang perubahan tarip pajak potong, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
349. Undang-undang No. 12 tgl. 5 Mei 1947 tentang pajak radio, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
350. Undang-undang No. 13 tgl. 5 Mei 1947 tentang penetapan tarip pajak pendapatan, pajak upah dan tambahan pokok pajak tahun 1947/1948, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
351. Undang-undang No. 14 tgl. 14 Mei 1947 tentang pajak pembangunan I, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
352. Undang-undang No. 19 tgl. 12 Juni 1947 tentang mengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946 mengenai pembawaan uang dan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 10 tgl. 29 Oktober 1946.
Konsep
2 lembar
353. Undang-undang No. 30 tgl. 30 Agustus 1947 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 mengenai Promes Negara.
Konsep
1 sampul
354. Undang-undang No. 28 tgl. 30 Agustus 1947 tentang cukai tembakau II.
Konsep
1 sampul
355. Undang-undang No. 29 tgl. 30 Agustus 1947 tentang cukai minuman keras, disertai penjelasannya.

- Konsep
1 sampul
356. Undang-undang No. 38 tgl. 28 November 1947 tentang Undian Uang Negara, disertai penjelasannya.
- Konsep
1 sampul
357. Rencana Undang-undang tahun 1948 tentang Undang-undang Pensiun Pegawai Negara tahun 1948, disertai penjelasannya.
- Konsep
1 sampul
358. Rancangan Undang-undang tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan kepada Menteri Keuangan mengadakan peraturan-peraturan guna mempergunakan dan mempercepat prosedur penetapan dan pemungutan pajak-pajak, disertai penjelasannya.
N.B.: Rusak ringan
- Konsep
5 lembar
359. Undang-undang tahun 1948 tentang perubahan Undang-undang Uang Berat Barang 1927 (Goederengeld Ordonnantie 1927).
- Konsep
4 lembar
360. Undang-undang No. 14 dan No. 15 tgl. 31 Mei 1948 tentang bea masuk dan penetapan barang-barang yang dikenakan bea keluar 30% dari barangnya.
- Duplikat
1 sampul
361. Undang-undang No. 20 tgl. 12 Juni 1948 tentang perubahan dan tambahan pajak pembangunan.
- Duplikat dan konsep
5 lembar
362. Undang-undang No. 21 tgl. 12 Juni 1948 tentang Undang-undang tambahan dari undang-undang pajak radio.
- Duplikat
7 lembar
363. Undang-undang No. 25 tgl. 13 Agustus 1948 tentang penetapan tarif pajak pendapatan tahun 1948/1949 dan tambahan pokok pajak.
- Duplikat dan konsep
1 sampul
364. Undang-undang No. 17 dan No. 26 tgl. 31 Mei 1948 dan 13 Agustus 1948 tentang perubahan Undang-undang pajak pendapatan 1932.
- Duplikat
1 lembar
365. Undang-undang No. 28 tgl. 2 September 1948 tentang undang-undang alat pembayaran luar negeri.

- Stensilan
1 sampul
366. Undang-undang No. 32 tgl. 30 Oktober 1948 tentang peredaran uang dengan perantaraan Bank.
- Duplikat
7 lembar
367. Undang-undang No. 33 tgl. 9 November 1948 tentang uang berat barang 1948.
- Duplikat
3 lembar
368. Undang-undang No. 34 tgl. 11 Desember 1948 tentang perubahan daerah pabean.
- Duplikat
2 lembar
369. Undang-undang No. 35 tgl. 11 Desember 1948 tentang penurunan beberapa bea masuk.
- Duplikat
6 lembar
370. Undang-undang No. 1 tgl. 28 September 1949 tentang penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan.
- Stensilan
3 lembar
371. Undang-undang No. 3 tgl. 30 September 1949 tentang tarif pajak potong tahun 1949, disertai penjelasannya.
- Pertinggal
1 lembar
372. Undang-undang No. 4 tgl. 30 September 1949 tentang perubahan aturan bea materai 1921.
- Pertinggal
1 sampul
373. Undang-undang No. 5 tgl. 30 September 1949 tentang penetapan tarif pajak pendapatan dan tambahan pokok pajak dan tarif pajak upah untuk tahun 1949.
- Pertinggal
6 lembar
374. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 1 tgl. 22 Februari 1946 tentang aturan Bank Rakyat Indonesia.
- Konsep
2 lembar
375. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 tgl. 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia.
- Salinan
1 sampul

376. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 3 tgl. 5 Juli 1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank, disertai penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya (hanya pasal 10).
Konsep
1 sampul
377. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 6 tgl. 5 Agustus 1946 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1946.
Konsep
3 lembar
378. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 10 tgl. 29 Oktober 1946 tentang tidak berlakunya lagi mata uang lain selain Uang Republik Indonesia (ORI).
Konsep
7 lembar
379. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 1 tgl. 6 Januari 1947 tentang bea masuk dan bea keluar.
Konsep
3 lembar
380. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 15 tahun 1947 tentang pembentukan bagian perbendaharaan pada tiap-tiap Kementerian dan Pengawasan Keuangan Negara.
Konsep
8 lembar
381. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 14 tgl. 10 Juni 1947 tentang pemberian tunjangan kepada bekas pegawai negeri serta janda dan anak piatunya, disertai penjelasannya.
Konsep
1 sampul
382. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 20 tgl. 26 Juli 1947 tentang promes negara, disertai penjelasannya.
Asli
1 sampul
383. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 14 tgl. 23 Juni 1948 tentang peraturan bank-bank pemerintah dalam peredaran uang berhubungan dengan adanya uang palsu.
Konsep
1 sampul
384. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 21 tahun 1948 tentang pencabutan peraturan mengenai pengangkatan dan gaji pegawai negeri di Jawa (Osamu Seizin No. 13 tgl. 1 Juli 1943), aturan pengangkatan dan gaji pegawai bantuan (Osamu seizin No. 122 tgl. 12 Juli 1943), peraturan mengenai gaji pekerja negeri pendudukan di Jawa (tgl. 1 September 1943) dan penetapan peraturan gaji pegawai yang baru.
N.B. tidak lengkap

- Konsep
6 lembar
385. Pemerintah RI Jogjakarta: Rencana Peraturan No. 23 tahun 1948 tentang peraturan penyesuaian (inpassing) disertai penjelasannya.
- Konsep
1 sampul
386. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 19 tgl. 26 Agustus 1948 tentang surat tanda penerimaan uang dikeluarkan oleh kepala daerah.
N.B.: Rusak ringan
- Konsep
2 lembar
387. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 25 tgl. 21 September 1948 tentang pinjaman negara dalam mengeluarkan surat tanda hutang negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Militairisasi Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon tgl. 21 September 1948.
- Konsep, stensilan
2 lembar
388. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 34 tgl. 29 September 1948 tentang peredaran uang dengan perantaraan bank.
- Salinan
7 lembar
389. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan tahun 1948 tentang peraturan untuk mengeluarkan materai tempel dan materai upah yang berbentuk baru.
- Konsep
2 lembar
390. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 17 tgl. 11 November 1949 tentang perubahan PGP-1948.
- Salinan, stensilan
2 lembar
391. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 21 tgl. 29 November 1949 tentang peraturan gaji militer 1949.
- Stensilan
5 lembar
392. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 34 tgl. 25 Desember 1949 tentang pemberian pensiun kepada pegawai negeri.
- Konsep
7 lembar
393. Presiden RI: Peraturan No. 2 tgl. 16 Agustus 1946 tentang pemberian perubahan peraturan pemberian tunjangan kepada bekas menteri negara, disertai penjelasannya.
- Konsep
1 sampul

394. Presiden RI: Peraturan No. 4 tgl. 30 November 1946 tentang beberapa perubahan peraturan pemberian tunjangan kepada menteri negara, disertai penjelasannya.
Konsep
1 sampul
395. Presiden RI: Peraturan No. 5 tgl. 28 Desember 1946 tentang pencabutan Penetapan Pemerintah No. 1/O.P. tahun 1945 dan penetapan peraturan mengenai gaji pokok dan ongkos representasi untuk beberapa pejabat.
Konsep
4 lembar
396. Presiden RI: Peraturan No. 1 tgl. 24 Oktober 1949 tentang penyerahan hak kekuasaan untuk memberikan kenaikan gaji tertentu kepada pegawai negeri Republik Indonesia.
Konsep
5 lembar
397. Presiden RI: Peraturan No. 2 tgl. 19 Desember 1949 tentang peraturan gaji jabatan-jabatan di luar PGP-1948.
N.B.: Rusak ringan
Stensilan
8 lembar
398. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1/O.P. tgl. 26 Oktober 1945 tentang penggajian pejabat tinggi.
N.B.: Rusak ringan
Salinan
4 lembar
399. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 2/O.P. tgl. 27 Oktober 1945 tentang Pembentukan Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.
Salinan
1 lembar
400. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 2/O.P. tgl. 7 November 1945 tentang urusan bea (in-en uitvoerrechten) masuk Departemen Keuangan Bahagian Pajak.
Salinan
1 lembar
401. Presiden RI: Penetapan No. 1 tgl. 12 Februari 1947 tentang pembubaran Panitia Perancang Gaji Pegawai Negeri, pemberian kuasa kepada Dewan Menteri untuk membentuk panitia baru.
Asli
2 lembar
402. Presiden RI: Penetapan No. 3 tgl. 12 April 1948 tentang pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, disertai lampiran.
Asli dan konsep
4 lembar

403. Wakil Perdana Menteri RI: Ketetapan No. 2/KU/WPM tgl. 22 Oktober 1949 pengeluaran Uang Republik Indonesia Baru dari R. 0,10; R. 0,50; R. 1,-; R. 10,- dan R 100,- disertai penjelasannya.
- Salinan
3 lembar
404. Presiden RI: Surat Keputusan No. 49/A/49 bulan November 1949 tentang pemberian uang kepada keluarga Hamid Algadrie selama Hamid Algadrie berpergian ke luar negeri untuk mengikuti Konperensi Meja Bundar.
- Konsep
1 lembar
405. Presiden RI: Surat Keputusan No. 50/A/49 bulan November 1949 tentang pemberian uang kerugian kepada Keluarga Kasman Singodimedjo selama Mr. Kasman Singodimedjo berpergian keluar negeri untuk mempelajari hukum militer dan pengadilan militer di Eropa dan India.
- Konsep
1 lembar
406. Presiden RI: Surat Keputusan No. 79/A/49 tgl. 7 Desember 1949 tentang pemberian kenaikan gaji untuk Mr. A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), disertai lampiran.
- Petikan
2 lembar
407. Presiden RI: Surat Keputusan No. 88/A/49 tgl. 10 Desember 1949 tentang penyesuaian gaji menurut PGP 1948 terhadap Mr. R. Tirtawinata (Jaksa Agung), Mr. M. Soedardjat (Jaksa Agung Muda), disertai lampiran.
- Konsep
9 lembar
408. Pemerintah RI Jogjakarta: Maklumat tgl. 2 Oktober 1945 tentang tidak berlakunya uang Nica.
- Konsep
2 lembar
409. Pemerintah RI: Maklumat No. 1/10 tgl. 3 Oktober 1945 tentang macam-macam uang sebagai alat pembayaran di daerah Jawa.
- Konsep
3 lembar
410. Menteri Keuangan: Peraturan No. Ss/1/36 tgl. 29 Oktober 1946 tentang pembatasan pengambilan kembali simpanan uang di bank.
- Salinan
3 lembar
411. Menteri yang diserahi Urusan Pegawai Negeri: Peraturan No. 2/S/1949 tgl. 15 Juli 1949 tentang pemberian tunjangan kepada ahli waris pegawai negeri yang meninggal dunia karena aksi Militer Belanda.
- Salinan
1 lembar

412. Menteri Keuangan Thesaurier Jenderal Muda: Peraturan tgl. 10 Oktober 1949 tentang pembayaran uang lembur.
Stensilan
1 lembar
413. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V di Jawa: Peraturan No. 10/G.M. tgl. 29 Agustus 1949 tentang peraturan pemberantasan kabar bohong, disertai surat pengantar.
Fisik arsip tidak ada
414. Pemerintah Daerah Militer Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V di Jawa: Peraturan No. 11/G.M. tgl. 29 Agustus 1949 tentang perubahan tarif pajak kendaraan dan yang penggantian tanda pajak.
Fisik arsip tidak ada
415. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 9080/C tgl. 20 Oktober 1948 tentang perubahan besar tunjangan bagi anggota penguji pemeriksa dan pengawas ujian penghabis CPU dari R. 5,- menjadi R. 10,-.
Salinan
5 lembar
416. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 10172/A tgl. 23 November 1948 tentang bantuan dana sebesar R. 10.000,- kepada Pengurus Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Jogjakarta yang menyelenggarakan Peringatan Hari Mahasiswa Internasional.
Salinan
1 lembar
417. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 121/A tgl. 7 September 1949 tentang penghentian segala uang tunjangan bagi guru-guru PBH kelurahan, pemerintah desa, pemimpin kecamatan dan penghentian uang sokongan (subsidi) kepada badan-badan resmi dan partikular yang mendirikan usaha pemberantas buta huruf PBH.
Turunan
1 lembar
418. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 72/B tgl. 13 September 1949 tentang penyediaan dana untuk Panitia Besar Kongres Pendidikan Antara Indonesia sebesar R. 2000,-.
Salinan
1 lembar
419. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 91/B tgl. 21 September 1949 tentang penyediaan dana untuk penyelenggaraan hubungan persaudaraan dengan daerah-daerah diluar RI sebesar F. 3000,- sebulan.
Salinan
1 lembar

420. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 130/B tgl. 29 September 1949 tentang pemberian tunjangan belajar kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan partikulir yang bersubsidi, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
421. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 277/A tgl. 31 Oktober 1949 tentang pemberian bantuan dana kepada Panitia Penyelenggara Children's Week sebesar f. 500,-.
- Salinan
1 lembar
422. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 12 November 1949 tentang pemberian bantuan dana kepada Panitia Konperensi Tani sebesar f. 250,-.
- Salinan
1 lembar
423. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 346/B tgl. 1 Desember 1949 tentang pemberian pinjaman uang belajar kepada pelajar/mahasiswa, disertai lampiran.
- Salinan
4 lembar
424. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. Ss-1-35 tgl. 29 Oktober 1946 tentang berlakunya Uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah pada tgl. 30 Oktober 1946 jam 24.00.
- Salinan
3 lembar
425. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. TNU 1-43-4 tgl. 24 November 1949 tentang penggunaan hasil pencetakan uang darurat di Ampalu Sumatera Barat guna keperluan anggaran sipil dan penunjukan Pemerintah/Gubernur Militer Sumatera Tengah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Salinan
1 lembar
426. Menteri Keuangan: Surat-surat Keputusan No. IV/7 A tgl. 18 Agustus 1949, No. I/93 A tgl. 25 November 1949 tentang membuka kredit anggaran pada Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.
- Salinan
2 lembar
427. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. P.O. 6/1/18 tgl. 29 November 1949 tentang pemberian tunjangan kepada Dr. A. Tjokronegoro sebesar R. 100,-.
- Salinan
1 lembar
428. Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan No. PKL I/435/L.47 tgl. 1 Desember 1947 tentang permintaan pembayaran gaji kepada Pembantu Bendahara daerah Jogjakarta, disertai lampiran.
- Salinan

2 lembar

429. Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan No. SK/115/U.P. tgl. 6 Desember 1949 tentang kenaikan gaji, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

430. Menteri Perburuhan dan Sosial: Surat Keputusan No. 1K/1949 tgl. 3 Juli 1949 tentang peraturan sementara pembayaran gaji pegawai negeri.

Salinan, stensilan
4 lembar

431. Menteri Urusan Pegawai: Surat Keputusan No. 3/S/1949 tgl. 30 Juli 1949 tentang peraturan sementara pembayaran gaji pegawai negeri.

Salinan
1 lembar

432. Menteri Urusan Pegawai: Surat Keputusan No. 2534/A tgl. 25 November 1949 tentang peraturan pemberian tunjangan kepada ahli waris pegawai negeri yang meninggal dunia.

Salinan
6 lembar

433. Menteri Negara RI Urusan Koordinator Keamanan: Putusan No. P/20 tgl. 3 Juli 1949 tentang pemberian kuasa kepada Menteri Perburuhan dan Sosial untuk mengatur dan mengurus pemberian tunjangan kepada para pegawai RI selama keadaan keuangan negara belum mengizinkan membayar gaji kepada para pegawai RI menurut peraturan-peraturan negara.

Turunan
1 lembar

434. Menteri Negara Urusan Makanan: Surat Keputusan No. 12/S/47 tgl. 31 Desember 1947 tentang pengeluaran uang dari mata anggaran 1.5.33 dari Kas Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (DPPBM) Pusat.

Salinan
1 lembar

435. Menteri Keuangan: Instruksi No. 2 tgl. 17 Desember 1946 tentang permintaan kredit anggaran umumnya untuk pembelian barang-barang guna kepentingan negara, disertai lampiran.

Salinan
4 lembar

436. Menteri Keuangan: Maklumat No. 19 tgl. 27 November 1946 tentang pembayaran hutang piutang negara sebelum Uang Republik Indonesia berlaku.

Salinan
5 lembar

437. Menteri Keuangan: Maklumat No. 20 tgl. 29 November 1946 tentang pembayaran uang kurnia dan lainnya yang berhubungan dengan kematian, pemberhentian atau kelepasan terjadi sesudah uang Republik Indonesia berlaku.

Salinan

- 4 lembar
438. Menteri Keuangan: Maklumat No. 21 tgl. 1 Desember 1946 tentang pemberian tunjangan kepada bekas penerima pensiun atau onderstan daerah otonom.
Salinan
2 lembar
439. Menteri Keuangan: Maklumat No. S/1 tgl. 27 Mei 1949 tentang pengangkatan komisi anggaran belanja.
Stensilan
1 lembar
440. Menteri Perhubungan: Pengumuman No. 4/49 tgl. 12 September 1949 tentang cara membayar ongkos bagi anggota ketentaraan.
Salinan
1 lembar
441. Badan Hotel Negara dan Tourisme: Pengumuman tgl. 25 Oktober 1948 tentang biaya hotel.
N.B.: Kertas rusak
Salinan
2 lembar
442. Menteri Koordinator Keamanan, Menteri yang disertai memimpin Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan a.i.: Surat Edaran Bersama No. 30/K tgl. 8 Juli 1949 tentang uang kehormatan Anggota BPKNIP.
Tembusan, salinan
9 lembar
443. Menteri Keuangan: Surat Edaran No. O.P. 18-8-8 tgl. 16 Desember 1946 tentang ongkos jalan.
Salinan
1 lembar
444. Kementerian Keuangan Penjabatan Keuangan Jogjakarta: Surat Edaran No. 11/69/20 tgl. 24 Desember 1947 tentang pembayaran uang lembur kepada pegawai negeri.
Fisik arsip tidak ada
445. Kementerian Keuangan: Surat-surat Edaran No. 1/X tgl. 17 Mei 1949 dan No. 3/X tgl. 19 Mei 1949 tentang sumbangan bahan-bahan guna menghimpun pengeluaran belanja pegawai, disertai lampiran.
Salinan
4 lembar
446. Kementerian Keuangan: Surat Edaran No. Tna 1/2/10 tgl. 8 Agustus 1949 tentang membangun kembali petunjuk-petunjuk mengenai keuangan dan harta benda negara serta tata usahanya, disertai lampiran, dan Surat Edaran No. B 9/17/18 tgl. 23 Desember 1949 tentang peraturan tentang mengadakan dan bentuk buku kas umum.
Salinan
12 lembar

447. Menteri Keuangan: Surat Edaran No. BUP 16-1-17 tgl. 13 Oktober 1949 tentang biaya perjalanan dinas.

Fisik arsip tidak ada

448. Menteri Keuangan: Surat Edaran No. TNKB 1-5-16 tgl. 22 Oktober 1948 tentang penukaran uang kas F (N.I. Court) dengan Uang Republik Indonesia.

Salinan
1 lembar

449. Menteri Keuangan: Surat Edaran No. KUPD 16-15-13 tgl. 15 Desember 1949 tentang ongkos perjalanan pegawai negeri yang dipanggil dari luar Daerah Istimewa Jogjakarta.

Salinan
1 lembar

450. Menteri Perhubungan dan Sosial: Surat Edaran No. 2 K/1949 tgl. 3 Juli 1949 tentang tunjangan di luar PGP 1948.

Salinan
1 lembar

451. Menteri Perhubungan dan Sosial: Surat Edaran No. 7/K.U.1/4 tgl. 29 Juli 1949 tentang peraturan pegawai yang berhak menerima tunjangan, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

452. Menteri Negara Koordinator Keamanan: Surat Edaran Bersama No. 30/K tgl. 8 Juli 1949 tentang tunjangan di luar PGP 1948.

Salinan
3 lembar

453. Kantor Urusan Pegawai Negeri: Surat Edaran No. 46-3-7 tgl. 14 September 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai 1948.

Salinan
5 lembar

454. Setneg kepada Suryocondro: Telegram No. 477/K-48 tgl. 23 Maret 1948 tentang uang harian penginapan Amansjah Makaroesoe PM2 dan Abdoellah Madani PM2 yang diutus Kementerian Agama ke Sumatera.

Konsep
1 lembar

455. Setneg kepada Suryocondro: Telegram tgl. 30 Maret 1948 tentang permintaan kredit pada Kementerian Keuangan untuk konsumsi Perundingan Kaliurang.

Pertinggal
1 lembar

456. Sorjotjondro kepada Sekperdmen: Telegram tgl. 16 Juli 1948 tentang tunjangan Ny. Dokter Haulusy.

Tembusan
1 lembar

457. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada semua Kementerian: Surat No. U.A.N. 1/1/1 tgl. 3 Juni 1949 tentang bahan-bahan pengeluaran negara.
Stensilan
1 sampul
458. B. Djojosoegardo: Pendahuluan Penjelasan Rencana Anggaran Transport Onderneming tgl. 17 Juni 1949, disertai lampiran.
Asli
8 lembar
459. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan: Surat tgl. 20 Juni 1949 tentang penetapan mata anggaran.
Stensilan
1 lembar
460. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada semua Kementerian: Surat No. T.N.a 1/2/10 tgl. 8 Agustus 1949 tentang membangun kembali petunjuk-petunjuk mengenai keuangan dan harta benda negara serta tata usahanya.
N.B.: Sobek
Stensilan
2 lembar
461. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada semua Kementerian: Surat No. T.N.a 1/3/24 tgl. 9 Agustus 1949 tentang rencana anggaran belanja dan penerimaan daerah-daerah di luar Daerah Istimewa Jogjakarta.
Stensilan
1 lembar
462. St. Rikumahu di Jailolo di Maluku Utara kepada Kepala Dinas Urusan Kepegawaian Umum: Surat tgl. 10 Agustus 1949 tentang permohonan tunjangan pensiun bagi janda Matheus Rikumahu (Ny. Liem Kiem Nio), disertai lampiran.
Tembusan
2 lembar
463. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada semua kementerian: Surat No. T.N.a 1/12/4 tgl. 12 September 1949 tentang sumbangan bahan-bahan anggaran belanja dan pendapatan dan permintaan kredit anggaran.
Stensilan
2 lembar
464. Kementerian Keuangan Kabag. Urusan Perjalanan kepada Setneg: Surat No. B.U.P 3-1-20 tgl. 25 Oktober 1949 tentang uang penggantian ongkos jalan untuk Dr. Wirjomodjojo dan Soeroto.
Asli
1 lembar
465. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada kementerian dan jawatan yang berdiri sendiri: Surat No. T.N.U. 1-33-13 tgl. 5 November 1949 tentang permohonan dikirimkan Rencana Peraturan Pengeluaran Anggaran Biaya Negara.

Stensilan
1 lembar

466. Kementerian Keuangan Thesaurie Jenderal Muda kepada semua kementerian dan jawatan-jawatan yang berdiri sendiri: Surat-surat tgl. 24 Oktober 1949-26 November 1949 tentang fonds supply untuk pegawai di luar Daerah Istimewa Jogjakarta.

Stensilan
3 lembar

467. Kementerian Keuangan Bagian Urusan Perjalanan kepada Setneg: Surat tgl. 26 November 1949 tentang persekot ongkos perjalanan Prof. Sarwono sebesar f. 110,- yang belum diperhitungkan, disertai lampiran.

Asli
2 lembar

468. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara kepada semua kementerian, jawatan kantor yang berdiri sendiri: Surat No. T.N.A 1-43-10 tgl. 28 November 1949 tentang Rencana Anggaran tahun 1950.

Stensilan
1 lembar

D. AGAMA

469. Undang-undang No. 22 tgl. 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Konsep dan duplikat
19 lembar

470. Menteri Agama: Surat-surat Keputusan No. 2 dan No. A-410/G-4 tgl. 21 Januari 1948 dan 30 Juli 1948 tentang Panitia Penyelidik Hukum Islam.

Tembusan, salinan
4 lembar

471. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram tgl. 19 Februari 1948 tentang kepindahan Pastur Kiswono ke Jogjakarta.

Asli
1 lembar

472. Amurad Zuhud kepada Bung Karno: Telegram tgl. 7 Agustus 1948 tentang kekuasaan Tuhan.

Fisik arsip tidak ada

473. Telegram-telegram tgl. 23 Maret 1948-16 Agustus 1948 tentang urusan keagamaan.

Pertinggal
16 lembar

474. Telegram-telegram tgl. 3 November 1948 dan 6 November 1948 tentang Sinode Godang HKBP di Tarutung.

Fisik arsip tidak ada

475. A. Soegijapranata S.J. di Apostolisch Vicariaat Semarang kepada Setneg, dll: Surat tgl. 15 September 1949 tentang pemberhentian dan pengangkatan A. Jajasepoetra S.J. sebagai Kepala Pastur-pastur di Ibukota RI dan Seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta.

Fisik arsip tidak ada

476. PB. Masyumi kepada Setneg: Surat No. 112/Sec/PB/49 tgl. 10 Oktober 1949 tentang jawaban atas pertanyaan Husain bin Ali di Tidore mengenai Hakim Islam, disertai lampiran.

Asli
2 lembar

E. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

477. Undang-undang tahun 1945 tentang mengupas berita Gunseikanbu No. 1

Fisik arsip tidak ada

478. Undang-undang No. 32 tgl. 22 September 1947 tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan negeri, disertai penjelasannya.

Konsep
6 lembar

479. Peraturan Pemerintah No. 44 tgl. 7 Oktober 1948 tentang Balai Pendidikan Ahli Hukum, disertai penjelasan.

Konsep
15 lembar

480. Rencana Peraturan Pemerintah No. 20 tgl. 16 November 1949 tentang perubahan tempat kedudukan Sekolah Tinggi Hukum termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1948.

Konsep
1 lembar

481. Penetapan Pemerintah No. 3/Oem tgl. 2 Juli 1946 tentang penambahan beberapa kata dalam pasal 5 No. 8 sub a dan b pada Putusan Kepala Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan No. 551/Bng.O.S.

Turunan
2 lembar

482. Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan: Peraturan tgl. 15 Maret 1947 tentang mengakhiri pelajaran di Sekolah Rakyat Negeri pada penghabisan tahun pelajaran 1946/1947 dan ujian masuk ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tahun pelajaran 1947/1948.

Fisik arsip tidak ada

483. Menteri Agama: Peraturan-peraturan No. 1/1948 dan No. 2/1948 tgl. 12 Januari 1948 dan 9 Februari 1948 tentang pemberian bantuan kepada mahasiswa dan perguruan agama, disertai surat pengantar.

Stensilan
6 lembar

484. Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan Bersama No. 3104/A1 tgl. 31 Mei 1948 tentang penggabungan Perguruan Tinggi Kedokteran, Fakultas Hukum dan Fakultas Kesustraan menjadi Gabungan Perguruan Tinggi Jakarta.
- Salinan
4 lembar
485. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat-surat Keputusan No. 1805/B dan 1826/B tgl. 3 April 1947 dan 5 April 1948 tentang peraturan ujian penghabisan sekolah-sekolah lanjutan tahun pelajaran 1946/1947, disertai lampiran dan surat pengantar.
- Salinan
11 lembar
486. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 638/B tgl. 24 Januari 1948 tentang pengadaan ujian negeri guna mencapai ijazah memegang Buku Bagian I dan Bagian II, disertai lampiran.
- Salinan
6 lembar
487. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat-surat Keputusan No. 5409/B tgl. 29 Juni 1948 tentang pembukaan kelas III peralihan Sekolah Dagang pada Sekolah Ekonomi Bersubsidi Daha di Kediri.
- Salinan
1 lembar
488. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat-surat Keputusan No. 6270/D tgl. 22 Juli 1948 tentang penambahan keputusan ke-3 dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 5266 a/D tgl. 25 Juni 1948 yaitu pengangkatan sebagai Anggota Pengurus Kongres Kebudayaan Indonesia di Magelang: M. Tabrani, Soeratno Sostroamidjojo dan R. Roedjito.
- Salinan
1 lembar
489. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 8856/B tgl. 12 Oktober 1948 tentang permulaan dan akhir tahun pelajaran 1948/1949 beserta liburan dan hari raya bagi sekolah-sekolah dalam tahun pelajaran 1948/1949, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
490. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 10572/D tgl. 6 Desember 1948 tentang pembentukan Panitia Persiapan Penyelenggaraan berdirinya Sekolah Musik di Jogjakarta.
- Salinan
5 lembar
491. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 120/A tgl. 3 September 1949 tentang pencabutan Surat Keputusan No. 6755/C tgl. 27 November 1947 dan mengenai pemberantasan buta huruf.
- Turunan
2 lembar

492. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 188/B tgl. 21 Oktober 1949 tentang permulaan dan akhir tahun pelajaran 1949/1950, liburan sekolah dan hari raya bagi sekolah-sekolah dalam tahun pelajaran 1949/1950, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
493. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 428/A tgl. 24 November 1949 tentang Peraturan Penyelenggaraan Masyarakat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.
- Salinan
2 lembar
494. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 423/A tgl. 24 November 1949 tentang Jawatan Pendidikan Masyarakat Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dan kursus lanjutan PBH.
- Salinan
1 lembar
495. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 32/Kebud tgl. 15 Desember 1949 tentang didirikannya Akademi Seni Rupa di kota Jogjakarta, disertai lampiran.
- Tindakan
5 lembar
496. Menteri Kemakmuran kepada Presiden: Surat tgl. 15 Oktober 1946 tentang Rencana Keputusan Menteri Kemakmuran mengenai Perguruan Tinggi Pertanian di Klaten dan Malang, disertai penjelasannya dan lampiran.
- Asli
7 lembar
497. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 3034/T.O. tgl. 19 Mei 1948 tentang penggabungan SPM Malang dan SPM Madiun di bawah pimpinan Kepala SPM Madiun.
- Salinan
4 lembar
498. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 7253/T.O. tgl. 28 Oktober 1948 tentang kelas peralihan di sekolah-sekolah pertanian, disertai penjelasannya.
- Stensilan
3 lembar
499. Menteri Kemakmuran: Surat Keputusan No. 8058/T.O. tgl. 29 November 1948 tentang tidak berlakunya ayat 2 pasal 7 Peraturan Kelas Peralihan di sekolah-sekolah pertanian bagi guru tetap yang sejak bulan Juni 1948-September 1948 (bulan penutupan sekolah peralihan) sudah memberikan pelajaran pada kelas peralihan.
- Stensilan
1 lembar

500. Menteri Agama: Surat-surat Keputusan No. 1259/P-5 dan No. A.558/P.5 tgl. 6 Desember 1946 dan 4 Oktober 1947 tentang hari raya.
Salinan, stensilan
3 lembar
501. Kementerian Agama: Surat Keputusan No. 546/A/P.5 tgl. 9 September 1948 tentang hari raya untuk tahun 1949.
Salinan
1 lembar
502. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 25/Peg/J tgl. 12 Juli 1948 tentang penggantian ijazah Jepang dengan ijazah Republik Indonesia.
Salinan
2 lembar
503. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. 6/A.P/1949 tgl. 22 Juli 1949 tentang pemisahan Akademi Militer Tehnis Administrasi dan Organisatoris dari Bagian Pendidikan dan Latihan, Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan menjadi langsung di bawah pengawasan Kepala Staf Angkatan Perang.
Salinan
1 lembar
504. Menteri Agama: Instruksi No. 3/1947 tgl. 8 Maret 1947 tentang pemeriksaan calon Guru Agama Islam untuk Sekolah Rakyat Negeri, disertai penjelasannya dan surat pengantar.
Stensilan
7 lembar
505. Panitia Pembentuk Akademi Ilmu Politik: Surat Edaran tgl. 15 Desember 1947 tentang pendirian Akademi Ilmu Politik.
Stensilan
1 lembar
506. Telegram-telegram tgl. 16 Juni 1948-16 Agustus 1948 tentang masalah pendidikan dan kebudayaan.
Tembusan
8 lembar
507. Setneg kepada Sekdelindon: Telegram No. 1388/K-48 tgl. 27 Oktober 1947 tentang permohonan kehadiran Soetan Sjahrir pada acara Pembukaan Tugu Peringatan 25 Tahun Perguruan Diniyah Putri.
Pertinggal
3 lembar
508. Ketua Pusat Tenaga Pelukis Indonesia di Jogjakarta kepada Presiden: Surat, tgl. 8 Oktober 1949 tentang permohonan agar Presiden mau menjadi anggota penyokong (donatur) dari usaha Eksposisi Tetap Seni Rupa, disertai lampiran.
Asli
2 lembar
509. Panitia Kongres Antar Indonesia kepada Setneg: Surat tgl. 22 Oktober 1949 tentang penyelenggaraan Kongres Pendidikan antar Indonesia.

Asli
6 lembar

511. Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada semua Kementerian dan Jabatan yang berdiri sendiri: Surat tgl. 24 November 1949 tentang pemberian Surat Tanda Tamat Belajar SR IV tahun pelajaran 1948/1949 dalam bulan Desember 1949

Salinan
2 lembar

512. P.B. PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) kepada Perdana Menteri RIS: Surat tgl. 17 Desember 1947 tentang usul sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Fisik arsip tidak ada

513. Markas Komando Jawa Staf Terr/Jawa kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan: Surat tgl. 22 Desember 1949 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penghargaan Pemerintah kepada pelajar yang berbakti.

Tembusan
1 lembar

F. ADMINISTRASI PEGAWAI

514. Undang-undang tahun 1945 tentang sumpah Pegawai Negara Republik Indonesia.

Fisik arsip tidak ada

515. Undang-undang tanpa nomor tahun 1945 tentang sumpah, pendirian dan sikap pegawai negeri.

Fisik arsip tidak ada

516. Dewan Kementerian: Undang-undang tgl. 10 September 1945 tentang disiplin dan kesetiaan pegawai RI terhadap pemerintah RI.

Asli
1 sampul

517. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Presiden: Surat tgl. 23 September 1947 tentang disetujuinya Rancangan Undang-undang Kerja tahun 1947, disertai lampiran.

Asli
1 sampul

518. Undang-undang No. 23 tgl. 23 Juli 1948 tentang pengawasan perburuhan tahun 1948.

Konsep, stensilan
11 lembar

519. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 7 tahun 1946 tgl. 1 Agustus 1946 tentang pemberian pangkat Militer Tituler kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Mahkamah Tentara.

Konsep, salinan

2 lembar

520. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 13 tgl. 29 Mei 1946 tentang peraturan perjalanan dinas, disertai lampiran.

Konsep
1 sampul

521. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 16 tgl. 14 Juni 1947 tentang instruksi untuk walikota.

Konsep
10 lembar

522. Peraturan RI Jogjakarta: Peraturan No. 17 tgl. 1, 25 Juli 1947 tentang penyelenggaraan rumah negeri untuk para Menteri RI.

Konsep, salinan
8 lembar

523. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 19 tgl. 25 Juli 1947 tentang penambahan pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 mengenai sumpah jabatan untuk Hakim, Jaksa dan Panitera Pengganti pada pengadilan negeri.

Konsep
2 lembar

524. Wakil Sekretaris Negara kepada Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat: Surat tgl. 26 Agustus 1947 tentang permohonan disetujuinya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 oleh BP Komite Nasional Pusat.

Fisik arsip tidak ada

525. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tgl. 27 Juli 1947 tentang kementerian yang dianggap perlu mempunyai wakil di daerah luar Jawa, Presiden dapat mengangkat seorang komisaris negara untuk urusan kementerian tersebut.

Konsep
10 lembar

526. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 24 tgl. 4 September 1947 tentang peraturan sumpah jabatan Pegawai Polisi dan Peraturan No. 1 tgl. 19 Januari 1948 tentang penundaan berlakunya pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 1944 yaitu mengenai lamanya jabatan Kepala Desa.

Konsep, duplikat
1 sampul

527. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. S.3 tgl. 5 Februari 1948 tentang peraturan sumpah jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara.

Konsep, duplikat
5 lembar

528. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. S.4 tgl. 7 Februari 1948 tentang pemberian pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara.

Konsep, duplikat

5 lembar

529. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 9 tgl. 20 April 1948 tentang pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-undang Kerja tahun 1948, disertai penjelasannya.
Konsep, salinan
1 sampul
530. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 9 tgl. 29 Mei 1948 tentang sumpah jabatan Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang, disertai lampiran.
Konsep, salinan
1 sampul
531. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 11 tgl. 30 Mei 1948 tentang Kantor Urusan Pegawai Negeri.
Salinan
3 lembar
532. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 22 tgl. 16 September 1948 tentang peraturan penghargaan pengalaman bekerja, disertai penjelasannya.
Konsep
5 lembar
533. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 35 tgl. 29 September 1948 tentang perjalanan dinas menteri.
Konsep
2 lembar
534. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 45 tgl. 9 Oktober 1948 tentang pemberian pangkat Militer Tituler kepada Hakim yang bukan Opsir Tentara, Jaksa serta Panitera pada pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.
Konsep, salinan
6 lembar
535. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 4A/S.D tgl. 6 Februari 1946 tentang pengangkatan pejabat di lingkungan Angkatan Laut Indonesia.
Konsep
1 lembar
536. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 4.B/S.D tgl. 23 Februari 1946 tentang pembentukan dan pengangkatan Anggota Panitia besar Penyelenggara Organisasi Tentara.
Konsep
1 lembar

537. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 6/S.D tgl. 9 April 1946 tentang: 1. pembentukan Angkatan Udara (AU), 2. pembentukan susunan AU, 3. pengangkatan Pimpinan Tertinggi Tentara RI AU, 4. pengangkatan R. Soeriadi Soedarma sebagai Kepala Staf Tentara RI AU dengan pangkat Komodore, 5. pengangkatan R. Soekarnen Martokoesoemo sebagai Wakil Kepala Staf Tentara RI AU dengan pangkat Komodore Udara, 6. pengangkatan Hadi Soetjipto sebagai Wakil Kepala Kedua Staf RI AU dengan pangkat Komodore Udara.
- Konsep
1 lembar
538. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 9/S.D tgl. 27 April 1946 tentang: 1. pengangkatan Mr. Raden Panji Noto Soebagio sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung merangkap Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta, pengangkatan Mr. Raden Satochid Kartanegara dan Mr. Mas Hoessein Tirtamidjaja sebagai Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, 2. penunjukan ibukota Jakarta sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung.
- Konsep
2 lembar
539. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 16/S.D tgl. 15 Juli 1946 tentang perubahan sementara bentuk dan susunan Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta dan penghapusan Jabatan Komisaris Tinggi untuk Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta dan penghapusan Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Surakarta.
- Konsep
2 lembar
540. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 17/S.D tgl. 9 Agustus 1946 tentang penyerahan Pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta kepada S.P. Sultan Jogjakarta.
- Konsep
2 lembar
541. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 18/S.D tgl. 3 September 1946 tentang pembubaran Panitia Besar Penyelenggara Susunan Tentara.
- Konsep
1 lembar
542. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 19/S.D tgl. 25 September 1946 tentang Kepala Daerah (Gubernur dan Residen) sebagai pemegang Pimpinan Kepolisian di dalam daerahnya masing-masing.
- Konsep
1 lembar
543. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 19B/S.D tgl. 25 September 1946 tentang penyerahan pengawasan atas enclave Kesunanan di sekitar Pasarean Pasar-Gede dan Himogiri serta atas enclave Mangkunegaran di Ngawen kepada Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta (S.P. Sultan).
- Konsep
1 lembar

544. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 20/S.D tgl. 28 September 1946 tentang pengangkatan Amir Hoesin Almoedjahid menjadi Jenderal-Mayor Kehormatan pada Tentara Republik Indonesia.
- Konsep
1 lembar
545. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 21/S.D tgl. 22 Oktober 1946 tentang perintah untuk sementara kembali ke Surakarta menjalankan pekerjaannya kepada Residen Surakarta (Mr. Iskak Tjokroadisurjo) dan Wakil Residen Surakarta (R. Soediro).
- Konsep
1 lembar
546. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1/O.P tgl. 14 Mei 1947 tentang pengangkatan Teuku Moch. Daoet Sjah menjadi Jenderal Mayor Kehormatan pada Tentara Republik Indonesia.
- Asli
2 lembar
547. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 2 tgl. 8 Juli 1947 tentang penghapusan Jabatan Gubernur Propinsi-propinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
- Duplikasi
8 lembar
548. Presiden RI: Penetapan No. 2 dan No. 3 tgl. 26 Juni 1946 tentang pengangkatan M. Nazir menjadi Pemimpin Utama Angkatan Laut RI dan pengangkatan Panglima Besar menjadi Pemimpin Tentara Darat, Laut dan Udara.
- Konsep
1 lembar
549. Presiden RI: Penetapan No. Pol. 3/51/5 tgl. 17 Agustus 1946 tentang pengangkatan beberapa orang Maha Guru.
N.B.: Tidak lengkap
- Pertinggal
2 lembar
550. Presiden RI: Penetapan tgl. 13 Januari 1947 tentang pengangkatan Kapten Rachmat Moeljowiseno menjadi Mayor III Tentara Republik Indonesia.
- Konsep
1 lembar
551. Presiden RI: Penetapan tgl. 25 Juni 1947 tentang pemberian pangkat militer kepada Pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan Jawatan Rahasia.
- Konsep
2 lembar
552. Presiden RI: Penetapan No. 8 tgl. 30 Juni 1947 tentang pengangkatan Soetan Sjahrir sebagai Penasehat Presiden.
- Konsep
4 lembar

553. Presiden RI: Penetapan tgl. 25 Juli 1947 tentang kenaikan pangkat Pegawai-pegawai Kementerian Pertahanan.
- Konsep
1 lembar
554. Presiden RI: Penetapan-penetapan tgl. 25 Juni, 28 Juli 1947 tentang pengangkatan Anggota-anggota Staf Gabungan Angkatan Perang.
- Konsep, asli
8 lembar
555. Presiden RI: Penetapan-penetapan No. 108 dan 109/A/47 tgl. 25 September 1947 tentang pemberhentian Letkol. Bambang Soepeno dari jabatan Korem III Polisi Tentara dan pengangkatannya Panglima Divisi VII dan kenaikan pangkatnya menjadi Kolonel pada TNI.
- Salinan
2 lembar
556. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan No. 134-A-1947 tgl. 28 November 1947 tentang daftar perimbangan pangkat militer dan sipil yang akan dipergunakan dalam pemberian pangkat militer tituler.
- Konsep
2 lembar
557. Presiden RI: Penetapan No. 25 tgl. 29 September 1948 tentang penggabungan Daerah Istimewa Jogjakarta dan karesidenan-karesidenan Kedu dan Banyumas sebagai Daerah Militer Istimewa serta pengangkatan Kolonel Bambang Soegeng menjadi Gubernur Militer tsb.
- Konsep
1 lembar
558. Presiden RI: Penetapan No. 84/P.Mil/48 tgl. 5 Desember 1948 tentang pemberhentian dengan hormat Mayor Jenderal R. Soekarnen Martodisoemo yang diperbantukan pada Jawatan Tata Hukum Kementerian Pertahanan dan pengangkatannya ke dalam Korps Reserve Opsir dengan pangkat Kolonel Reserve Angkatan Darat.
- Salinan
2 lembar
559. Presiden RI: Penetapan-penetapan tgl. 30 Juni 1948-16 Desember 1948 tentang pengangkatan-pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Wakil Anggota Kantor Pemilihan Pusat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Tengah.
- Asli
12 lembar
560. Presiden RI: Penetapan No. 3 dan No. 4 tgl. 0 Juli 1949 tentang pencabutan kembali kekuasaan penuh yang diserahkan kepada Menteri Negara, Koordinator Keamanan S.P. Hamengku Buwono IX oleh Pemerintah RI, pengangkatan Kolonel Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V di Jawa.
- Konsep
1 lembar

561. Menteri Kemakmuran kepada sekretaris Negara: Surat tgl. 12 Desember 1949 tentang Penetapan Presiden mengenai pengangkatan Taher Ibrahim sebagai Wakil Perdagangan RI di Singapura.
- Asli
1 lembar
562. Perdana Menteri RI: Penetapan No. /PM/1949 tgl. 10 September 1949 tentang penambahan anggota Panitia Politik Umum Personalia dan pengangkatan I.J. Kasimo sebagai anggota panitia tersebut.
- Salinan
1 lembar
563. Presiden RI: Surat Keputusan 25 September 1945 tentang persetujuan bahwa Pegawai-pegawai Indonesia adalah Pegawai Negara Republik Indonesia.
- Konsep
1 lembar
564. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. 6 Februari 1946 tentang penyerahan Jabatan Panglima Tertinggi Tentara RI dari Angkatan Laut Indonesia kepada Soedirman.
- Rusak ringan
Konsep
2 lembar
565. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. 13 Maret 1946 tentang pengangkatan K.R.T. Soegijono Josodiningrat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI.
- Salinan
1 lembar
566. Presiden RI: Surat keputusan tgl. 11 Juli 1946 tentang pengangkatan Kepala Staf Komandemen Tentara RI Sumatera (Jenderal Mayor P.T.R Soehardjo Hardjowardjojo) menjadi Panglima Tertinggi Tentara RI Sumatera dengan pangkat Letnan Jenderal.
- Kutipan
2 lembar
567. Presiden RI: Surat keputusan tgl. 19 Juli 1946 tentang pengangkatan menjadi Ketua, Anggota Militer, Anggota Ahli hukum, Panitera dan Advokat Fiscaal pada Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.
- Konsep
3 lembar
568. Presiden RI: Surat Keputusan tahun 1947 tentang pemberian pangkat Militer Tituler kepada Pejabat-pejabat di Mahkamah-mahkamah Tentara.
- Rusak sedang
Konsep
4 lembar

569. Presiden RI: Surat Keputusan No. 31-A-47 tgl. 13 Mei 1947 tentang pencabutan putusan (Contraseign Menteri Dalam Negeri tgl. 30 Desember 1946 No. P. 21/1/23) mengenai pengangkatan Rd. Soemindro menjadi Residen Lampung.
Petikan
1 lembar
570. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. 30 Juni 1947 tentang perubahan tugas kewajiban Mr. Indra Koesoema.
Konsep
1 lembar
571. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. 30 Juni 1947 tentang pemberian kuasa kepada Penasehat Presiden untuk membentuk staf dan mengangkat pegawai-pegawainya.
Konsep
1 lembar
572. Presiden RI: Salinan surat-surat keputusan bagi Anwar Tjokroaminoto.
Konsep
4 lembar
573. Presiden Pangliman Tertinggi Angkatan Perang: Surat Keputusan tgl. 28 November 1947 tentang pemberian pangkat Militer Tituler kepada pegawai sipil, disertai lampiran.
Konsep
2 lembar
574. Presiden RI: Surat Keputusan No. 1/P.CIV/48 tgl. 12 Januari 1948 tentang pemberhentian dengan hormat H. Rasjidi dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Asli, konsep
2 lembar
575. Presiden RI: Surat Keputusan tgl. Mei 1948 tentang usul penyesuaian pangkat bagi Wakil Kepala Jawatan Tambang/Geologi.
Rusak ringan
Asli, konsep
1 sampul
576. Presiden RI: Surat Keputusan No. 54/A.Civ/48 tgl. 30 Mei 1948 tentang pengangkatan Mr. A.G. Pringgodigdo (Sesneg) menjadi Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri di Sumatera merangkap anggota Komisariat Pemerintah Pusat.
Konsep
1 lembar
577. Setneg kepada Suryocondro di Pegangsaan Timur 56 Jakarta: Telegram tgl. 15 Juli 1948 tentang Surat Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Dr. Soeharto selaku Kepala Administrasi Militer Pusat merangkap dokter pribadi Presiden, disertai lampiran.
Asli, pertinggal
9 lembar

578. Presiden RI: Surat Keputusan No. 68/A.Mil/48 tgl. 17 Juli 1948 tentang pemindahan Letkol D. Jahja, Kepala Staf Operatif Komando Sumatera ke Staf Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel dan pengangkatan Kolonel Ismael Lengah, Panglima Divisi IX di Sumatera sebagai Kepala Staf Operatif Komando Sumatera dengan pangkat Kolonel.
- Asli, salinan
5 lembar
579. Presiden RI: Surat Keputusan No. 64/P.Mil/48 tgl. 31 Juli 1948 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Kolonel R. Didi Kartasasmita dari jabatannya dan dari dinas ketentaraan.
- Salinan
1 lembar
580. Presiden RI: Surat Keputusan No. 64/P.Mil/48 tgl. 31 Juli 1948 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Kolonel Soedibyo dari jabatannya dan dari dinas ketentaraan.
- Salinan
2 lembar
581. Presiden RI: Surat Keputusan No. 75/A.Mil/48 tgl. 16 September 1948 tentang pemberian pangkat Gunernur Militer kepada Kolonel Gatot Subroto selama menjalankan tugas kewajibannya sebagai Komandan Daerah Militer Karesidenan Surakarta dan Semarang.
- Salinan
1 lembar
582. Presiden RI: Surat Keputusan No. 73/P. Civ/48 tgl. 6 Oktober 1948 tentang pemberhentian dengan hormat Mr. Ruphinus Lumban Tobing dari jabatannya sebagai Wakil Jaksa Agung Sementara di Sumatera, pemberian jabatan itu kembali kepada Abdul Muthalib Mono.
- Konsep
1 lembar
583. Presiden RI: Surat Keputusan No. J/571/1948 tgl. 11 Oktober `948 tentang Ir. Kaslan Abd. Tohir (Penasehat ahli/pegawai tinggi Tingkat III pada Kementerian Kemakmuran) yang diperbantukan kepada Staf Angkatan Perang RI. Rusak sedang
- Salinan
1 lembar
584. Presiden RI: Surat Keputusan No. 90/A.Civ/48 tgl. 16 November 1948 tentang pengangkatan sebagai Thesaurier Jenderal pada Kementerian Keuangan Mr. R. Soetikno Slamet (Kepala Jawatan Pajak merangkap Kepala Bagian Urusan Uang, Kredit dan Bank) dan R. Kadarisman Notopradjarto (Kepala Muda Jawatan Keuangan) dan pencabutan SK Menteri Keuangan tgl. 15 Agustus 1948 No. U.P.5-10-9.
- Konsep
1 lembar

585. Presiden RI: Surat Keputusan No. 92/A.Mil/48 tgl. 18 November 1948 tentang pemberian pangkat tituler Letnan Jenderal kepada Menteri Negara Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Konsep
1 lembar
586. Presiden RI: Surat Keputusan No. 94/A.Mil/48 tgl. 22 November 1948 tentang perubahan dalam personalia Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
Konsep
1 lembar
587. Presiden RI: Surat Keputusan tahun 1949 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Peranakan dan Bangsa Asing Kementerian Dalam Negeri, Mr. R. Soejoedi.
Konsep
1 lembar
588. Presiden RI: Surat Keputusan No. 10/A/49 tgl. 4 Agustus 1949 tentang pengangkatan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Plt. Perdana Menteri selama Wakil Presiden/Perdana Menteri ada di luar negeri, disertai surat pengantar.
Asli, pertinggal
2 lembar
589. Presiden RI: Daftar lampiran surat keputusan No. 14/A/1949 tgl. 5 Agustus 1949 tentang pengangkatan Mr. Icksan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
Fisik arsip tidak ada
590. Presiden RI: Surat Keputusan No. 11/A/49 tgl. 6 Agustus 1949 tentang pengangkatan Ki Hajar Dewantara sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, disertai surat pengantar.
Pertinggal
2 lembar
591. Presiden RI: Surat Keputusan No. 17/A/49 tgl. 19 Agustus 1949 tentang pengangkatan Mr. R. Soebagjo Djojowidagdo menjadi pegawai yang diperbantukan kepada Menteri Kemakmuran merangkap Pimpinan Sekretariat Kementerian Kemakmuran, disertai lampiran.
Salinan
2 lembar
592. Presiden RI: Surat Keputusan No. 21/A/1949 tgl. 27 Agustus 1949 tentang pengangkatan Mr. Soekardan Pronohadikoesoemo menjadi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Perhubungan, disertai lampiran.
Salinan
2 lembar
593. Presiden RI: Surat Keputusan No. 4/P/49 tgl. 27 Agustus 1949 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. E. Abdul Karim dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal pada Kementerian Perhubungan.
Salinan

1 lembar

594. Presiden RI: Surat Keputusan No. 22/A/49 tgl. 30 Agustus 1949 tentang pengangkatan Mr. I Gusti Ktut Pudja menjadi Gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dan Mr. R. Imam Sudjahri menjadi Residen diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

595. Presiden RI: Surat Keputusan No. 23/A/49 tgl. 31 Agustus 1949 tentang pengangkatan Mr. Achmad Subardjo Djojoadhisurjo menjadi pegawai yang diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

596. Presiden RI: Surat Keputusan No. 28/A/49 tgl. 10 September 1949 tentang pengangkatan R. Boediono sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Salinan
8 lembar

597. Presiden RI: Surat Keputusan No. 45/A/49 tgl. 26 Oktober 1949 tentang pengangkatan Sri Paduka Hamengku Buwono IX menjadi Plt. Menteri Luar Negeri.

Konsep
3 lembar

598. Presiden RI: Surat Keputusan No. 54/A/49 tgl. 11 November 1949 tentang pengangkatan R. Soewihjo Walikota Jakarta diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri menjadi Koordinator Perwakilan RI di Jakarta langsung di bawah Perdana Menteri.

N.B. Tulisan tidak jelas

Konsep
1 lembar

599. Presiden RI: Surat Keputusan No. 60/A/49 tgl. 14 November 1949 tentang pengangkatan R. Singgih Praptodihardjo sebagai Sekretaris II Panitia Agraria untuk menggantikan M. Soegiri.

Konsep
1 lembar

600. Presiden RI: Surat Keputusan No. 11/P/49 tgl. 16 November 1949 tentang pemberhentian dengan hormat Sri Paduka Hamengku Buwono IX dari jabatan Plt. Perdana Menteri.

Konsep, stensilan
6 lembar

601. Presiden RI: Surat Keputusan No. 12/P/49 tgl. 17 November 1949 tentang pemberhentian dengan hormat Sri Paduka Hamengku Buwono IX dari jabatannya sebagai Plt. Menteri Luar Negeri kepada P.J.M. Wapres/PM.

Konsep, stensilan
5 lembar

602. Presiden RI: Surat Keputusan No. 70/A/49 tgl. 24 November 1949 tentang pembentukan kantor perwakilan Kementerian Kesehatan di Jakarta dan pengangkatan Dr. R. Kodijat menjadi ketua kantor Perwakilan Kementerian Kesehatan tersebut.
- Konsep
2 lembar
603. Presiden RI: Surat Keputusan No. 72/A/49 tgl. 29 November 1949 tentang pengangkatan Mr. M. Saubari menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, disertai lampiran.
- Kutipan
2 lembar
604. Presiden RI: Surat Keputusan No. 13/P/49 tgl. 6 Desember 1949 tentang pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri Letnan Kolonel Soenarjo dari jabatannya sebagai anggota Markas Berkas Komando Jawa dan pengeluarannya dari dinas tentara.
- Asli
1 lembar
605. Presiden RI: Surat Keputusan No. 78/A/49 tgl. 7 Desember 1949 tentang pengangkatan Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, disertai lampiran.
- Asli
2 lembar
606. Presiden RI: Surat Keputusan No. 95/A/49 tgl. 14 Desember 1949 tentang pengangkatan Bupati Asaari menjadi anggota Panitia Sumatera Selatan dan pemberhentian dengan hormat Kolonel Simbolon sebagai anggota Panitia Sumatera Selatan.
- Asli
1 lembar
607. Presiden RI: Surat-surat keputusan tgl. 30 November 1949-22 Desember 1949 tentang pengangkatan pegawai-pegawai Kementerian, disertai lampiran.
- Asli, salinan
1 sampul
608. Presiden RI: Surat Keputusan No. 104/A/49 tgl. 22 Desember 1949 tentang pemberian pangkat efektif kepada beberapa Perwira Angkatan Laut RI.
N.B. Arsip tidak lengkap
Rusak ringan
- Asli
1 lembar
609. Presiden RI: Surat Keputusan No. 18/P/49 tgl. 22 Desember 1949 tentang pemberhentian dengan hormat Letnan Kolonel R. Djojosedardjo dari jabatannya sebagai perwira yang diperbantukan kepada Gubernur Militer I dan pengeluarannya dari dinas tentara, disertai lampiran.
- Salinan, kutipan
2 lembar

610. Presiden RI: Surat Keputusan No. 110/A/49 tgl. 24 Desember 1949 tentang pengangkatan Mr. R. Tjokroadisoemarto sebagai Pegawai Tinggi golongan VI/d.
Salinan
2 lembar
611. Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 10/P.M./1947 tgl. 1 Oktober 1947 tentang pengangkatan Mr. Tadjuddin Noor sebagai Pegawai Negeri Tinggi Tingkat ke II diperbantukan kepada Perdana Menteri.
Salinan
1 lembar
612. Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 13/P.M./1947 tgl 17 Oktober 1947 tentang penempatan B. Susilo, Letnan Kolonel Jawatan V Kementerian Pertahanan untuk sementara di Kementerian Luar Negeri.
Salinan
1 lembar
613. Wakil Perdana Menteri: Surat Keputusan No. 11/P.M./1947 tgl. 8 Oktober 1947 tentang penarikan kembali Surat Keputusan Pengangkatan K.H.M. Fathoerrachman sebagai Penasehat Menteri Agama.
Rusak berat
Salinan
1 lembar
614. Wakil Perdana Menteri RI di Sumatera: Surat No. 13/Up/WKPM tgl. 19 Desember 1949 tentang pengangkatan R. Marjono Danoebroto menjadi Sekretaris Wakil Perdana Menteri RI di Sumatera dengan pangkat Residen.
Rusak berat
Salinan
1 lembar
615. Presiden: Maklumat No. 8 tgl. 11 November 1947 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya yaitu: Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Agama ad interim, Menteri Penerangan, Menteri Muda Penerangan dan pengangkatan-pengangkatan Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Penerangan, Menteri Negara, Menteri Muda Penerangan, dan Menteri Muda Kehakiman.
Asli, konsep
2 lembar
616. Presiden: Maklumat No. 1 tgl. 22 Januari 1948 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya yaitu Wakil Perdana Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda Kehakiman.
Konsep
2 lembar
617. Presiden: Maklumat No. 2 tgl. 23 Januari 1948 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannya yaitu: Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Wakil Perdana Menteri II, Wakil Perdana Menteri III merangkap Menteri Kemakmuran, dll. dan pemberian kuasa kepada Kabinet Demisioner untuk meneruskan pekerjaannya sampai pelantikan Kabinet Baru.
Konsep

4 lembar

618. Presiden RI: Maklumat No. 3 tgl. 29 Januari 1948 tentang pembentukan Presidensial Kabinet yang susunannya adalah sbb: Dr. Soekiman (Menteri Dalam Negeri ad interim), H.A. Salim (Menteri Luar Negeri), Mr. A.A. Maramis (Menteri Keuangan), dll dan pemberian kekuasaan sebagai pimpinan sehari-hari.
- Konsep
3 lembar
619. Presiden RI: Maklumat No. 6 tgl. 13 April 1948 tentang pengangkatan Ir. F. Laoh menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan pemberhentian dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum ad interim Ir. Juanda.
Rusak sedang
- Konsep
1 lembar
620. Presiden RI: Maklumat No. 7 tgl. 18 November 1948 tentang pemberian kuasa kepada Menteri Perhubungan, Ir. Djuanda untuk memegang Pimpinan Kabinet sehari-hari selama Wakil Presiden, Mohammad Hatta, berada di Sumatera.
- Konsep
1 lembar
621. Pemerintah RI: Pengumuman tanpa nomor tgl. 5 Desember 1945 tentang peletakan jabatan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dan mengangkat penggantinya.
- Konsep
1 lembar
622. Pemerintah RI: Pengumuman No. 1, 2, 3 tgl. 30 Januari 1948 dan 2 Februari 1948 tentang kedudukan pegawai-pegawai Republik di daerah-daerah pendudukan Belanda.
- Duplikat
1 lembar
623. Pemerintah RI: Pengumuman tgl. 16 September 1948 tentang pembentukan Karesidenan Surakarta dan Karesidenan Semarang sebagai Daerah Militer Istimewa dan pengangkatan-pengangkatan: 1. Kolonel Gatot Subroto sebagai Komandan Militer Karesidenan Surakarta dan Semarang, 2. Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah, Kolonel Bambang Soegeng dan Wakil Jaksa Agung, Mr. Muljanto sebagai Penasehat Komandan Daerah Militer Istimewa Karesidenan Surakarta dan Semarang.
- Asli, konsep
1 lembar
624. Pemerintah RI Jogjakarta: Pengumuman tanpa nomor tgl. 20 Agustus 1949 tentang kedudukan pegawai negeri.
- Salinan
1 lembar

625. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Panglima Besar Angkatan Perang Mobil: Surat Perintah No. 9/P.T./48 tgl. 22 April 1948 tentang masalah sejarah hidup summair dari para opsir yang diusulkan dalam lampiran Surat Panglima Besar Angkatan Perang Mobil tgl. April 1948 No. 212/K.B./48/A.P.
Konsep
1 lembar
626. Pemerintah RI Jogjakarta: Keterangan tgl. 31 Maret 1948 tentang masalah-masalah pegawai-pegawai di daerah-daerah pendudukan.
Asli, konsep
2 lembar
627. Menteri yang disertai Urusan Pegawai Negeri: Peraturan No. 4/S/1949 tgl. 8 Agustus 1949 tentang pengangkatan kembali pegawai negeri.
Salinan
4 lembar
628. Menteri Pertahanan: Surat Penetapan No. 112/mp tahun 1947 tgl. 17 Oktober 1947 tentang penempatan Letkol B. Susilo Jawatan V Kementerian Luar Negeri.
Salinan
1 lembar
629. Menteri Pertahanan: Surat Penetapan No. J/151/1948 tgl. 9 April 1948 tentang pencabutan keputusan No. J/107/1948 tgl. 18 Maret tentang penempatan orang-orang pada Sekretariat B. Kementerian Pertahanan dan pemindahan Rr. Moerdijah dari Sekretariat Staf Gabungan ke Sekretariat A Kementerian Pertahanan.
Fisik arsip tidak ada
630. Menteri Pertahanan: Surat Penetapan No. J/539/1948 tgl. 1 November 1948 tentang penunjukan beberapa perwira sebagai anggota-anggota tidak tetap dalam Dewan Kehormatan Militer.
Fisik arsip tidak ada
631. Menteri Keuangan: Surat Penetapan No. TNU I/9/11 tgl. 15 September 1949 tentang penunjukan Abdul Mukti dan Abdul Hamid sebagai Wakil Menteri Keuangan dan berkuasa penuh atas masalah keuangan di Jakarta.
Salinan
1 lembar
632. Kementerian Pembangunan dan Pemuda: Surat Penetapan No. 002 tgl. 31 Agustus 1948 tentang pengangkatan Soemardjo menjadi kepala Badan Penolong Ksatria.
N.B. Kertas rusak
Asli
1 lembar
633. Menteri Muda Urusan Pemuda: Surat-surat Penetapan No. 147 Ag No. 8285/BSI tgl. 26 Desember 1947 No. 156 Agno. mp/383/BSI tgl. 15 Januari 1948 tentang pemberhentian pegawai-pegawai Kementerian Negara Urusan Pemuda.

Salinan
2 lembar

634. Staf Territorium Militer Jawa: Surat Penetapan No. 27/D II/S/D/48 tgl. 1 Desember 1948 tentang pemberhentian Letkol Hutagalung, Staf Divisi III.

Fisik arsip tidak ada

635. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 2458/Peg/m tgl. 17 September 1948 tentang pemberhentian pegawai Hadireno Simoen.

Salinan
2 lembar

636. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 2633/Peg/m tgl. 9 Oktober 1949 tentang penunjukan Dr. Sukardjo Mangunsudiro sebagai Plt. Kepala Jabatan urusan obat-obatan Jogjakarta.

Salinan
2 lembar

637. Menteri Kesehatan a.i.: Surat Keputusan No. 401/Peg/30 tgl. 7 November 1949 tentang penyerahan kekuasaan penyelenggaraan urusan pegawai dari golongan VI/C-PGP 1948 ke bawah yang bekerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Daerah Jawa Barat dan Banten kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Jakarta.

Asli
1 lembar

638. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 555/Peg/9 tgl. 25 November 1949 tentang pemberhentian Ny. Pangemanan, Ch. Sewabessy, Sastrosamian, Ny. Roesmi dari jabatannya sebagai karyawan di Kantor Jawatan Pemberantasan penyakit Pes D.I. Jogjakarta di Jogjakarta, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

639. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 556/Peg/7 tgl. 25 November 1949 tentang pemberhentian Markoen, Soekardjono, Samino Hardjoprajitno, Sastrosoewardi, Sastrowidjojo, Ny. W.L.R. Triebel, J. Lepar, B. Lasmijem Tjokrodihardjo, Bok Toekijah, Idi Soerodiatmodjo, Sarjono, R. Iljas dari jabatannya di Inspeksi Kesehatan Jawa Tengah, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

640. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 557/Peg/6 tgl. 25 November 1949 tentang pemberhentian Soegiantari, Wangsit Wasitooetomo dari jabatannya sebagai penyelidik malaria di Pusat Jawatan Pemberantasan Penyakit Malaria, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

641. Menteri Kesehatan: Surat-surat Keputusan No. 553/Peg/S dan 584/Peg/3 tgl. 25 November 1949 dan 28 November 1949 tentang pemberhentian pegawai-pegawai dari jabatannya sebagai penata usaha di Kementerian Kesehatan Bagian Keuangan, disertai lampiran.

Salinan

5 lembar

642. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 570/Peg/2 tgl. 28 November 1949 tentang pemberhentian M. Baroen Mohammad, J. Leimena, Kasioen Atmodipoero dan Soekanto dari jabatannya sebagai penata usaha di Kementerian Kesehatan Bagian Keuangan, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

643. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 2598/Peg/1 tgl. 18 Desember 1949 tentang penyerahan (delegeren) hak kekuasaan penyelenggaraan urusan pegawai dari golongan IV-PGP 1948 ke bawah yang dipekerjakan pada Jawatan Pemeberantasan Penyakit Pes daerah Istimewa Jogjakarta dari bagian urusan Pegawai Kementerian Kesehatan Pusat kepada Kepala Jawatan Pemberantas Penyakit Pes Daerah Istimewa Jogjakarta.

Asli
2 lembar

644. Menteri Kesehatan: Surat Keputusan No. 795/Peg/38 tgl. 30 Desember 1949 tentang pemberhentian Dr. R. Moh. Stambul dan Dr. A. Sastrotenojo dari jabatannya sebagai Dokter Kepala pada Kementerian Kesehatan di Inspektorat Kesehatan Jawa Timur, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

645. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. A/134/1947 tgl. 13 Mei 1947 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai bagian B Kementerian Pertahanan yaitu: P.H.L. Tobing, Soetisna Effendi, Soemarjo, Roesadi, Wirakartakoesoema, Soejadi, Moechtar, Soehadi, dll., disertai lampiran.

Asli
4 lembar

646. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. J/119/1948 tgl. 25 Maret 1948 tentang pengangkatan kembali beberapa orang pegawai pada Jawatan V Kementerian Pertahanan.

Asli
1 lembar

647. Menteri Pertahanan kepada Setneg: Surat-surat tgl. 10 Juli 1947-30 Maret 1948 tentang naskah SK pemberhentian Kapten Laut Abdul Gani dan pengangkatan Letkol Tirtoatmaja sebagai Anggota Mahkamah Tentara.

Fisik arsip tidak ada

648. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. J/133/1948 tgl. 31 Maret 1948 tentang pemberian perlop sakit kepada Dr. R. Soeharto selama 3 bulan.

Asli
1 lembar

649. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. J/258/48 tgl. 27 Mei 1948 tentang pengangkatan Letkol Santosa sebagai anggota Panitia Penghapusan Gubernur Militer Surakarta, disertai surat pengantar.

Asli

2 lembar

650. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. J/281/1948 tgl. 2 Juni 1948 tentang pembebasan Armyn Pane sebagai Pimpinan Bagian Warta dan Publikasi dan penyerahan pimpinannya kepada Soekoco, Wakil Bagian tersebut.

Salinan
1 lembar

651. Menteri Pertahanan: Surat-surat Keputusan tgl. 8 Maret 1948-20 Oktober 1948 tentang pemberhentian pegawai.

Salinan
6 lembar

652. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. 26 A/A.P./1949 tgl. 1 September 1949 tentang pencabutan kembali pemberhentian sementara perwira-perwira yang tersebut dalam lampiran dan merehabilitasi nama-nama perwira tersebut, disertai lampiran.

Salinan
3 lembar

653. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 1/49 tgl. 4 Juni 1949 tentang penunjukan Ir R. Abdoelmoettalip Danoeningrat untuk menjalankan pekerjaan Kepala Jawatan Kereta Api selama pimpinan Jawatan Kereta Api belum dapat menjalankan kewajibannya.

Salinan
2 lembar

654. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 2/49 tgl. 4 Juni 1949 tentang penunjukan R. Djar untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan Kepala Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon belum dapat menjalankan pekerjaannya.

Salinan
2 lembar

655. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 3/49 tgl. 4 Juni 1949 tentang penunjukan Ir. Taripa Harahap Sutan Barat Muda untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan Kepala Jawatan Angkutan Motor RI selama Kepala Jawatan Angkutan Motor RI belum dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Salinan
2 lembar

656. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 5/49 tgl. 11 Juli 1949 tentang pengangkatan Ir. Mas Mohamad Effendi Saleh menjadi Kepala Jawatan Kereta Api RI, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

657. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 7/49 tgl. 11 Juli 1949 tentang pengangkatan Mr. R. Soekardan Pronohadikoesoemo menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, disertai lampiran.

Salinan
2 lembar

658. Menteri Kehakiman: Surat Keputusan No. E/1/88 tgl. 17 September 1949 tentang diwajibkannya Sekretaris Kementerian Kehakiman mengawasi pekerjaan Bagian Urusan Pegawai dan pekerjaan Bagian Perbendaharaan.
- Salinan
1 lembar
659. Menteri Kehakiman: Surat Keputusan No. E/2a/119 tgl. 17 September 1949 tentang mengangkat Raden Mas Wiranto sebagai Notaris di Jogjakarta.
- Konsep
1 lembar
660. Menteri Kehakiman: Surat Keputusan No. G.6/134 tgl. 21 Oktober 1949 tentang pencabutan Surat Keputusan tgl. 17 Desember 1946 No. G.8/1534 dan penunjukan R. Wislam Hadiwasito, Komis pada Kantor Pusat Jawatan Kependjaraan sebagai pemegang kas pada Kantor Pusat Jawatan Kependjaraan.
- Salinan
1 lembar
661. Menteri Kehakiman: Surat-surat Keputusan No. E/2b/12 dan No. E/2b/24 tgl. 17 September 1949 dan 14 November 1949 tentang pemberhentian Mr. Raden Soeda dari jabatannya sebagai Notaris di Jogjakarta.
- Salinan
2 lembar
662. Menteri Kehakiman: Surat-surat Keputusan No. E/1/394 dan No. E/1/5451 tgl. 18 November 1949 dan tgl. 5 Desember 1949 tentang penunjukan beberapa pegawai Kementerian Kehakiman untuk mengadakan peninjauan Susunan Departement van Justitie di Jakarta.
- Salinan
2 lembar
663. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 42/1/mtr. Tgl. 23 Juni 1948 tentang penunjukan Achmad Sofjan sebagai Wakil Kementerian Persediaan Makanan Rakyat merangkap Kepala Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan di Sumatera, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
664. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 58/1/mtr. tgl. 26 Agustus 1948 tentang penyerahan tugas kewajiban Kantor Pusat Jawatan PPBM di Jogjakarta dalam melaksanakan segala urusan pegawai/pekerja PPBM seluruh daerah Karesidenan Banten kecuali pegawai tinggi harus mendapat pengabsahan dari Menteri Persediaan Makanan Rakyat kepada Residen Banten, disertai surat pengantar.
- Salinan
5 lembar
665. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 64/1/mtr. tgl. 20 September 1948 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sojas dari jabatannya sebagai pegawai tinggi V di Kantor Pusat Jawatan PPBM Kementerian Persediaan Makanan Rakyat.
- Salinan

2 lembar

666. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat-surat Keputusan No. 51//mtr. tgl. 2 Agustus 1948, No. 61//mtr. tgl. 22 September 1948 tentang pemberian istirahat kepada Suhadi Hadikusumo, disertai surat pengantar.

Salinan
4 lembar

667. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 66//mtr. tgl. 4 Oktober 1948 tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada R. Sukindar.

Salinan
2 lembar

668. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat-surat Keputusan No. 67//mtr. dan No. 68//mtr. tgl. 4 Oktober 1948 tentang jabatan Kepala Muda Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan disesuaikan dengan jabatan di golongan VI ruang d, pengadaan jabatan Inspektur Kepala untuk memimpin daerah propinsi sebagai perwakilan kantor pusat atau ditempatkan di kantor pusat sesuai dengan jabatan di golongan VI ruang c, disertai surat pengantar.

Salinan
4 lembar

669. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Surat Keputusan No. 70//mtr. tgl. 21 Oktober 1948 tentang pengangkatan beberapa Kepala Muda Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan, disertai lampiran dan surat pengantar.
N.B. Kertas sobek

Salinan
3 lembar

670. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 87/P/48. tgl. 30 Oktober 1948 tentang pemberhentian Munandar, Kepala seksi Veem pada Jawatan Pembangun Perusahaan Pusat di Jogjakarta untuk sementara waktu dari jabatannya.

Salinan
1 lembar

671. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 88/P/48 tgl. 30 Oktober 1948 tentang pemberhentian Sutjipto untuk sementara waktu dari jabatannya sebagai Cabang Jawatan Pembangun Perusahaan daerah Banyumas.

Salinan
1 lembar

672. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 89/P/48 tgl. 30 Oktober 1948 tentang pemberhentian Soejono untuk sementara waktu dari jabatannya sebagai Cabang Jawatan Pembangun Perusahaan daerah Malang.

Salinan
1 lembar

673. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 90/P/48 tgl. 30 Oktober 1948 tentang pemberhentian Hardjowarsito tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Jawatan Pembangun Perusaah daerah Bodjonegoro.
Salinan
1 lembar
674. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 91/P/48 tgl. 30 Oktober 1948 tentang pemberhentian Ismono tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Jawatan Pembangun Perusahaan daerah Madiun.
Salinan
1 lembar
675. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 102/P/48 tgl. 9 November 1948 tentang pemberhentian K. Goenadi untuk sementara dari jabatannya sebagai pegawai tinggi tingkat keempat pada Kementerian Pembangunan dan Pemuda Bagian Sekretariat Urusan Pemuda.
Salinan
1 lembar
676. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 98/P/48 tgl. 12 November 1948 tentang pemberhentian Soeroso untuk sementara dari jabatannya sebagai Kepala Cabang Jawatan Pembangun Perusahaan daerah Surakarta.
Salinan
1 lembar
677. Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan No. P.3/1/20 tgl. 11 Oktober 1949 tentang pemberhentian dengan hormat R.M. Soetjipto dari jabatannya sebagai ahli teknik kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Salinan
1 lembar
678. Menteri Pekerjaan Umum: Surat keputusan No. S9/2/4 tgl. 11 November 1949 tentang pendirian Perwakilan Jawatan Pelayaran di Jakarta dan penunjukan Moh. Anwar sebagai Kepala Kantor Perwakilan Jawatan Pelayaran tersebut.
Fisik arsip tidak ada
679. Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan No. S2/12/1 tgl. 29 November 1949 tentang penunjukan beberapa pegawai Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau Susunan Departement van Waterstaat en Wederopbouw, Departement van Scheepvaart dan Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen di Jakarta.
Salinan
1 lembar
680. Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan No. P7/1/11 tgl. 3 Desember 1949 tentang penunjukan M. Aboe Sanoesi menjadi Kepala Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Salinan
1 lembar

681. Menteri Pekerjaan Umum: Surat Keputusan No. 1957/D tgl. 14 April 1947 tentang pengangkatan Prof. Ir. R.M. Wreksodiningrat dan Ir. R. Goenoeng Iskandar Wirjonagoro sebagai anggota Dewan Curator pada Sekolah Tinggi Teknik Bandung Jogjakarta.
- Salinan
1 lembar
682. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 5219/C tgl. 23 Juni 1948 tentang pendirian Cursus Pengetahuan Umum (CPU) macam C di Kota Bojonegoro dan pengangkatan Mr. Surjadi sebagai pemimpin CPU macam C di Kota Bojonegoro tersebut.
- Salinan
1 lembar
683. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 5206/E tgl. 23 Juni 1948 tentang pengangkatan 2 guru besar di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik di Jogjakarta yaitu Ir. H. Johannes dan Ir. Goenarso, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
684. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 8752/C tgl. 23 Juli 1948 tentang pembatalan Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan No. 5219/C tgl. 23 Juni 1948 dan penunjukan Djadjengsoegianto sebagai Pimpinan CPU di Kota Bojonegoro.
- Salinan
1 lembar
685. Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: Surat Keputusan No. 556/C tgl. 1 Desember 1949 tentang pengangkatan Koesbini menjadi pegawai untuk sementara waktu pada Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan di Jogjakarta, disertai lampiran.
- Salinan
2 lembar
686. Menteri Luar Negeri: Surat Keputusan No. PKL/554/147 tgl. 27 Desember 1947 tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Menteri Luar Negeri.
- Salinan
1 lembar
687. Menteri Luar Negeri: Surat-surat Keputusan tgl. 3 Desember 1947, 13 Juli 1949 dan 14 Desember 1948 tentang pemberhentian pegawai.
- Salinan
4 lembar
688. Menteri Luar Negeri: Surat-surat Keputusan tgl. 29 Oktober 1947-21 Oktober 1949 tentang pengangkatan pegawai, disertai lampiran.
- Salinan
11 lembar

689. Menteri Perburuhan dan Sosial: Surat Keputusan No. 3 K/tahun 1949 tgl. 1 Oktober 1949 tentang penunjukan beberapa pegawai Menteri Perburuhan dan Sosial yang diberi kuasa kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan serta peraturan yang mengenai masalah tersebut.
- Salinan
4 lembar
690. Menteri Perburuhan dan Sosial: Surat Keputusan No. 1463/K.U.2/5 tgl. 18 November 1949 tentang penggantian I. Soepomo, Kepala Kantor Pusat Jawatan Perburuhan dengan Abdul Gani, Penata Usaha pada Kantor Penempatan Tenaga Pusat untuk duduk dalam Panitia Penerimaan bekas tawanan.
- Salinan
1 lembar
691. Menteri Keuangan: Surat Keputusan No. PKK-893 tgl. 1 Desember 1949 tentang penunjukan beberapa pegawai Kementerian Keuangan untuk mengadakan peninjauan pekerjaan dan susunan Departement van Financien di Jakarta.
- Kutipan
1 lembar
692. Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan: Surat Keputusan No. P/13 tgl. 15 Juni 1949 tentang pengangkatan-pengangkatan sebagai Koordinator Kementerian-kementerian golongan Politis, golongan Teknis dan golongan ekonomis.
- Salinan
5 lembar
693. Menteri Negara RI: Maklumat No. S/2 tahun 1949 tgl. 27 Mei 1949 tentang kedudukan pegawai, disertai lampiran.
- Konsep, salinan
7 lembar
694. Menteri Negara RI: Maklumat No. S/3 tahun 1949 tgl. 30 Mei 1949 tentang kebijaksanaan dalam politik pegawai.
- Salinan
5 lembar
695. Menteri Dalam Negeri: Pengumuman No. 1 tgl. Oktober 1945 tentang pengangkatan Soekamto menjadi Kepala Bagian Keamanan dalam Kementerian Dalam Negeri.
- Fisik arsip tidak ada**
696. Territorial Commando Jawa Timur: Pengumuman No. 50/Pb/SP tgl. 27 November 1947 tentang Jenderal Mayor Soekarnen tidak lagi berhubungan dan berkedudukan dengan Divisi Penggempur.
- Salinan
1 lembar
697. Kantor Urusan Pegawai Negeri: Surat Edaran No. 2036/A tgl. 11 November 1949 tentang pengangkatan pegawai.
- Salinan

- 1 lembar
698. Markas Besar Komando Jawa: Maklumat No. 27 tgl. 22 Juli 1949 tentang anggota APRI, pegawai, mobiliseerden yang meninggalkan pos tugasnya.
Salinan
1 lembar
699. Corps Polisi Militer Jawa: Mutasi Order No. 326/MO/PMD tgl. 21 November 1949 tentang pengangkatan Kapten Piet Soendoro, perwira pertama CPM Jawa Kementerian Pertahanan sebagai perwira yang diperbantukan pada menteri pertahanan.
Tembusan
1 lembar
700. Kepala Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan: Surat Keputusan No. 180/1/Djw tgl. 16 Agustus 1948 tentang pemberhentian Ainia Dullah dari jabatannya sebagai pegawai rendah tingkat I bagian keuangan (pembukuan sentral) di kantor pusat DPPBM.
Salinan
1 lembar
701. Kepala Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan: Surat Keputusan No. 227//Djw tgl. 30 November 1948 tentang pencabutan kembali Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. E/885 tgl. 28 September 1948 dan penunjukan pegawai PPBM yang berhak memberi ijin kepada pedagang-pedagang untuk mempunyai atau menyimpan bahan makanan, disertai lampiran.
Konsep
5 lembar
702. Kepala Bagian Kesehatan Kementerian Kesehatan: Surat Keputusan tgl. 29 Oktober 1948 tentang pembebasan Dr. Djoko Salamoen sebagai dokter tentara.
Fisik arsip tidak ada
703. Badan Hotel Negara dan Tourisme: Surat Keputusan No. 106/TU/38/48 tgl. 11 September 1948 tentang penggantian pimpinan.
N.B. Kertas rusak berat
Salinan
1 lembar
704. Sumpah Pegawai Negeri Republik Indonesia, tanpa tanggal.
Konsep
1 lembar
705. Gubernur Sumatra kepada Presiden: Telegram tanpa tanggal tentang pengiriman pengganti inspektur keuangan di Medan.
Salinan
1 lembar
706. Dewan Kementerian: Tafsiran Perinta Presiden kepada segenap pegawai RI tgl. 10 September 1945.
Konsep

- 3 lembar
707. Catatan singkat tgl. 25 Oktober 1945 No. 23 tentang pengangkatan para residen dan walikota seluruh Sumatra.
- Salinan
1 lembar
708. Menteri Keuangan kepada pembantu-pembantu bendahara negara untuk diteruskan kepada semua pembuat daftar gaji: Surat tgl. 26 Oktober 1946 tentang pembayaran gaji menurut Maklumat No. 17.
- Salinan
2 lembar
709. Menteri Keuangan: Surat-surat tgl. 4 Februari 1947 tentang panitia penyelenggara formasi dan koordinasi pegawai negeri dan pembubaran panitia perancang peraturan gaji pegawai negeri, disertai lampiran.
- Asli
8 lembar
710. Menteri Pertahanan kepada Presiden: Surat tgl. 5 Mei 1947 tentang permintaan Kol. Didi Kartasmita supaya diberhentikan sebagai opsir tentara.
- Asli
2 lembar
711. Telegram tgl. 3 November 1947 tentang pengangkatan Mas Rukadi Wiryaharja sebagai residen Lampung.
- Salinan
6 lembar
712. Presiden kepada panglima besar: Surat tgl. 26 Februari 1948 tentang rencana pengangkatan Jenderal Mayor Nasution sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil.
- Konsep
3 lembar
713. Telegram No. 267/S/del tgl. 23 Maret 1948 tentang pegawai daerah pendudukan.
- Tembusan
1 lembar
714. Setneg kepada Mr. Surjotjondro : Telegram No. 476/K-48 tgl. 23 Maret 1948 tentang permohonan pemberitahuan jumlah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama yang masih tinggal di daerah pendudukan Belanda.
- Konsep
1 lembar
715. Kementerian Persediaan Makanan Rakyat kepada Setneg: Surat tgl. 7 Mei 1948 tentang formasi Kementerian Persediaan Makanan Rakyat, disertai lampiran.
- Asli
4 lembar

716. Gedelegerde APRI di Kementerian Pembangunan/Pemuda kepada Menteri Pembangunan/Pemuda: Surat tgl. 21 Mei 1948 tentang usul agar kementerian lain membantu meringankan beban penerimaan Angkatan Perang.
Tembusan
2 lembar
717. Wakil Panglima Besar kepada Presiden: Surat tgl. 28 Mei 1948 tentang pengangkatan Letkol Santoso sebagai kolonel, disertai surat pengantar.
Salinan
2 lembar
718. Presiden kepada Letjen Oerip Soemohardjo: Surat tgl. 30 Mei 1948 tentang penolakan permohonan pengunduran diri dari kalangan militer.
Konsep
1 lembar
719. Surat-surat dan telegram tgl. 15 Oktober 1947-31 Mei 1948 tentang pengangkatan anggota mahkamah tentara.
Asli, salinan
7 lembar
720. Mantoro Tirtonegoro kepada Presiden/Pati Angkatan Perang: Surat tgl. 12 Juli 1948 tentang pengangkatan kepala perlengkapan Angkatan Perang.
N.B. Rusak berat
Asli
1 lembar
721. Menteri Kemakmuran kepada Wakil Presiden: Surat tgl. 10 Agustus 1948 tentang pengusulan pemberhentian A.K. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kemakmuran dan mengusulan Ir. Gunung Iskandar sebagai penggantinya.
Tembusan
2 lembar
722. Menteri Kehakiman kepada Presiden: Surat tgl. 6 Oktober 1948 tentang pengangkatan ketua, wakil ketua, anggota dan wakil anggota kantor Pemilihan Pusat, disertai lampiran.
N.B. Rusak berat
Asli
5 lembar
723. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan kepada Setneg: Surat tgl. 11 Oktober 1948 tentang permohonan tanda tangan Presiden untuk surat keputusan pemberhentian Kol. R. Soemarno, disertai lampiran.
Asli
2 lembar
724. Kementerian Perburuahan dan Sosial: Surat tgl. 8 Agustus 1949 tentang pemberian sokongan untuk pegawai negeri di luar daerah Jogjakarta.
Asli
1 lembar

725. Wakil Ketua Panitia Pegawai RI di N. St. Iskandar kepada Presiden: Surat tgl. 11 Agustus 1949 tentang masalah nasib pegawai negeri di Jakarta.
Asli
2 lembar
726. Sekjen Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Ketua Delegasi RI di Jakarta: Surat tgl. 3 September 1949 tentang pengangkatan R. Soegarda Poerbakawatja, inspektur umum diperbantukan kepada menteri PP&K sebagai wakil Kementerian PP&K menjadi penasehat pada panitia pelaksanaan pasal 7.
Tembusan
1 lembar
727. Permintaan izin untuk mengangkat seorang ahli bahasa asing sebagai apoteker.
Asli
2 lembar
728. KUP Negeri: Surat tgl. 16 September 1949 tentang penghapusan jabatan penasehat dan jabatan istimewa lainnya.
Asli
1 lembar
729. KUP Negeri: Surat tgl. 29 September 1949 tentang kedudukan bekas pegawai yang diterima kembali setelah pemeriksaan baik menurut peraturan 4/S/1949 atau PP No. 6/1949.
Asli
1 lembar
730. Menteri Penerangan kepada acting PMRI Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Surat tgl. 4 Oktober 1949 tentang penyerahan tugas acting PMRI selama di luar negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Roeslan Abdul Gani.
Tembusan
2 lembar
731. Sekjen Kementerian Pertahanan kepada Setneg: Surat tgl. 12 Oktober 1949 tentang pemberitahuan pemberhentian dengan hormat Moeridan Noto dari keanggotaan Angkatan Perang, disertai lampiran.
Asli
2 lembar
732. Surat-surat dan telegram tgl. 19 Maret 1948-14 Oktober 1949 tentang panggilan pegawai kementerian-kementerian yang berada di luar Jogjakarta.
1 sampul
733. R.M. Sosrosudarmo, pegawai istana di Jogjakarta kepada Presiden: Surat tgl. 25 Oktober 1949 tentang permohonan persamaan hak pegawai, kerajaan-kerajaan Jawa yang sudah tunduk pada pemerintah RI dengan pegawai negeri.
Asli
3 lembar

734. Setneg kepada Syafrudin Prawiranegara: Telegram tgl. 19 Desember 1949 tentang penunjukan sebagai menteri keuangan RIS, disertai surat pengantar.

Pertinggal
2 lembar

G. KESEJAHTERAAN RAKYAT

735. Undang-undang No. 33 tgl. 18 Oktober 1947 tentang pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan.

Konsep
1 sampul

736. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 2 tahun 1948 tentang peraturan kecelakaan tahun 1947, disertai penjelasannya.

Stensilan
1 sampul

737. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 3/S.D tgl. 22 Januari 1946 tentang urusan pengadaan undian uang dimasukkan dalam lingkungan pekerjaan Departemen Sosial.

Konsep
1 lembar

738. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 5 tgl. 9 Oktober 1948 tentang pembentukan Panitia Penyerahan Kayu Bakar di tiap karesidenan yang dianggap perlu memiliki.

Konsep
2 lembar

739. Presiden RI kepada Gubernur Militer Surakarta dan Residen Surakarta: Instruksi Presiden No. 1 tgl. 1 April 1948 tentang pembersihan di Surakarta.

Konsep
1 lembar

740. Presiden RI kepada Kepala-kepala Pemerintahan Daerah di Indonesia: Surat Perintah Presiden No. 9 tgl. 9 Oktober 1945 untuk membagi-bagikan bahan pakaian kepada rakyat jelata.

Konsep
2 lembar

741. Presiden RI: Surat Perintah tgl. 7 Juli 1946 tentang pengadaan satu kereta api penumpang dari Cikampek ke Jakarta dan sebaliknya untuk pegawai negeri RI dan satu kereta barang dari Cikampek ke Jakarta pulang pergi.

Konsep
2 lembar

742. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Komandan Militer Kota Jogjakarta: Surat Perintah No. 14/P.T./48 tgl. 20 September 1948 tentang perintah untuk memberikan bensin kepada mobil.

Konsep
1 lembar

743. Menteri Perburuahan dan Sosial: Peraturan tanpa nomor tgl. 18 Juli 1949 tentang pemberian sokongan pengangguran dalam masa peralihan.
Salinan
2 lembar
744. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V Jawa: Peraturan No. 12/GM/1949 tgl. 3 September 1949 tentang lalu lintas Coridor Tenpel dan lapangan terbang Maguwo.
Salinan
1 lembar
745. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V di Jawa: Peraturan No. 19/GM/1949 tgl. 29 Oktober 1949 tentang peraturan pengairan daerah Istimewa Jogjakarta.
Salinan
7 lembar
746. Menteri Kesehatan: Surat-surat Keputusan No. 35/peg/j, 36/peg/j tgl. 7 Oktober 1948 dan 11 Oktober 1948 tentang panitia Kina.
6 lembar
747. Menteri Perhubungan: Surat Keputusan No. 6/K.P./48 tgl. 14 Oktober 1949 tentang perintah untuk membagikan kendaraan bermotor yang telah diterima Kepala Jawatan Angkatan Motor RI.
Tembusan
1 lembar
748. Gubernur Maluku kepada Presiden: Surat tgl. 20 Maret 1947 tentang keadaan keluarga Maluku yang tertimpa kelaparan di dalam rumah-rumah perlindungan di Malang, disertai lampiran.
Asli
14 lembar
749. Setneg kepada Suryocondro: Telegram tgl. 12 Februari 1948 tentang penyuntikan cacar di Sumatera.
Pertinggal
1 lembar
750. Telegram-telegram tgl. 28 Juni 1948 dan 29 Juni 1948 tentang menggiatkan olah raga.
Pertinggal
3 lembar
751. Telegram-telegram tgl. 20 April 1948-27 Juli 1948 tentang urusan kesehatan.
Tembusan
6 lembar
752. Suryocondro kepada Sekpermen: Telegram No. 650/12/48 tgl. 30 Juli 1948 tentang pengoperan anak yatim.
tembusan
2 lembar

753. Menteri Persediaan Makanan Rakyat: Laporan antara 17 Agustus 1947-17 Agustus 1948 tgl. 2 Agustus 1948 tentang usaha-usaha pengumpulan bahan-bahan makanan rakyat.
Tembusan
2 lembar
754. Kementerian Keuangan, Perburuhan dan Sosial: Surat tgl. 15 Juli 1949 tentang pemberian uang duka.
Pertinggal
1 lembar
755. Nyonya S. Gondowardjojo di Magetan kepada Pringgodigdo: Surat tgl. 20 Juli 1949 tentang keadaan yang amat memprihatinkan di daerah pendudukan, disertai lampiran.
Asli
2 lembar
756. Wakil Politik NTT kepada Setneg: Surat tgl. 24 Juli 1949 tentang pembagian barang-barang sumbangan NIT kepada penduduk.
Asli
1 lembar
757. Kementerian Perburuhan dan Sosial kepada Setneg: Surat tgl. 9 September 1949 tentang penderitaan Kusbini karena menderita penyakit paru-paru, disertai lampiran.
Asli
9 lembar
758. Kementerian Perburuhan dan Sosial kepada Harjoatmojo R.M. di jalan Pugeran md 5/103 di Jogjakarta: Surat tgl. 19 September 1949 tentang permohonan pakaian.
Tembusan
1 lembar
759. Surat-surat tgl. 25 Agustus 1949-23 September 1949 tentang sumbangan dari masyarakat untuk pembangunan Jogjakarta.
Asli
9 lembar
760. Soetan Bagindo di Loehak Agam Minangkabau: Surat tgl. 24 September 1949 tentang permohonan diperhatikan nasibnya, disertai surat pengantar.
Asli
2 lembar
761. Mohd. Sarnupi di Jogjakarta kepada Presiden: Surat tgl. 28 September 1949 tentang keadaan rumah No. 22 Verp.n. 105 Wongsodirdjan R.T.N.: 11 M.P.P. Gedung Tengen Jogjakarta.
Konsep
1 lembar
762. Dewan Pusat Persatuan Invaliden Indonesia kepada Presiden: Surat tgl. 5 Oktober 1959 tentang permohonan bantuan untuk para invaliden di daerah Surakarta.

- Asli
2 lembar
763. Kementerian Perburuhan dan Sosial: Surat-surat tgl. 20 September 1949 dan 26 Oktober 1948 tentang sumbangan pakaian dari NIT, disertai lampiran.
Pertinggal
5 lembar
764. Menteri Kesehatan a.i. kepada Presiden: Surat tgl. 2 November 1949 tentang permohonan izin bagi semi-artsen dan Doctorandi dari Perguruan Tinggi Kodekteran untuk dapat menjalankan pekerjaan di lapangan kedokteran di bawah pengawasan dokter disebabkan kurangnya tenaga dokter, disertai lampiran.
Asli
2 lembar
765. Surat-surat tgl. 1 Agustus 1949-7 November 1949 tentang pemberian sokongan untuk korban musibah.
Tembusan
13 lembar
766. Surat-surat tgl. 17 Agustus 1949-30 November 1949 tentang sumbangan untuk pembangunan RI.
Tembusan
11 lembar
767. Gabungan Patriot Indonesia (GPI) cabang Surakarta kepada Presiden: Surat-surat tgl. Desember 1949 tentang masalah kesejahteraan buruh.
Asli
5 lembar

H. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

768. Rancangan Undang-undang tanpa nomor tahun 1948 tentang penyesuaian harga padi yang dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan pajak bumi dengan keadaan baru, disertai penjelasannya.
N.B. Penjelasan tidak lengkap
Konsep
4 lembar
769. Undang-undang tanpa nomor tahun 1948 tentang perusahaan-perusahaan negara.
Konsep
5 lembar
770. Undang-undang No. 29 tgl. 3 September 1949 tentang penimbunan barang penting.
1 sampul
771. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan tanpa nomor tahun 1946 tentang perusahaan tambang.
Konsep
1 lembar

772. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 3 tgl. 21 Mei 1946 tentang perusahaan gula.
Konsep
5 lembar
773. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 4 tgl. 6 Juni 1946 tentang perusahaan perkebunan, disertai penjelasannya.
Konsep
7 lembar
774. Pemerintah RI Jogjakarta: Rencana peraturan tanpa nomor tahun 1948 tentang pencegahan kenaikan harga bahan-bahan keperluan sehari-hari.
Konsep
2 lembar
775. Wakil Sekretaris Negara kepada Wakil Presiden: Surat tgl. 15 Maret 1948 tentang permohonan persetujuan rencana peraturan pemerintah mengenai Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan RI, disertai lampiran.
Pertinggal
1 sampul
776. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 13 tgl. 12 Juni 1948 tentang jaminan tersedianya tanah-tanah oleh kelurahan-kelurahan guna perusahaan-perusahaan pertanian dalam Daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta.
Stensilan
1 sampul
777. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 20 tgl. 3 September 1948 tentang syarat-syarat untuk mendapat izin menimbun barang-barang penting bagi pedagang, disertai penjelasannya.
Stensilan
1 sampul
778. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 46 tgl. 9 Oktober 1948 tentang larangan terhadap penyimpanan minyak bensin.
5 lembar
779. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 54 tgl. 28 Oktober 1948 tentang pembatasan harga barang-barang.
Konsep, stensilan
14 lembar
780. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan-peraturan tgl. 9 November 1948 tentang pembatasan pengeluaran bahan makanan ternak.
12 lembar
781. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan-peraturan tgl. 9 November 1948 tentang militerisasi perusahaan-perusahaan.
Salinan
18 lembar

782. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 68 tgl. 18 November 1948 tentang perubahan pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 29 tahun 1948 mengenai penimbunan barang penting.
Konsep, stensilan
7 lembar
783. Wakil Perdana Menteri RI: Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 Oktober 1949 tentang penjualan barang-barang impor yang ada di bawah pengawasan pemerintah di Sumatera Utara.
Salinan
4 lembar
784. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 1/OEM tgl. 18 April 1946 tentang penempatan semua perusahaan percetakan di kota Solo berada di bawah pengawasan pemerintah.
Salinan, duplikat
2 lembar
785. Menteri Kemakmuran: Peraturan No. 9 tgl. 6 Desember 1946 tentang penentuan barang-barang penting.
Konsep
1 lembar
786. Menteri Pembangunan dan Pemuda: Surat Keputusan No. 2643/I tgl. 24 Mei 1948 tentang pembentukan jawatan pembangun perusahaan, disertai lampiran dan surat pengantar.
Asli
9 lembar
787. Menteri Muda Kemakmuran: Surat Keputusan No. 1703/T.O/Jo tgl. 29 Desember 1947 tentang pembentukan Kantor Penjualan Gula (KPG) yang dikuasai oleh BPPGM.
Stensilan
1 lembar
788. Menteri Keuangan: Maklumat No. 2 tgl. 13 Februari 1947 tentang penetapan harga garam dan candu.
Salinan
2 lembar
789. Kepala Pejabat Bea dan Cukai: Penetapan No. TT.1/2/3b tgl. 16 Juli 1948 tentang harga rokok.
Salinan
1 lembar
790. Kepala Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan: Surat Keputusan tahun 1948 tentang peraturan pemberian uang muka dan pembayaran harga bahan makanan, disertai penjelasannya.
Konsep
2 lembar
791. Skema dan daftar mengenai perdagangan beras di Jawa.
N.B.: Kertas rusak dan tanpa tanggal.

- Salinan
2 lembar
792. Badan Tekstil Negara: Grafik, skema, dan daftar Badan Tekstil Negara.
N.B.: Tanpa tanggal
- Salinan
16 lembar
793. Preambule tentang maksud dan kedudukan American Indonesian Corporation dalam pemerintahan, disertai struktur organisasinya.
N.B.: Tanpa tanggal
- Konsep
4 lembar
794. Soedarsono kepada Presiden: Telegram mengenai kegiatan ekspor dan impor setelah merdeka.
N.B.: Tanpa tanggal dan dalam bahasa Inggris
- Stensilan
1 eksemplar
795. Laporan tgl. 17 Agustus 1946 tentang keadaan perekonomian negara.
N.B.: Tidak lengkap
- Stensilan
1 sampul
796. Presiden kepada Jenderal Mayor Soedibjo: Surat tgl. 20 Desember 1946 tentang pengiriman 800 ton gula pasir luar negeri tidak dengan izin Dewan Pertahanan Negara.
- Asli
15 lembar
797. Daerah XIX: Laporan-laporan tgl. 31 Desember 1946 tentang peredaran ORI dan keadaan harga-harga barang di pasaran daerah Malang.
- Konsep
4 lembar
798. Dr. Soemitro Djojohadikusumo: Laporan tgl. 29 September 1947 tentang perdagangan Amerika Serikat.
- Salinan
8 lembar
799. Suryocondro kepada Setneg: Telegram tgl. 5 Maret 1948 tentang perundingan dengan India mengenai padi.
- Salinan
1 lembar
800. Telegram-telegram tgl. 4 Maret 1948 dan 6 Maret 1948 tentang kedatangan Oetiongih dan Yapcieling ke Jogja meninjau perusahaannya.
- Pertinggal
3 lembar
801. Setneg kepada Suryocondro: Telegram tgl. 7 Maret 1948 tentang perundingan soal gula untuk bantuan.

- Pertinggal
2 lembar
802. Setneg kepada Suryocondro: Telegram No. 474/K-48 tgl. 23 Maret 1948 tentang pengusulan anggota-anggota Panitia Pengembalian Milik Asing.
Konsep
1 lembar
803. Sarekat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI): Mosi tgl. 24 April 1948 tentang menasionalisasi percetakan milik bangsa asing.
Asli
1 lembar
804. Ir. Juanda kepada Setneg: Telegram No. 656/S/del tgl. 17 Juni 1948 tentang permohonan untuk dapat datang ke Jogja Sostrorawito untuk kepentingan penukaran gula.
Tembusan
1 lembar
805. Mochtar kepada Setneg: Telegram tgl. 28 Juni 1948 tentang perundingan perdagangan.
N.B.: Dalam bahasa Inggris
Salinan
1 lembar
806. Setneg dengan Perusahaan Tambang Minyak Daerah Jawa Tengah Surakarta: Surat-menyurat tgl. 3 Agustus 1948 dan 16 Agustus 1948 tentang permohonan izin membeli parafine dan minyak tanah dari Kantor Pusat Minyak di Jogjakarta.
Asli, pertinggal
2 lembar
807. Komisi Orientasi Perekonomian kepada Gubernur Jawa Tengah dan Timur, Kepala Jawatan-Jawatan Pusat, Kepala Jawatan-Jawatan Daerah: Surat tgl. 11 September 1948 tentang rencana penyelenggaraan peninjauan perekonomian.
Fisik arsip tidak ada
808. Telegram-telegram tgl. 19 Mei 1948-15 Oktober 1948 tentang perdagangan dengan luar negeri.
6 lembar
809. Lubeck, Roeckstr, 52 a British Zone/Germany Deutsland kepada Kementerian Kemakmuran: Surat tgl. 9 Juli 1949 tentang kerja sama dalam bidang industri, perkayuan, dan timah.
N.B.: Dalam bahasa Inggris
Salinan
2 lembar
810. Lie eng Hok kepada Presiden RI di Semarang: Surat tgl. 15 Agustus 1949 tentang permohonan membuka cabang Toko Malta di Jogjakarta.
Asli
1 lembar

811. Kantor Teknik Djasa Baik di Jakarta kepada Sekretaris Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan di Jogja: Surat tgl. 24 Agustus 1949 tentang keinginan memasukkan barang-barang teknik dan mengerjakan ke Jogja, disertai lampiran.
Tembusan
4 lembar
812. Direktur Percetakan Advertantie dan Reclame Bureau Hidangan Rochani di Jakarta kepada Setneg: Surat tgl. 14 November 1949 tentang permohonan pengakuan untuk percetakan Adv. Dan Reclame Bureau Hidangan Rochani.
Asli
1 lembar
813. Ketua Umum K.V. Sibualbuali di Jogja kepada Palar, Wakil RI di PBB: Surat tgl. 17 November 1949 tentang permohonan diberi kuasa untuk bertanggungjawab menyiapkan alat-alat tulis untuk sekolah-sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
Tembusan
2 lembar

I. HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

814. Undang-undang No. 10 tgl. 14 Desember 1949 tentang pengesahan induk persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada RIS.
Stensilan
5 lembar
815. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan No. 2/R tgl. 27 Oktober 1947 tentang pembentukan panitia penerimaan anggota Komisi Tiga Negara, disertai surat pengantar.
Konsep
4 lembar
816. Presiden RI: Penetapan No. 14 tgl. 12 November 1947 tentang pembentukan panitia istimewa guna pelaksanaan perintah penghentian permusuhan dari Dewan Keamanan dan pengangkatan sebagai anggota panitia istimewa tersebut.
6 lembar
817. Presiden RI: Penetapan-penetapan tgl. 29 April-2 Desember 1947 tentang pembubaran delegasi Indonesia dan pembentukan delegasi Indonesia baru.
1 sampul
818. Presiden RI: Penetapan-penetapan No. 2, No. 6 tgl. 2 dan 5 Februari 1948 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan ketua, wakil ketua, anggota, dan anggota cadangan delegasi Indonesia.
5 lembar
819. Presiden RI: Penetapan-penetapan No. 1/R, No. 5, No. 10 tgl. 21 Maret 1947-3 Maret 1948 tentang pembentukan panitia penerimaan Goodwill Mission Negara Indonesia Timur.

5 lembar

820. Presiden RI: Penetapan No. 19 tgl. 14 September 1948 tentang penghasilan ketua, wakil ketua, dan para anggota delegasi Republik Indonesia.

3 lembar

821. Presiden RI: Penetapan No. 20 tgl. September 1948 tentang pemberian kuasa kepada ketua delegasi RI untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai negeri pada Sekretariat Delegasi RI, pengangkatan dan pemberhentian Dirjen Delegasi RI dilakukan oleh presiden.

Konsep

1 lembar

822. Presiden RI: Penetapan tgl. 1 Mei 1949 tentang pemberian tugas kekuasaan kepada Menteri Negara Koordinator Keamanan Hamengku Buwono IX untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya baik sipil dan militer atas DI Jogjakarta dari tangan Belanda dan pengembalian pemerintah RI di Jogjakarta.

Konsep

2 lembar

823. Presiden RI: Surat Keputusan No. 62/P.Civ./48 tgl. 14 Juli 1948 tentang pembubaran delegasi Indonesia untuk konperensi di Havana.

Konsep

1 lembar

824. Presiden RI: Surat Keputusan No. 5/A./49 tgl. 30 Juli 1949 tentang pengangkatan Mr. Tan Po Goan sebagai ahli dari delegasi RI ke Konperensi Meja Bundar.

Konsep

1 lembar

825. Presiden RI: Surat-surat keputusan tgl. 25 Juli-15 November 1949 tentang pengangkatan ketua, anggota, penasehat umum, dan sekretaris delegasi Indonesia.

Salinan

8 lembar

826. Presiden RI: Surat Keputusan No. 22/P/49 tgl. 25 Desember 1949 tentang pembubaran delegasi RI.

Salinan

2 lembar

827. Presiden RI/PATI kepada Kepala Kepolisian Negara dan Panglima Polisi Tentara: Surat Perintah No. 7/P.T./48 tgl. 8 April 1948 tentang keamanan di Kaliurang dan sekitarnya sehubungan dengan perundingan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda.

Pertinggal

1 lembar

828. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Jenderal Mayor Dr. Moetopo: Surat Perintah No. 10/P.T./48 tgl. 28 April 1948 tentang pemberian penjelasan kepada Dr. J. Leimena mengenai tuduhan Belanda adanya infiltrasi dari pihak Indonesia.

Konsep
2 lembar

829. Menteri Negara RI: Surat Keputusan No. P/3 tgl. 24 Mei 1949 tentang penunjukan Soerono, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI untuk menerima penyerahan kembali segala urusan kesehatan dari pihak Pemerintah Pendudukan Belanda di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Salinan
5 lembar

830. Menteri Kesehatan RI: Pengumuman No. 1/3 tgl. 13 Juni 1949 tentang pengusiran kurang lebih 100 orang pegawai RI dan orang-orang partikuler bersama keluarganya, di antaranya Ir. Saksono, eks Menteri Muda Pertanian dan Persediaan dalam Kabinet Sjahrir, Mr. Tjokroadisoemarto, dan Mr. Soedibjo oleh Belanda dari Magelang ke Jogjakarta.

Konsep
3 lembar

831. Presiden RI: Surat Penunjukan tgl. 20 Desember 1949 tentang penunjukan Drs. Mohammad Hatta, Sultan Hamid II, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusumaatmadja, Dr. Soekiman, Mr. Sujono Hadinoto, Ruslan Batangtaris, Arifin, Jusuf Barnas sebagai delegasi RIS untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Negeri Belanda.

Fisik arsip tidak ada

832. Struktur Sekretariat Delegasi Indonesia.

Konsep
3 lembar

833. Kementerian Penerangan, Dinas Propinsi Jawa Timur: Usul Compromis KTN.

N.B.: Tidak lengkap

Salinan
2 lembar

834. Kementerian Pertahanan, bagian B: Surat tgl. 24 Desember 1946 tentang ikhtisar ringkas aksi menolak persetujuan Indonesia-Belanda, disertai lampiran.

Asli
9 lembar

835. Laporan tahun 1947 tentang sepak terjang Belanda di daerah pendudukan.

N.B.: Tidak lengkap

Fisik arsip tidak ada

836. Wakil Setneg kepada Markas Besar Polisi Tentara dan Kepala Polisi Negara Purwokerto: Surat tgl. 3 Maret 1947 tentang pembentukan Barisan Cakra di Surabaya oleh pihak Belanda, disertai lampiran.

Fisik arsip tidak ada

837. Catatan singkat perjalanan Delegasi Indonesia ke India bulan Maret-April 1947.
Konsep
1 sampul
838. Laporan tgl. 5 September 1947 tentang Sudiman yang ditangkap Belanda di Semarang.
N.B.: Sebagian dalam bahasa Belanda
Salinan
3 lembar
839. Dr. Abu Hanifah, wakil Masyumi dan Ketua Delegasi Indonesia: Laporan tgl. 3 November 1947 tentang perjalanan ke Konferensi di New Delhi.
Salinan
5 lembar
840. Usulan tgl. 5 Maret tentang pemerintah Interim Negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia-Belanda.
N.B.: Dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda
Salinan
1 sampul
841. Suryocondro kepada Setneg: Telegram tgl. 8 Maret 1948 tentang keputusan hubungan Indonesia-Belanda yang ditandatangani tgl. 1 Maret 1948.
Tembusan
1 sampul
842. Kementerian Penerangan, Sekretaris Jenderal kepada Presiden RI: Surat-surat tgl. 2 Maret-7 April 1948 tentang protesnya pihak Belanda tentang siaran radio Gelora Pemuda, disertai lampiran.
N.B.: Dalam bahasa Inggris dan Indonesia
Asli
5 lembar
843. Sarpan dari PNI, anggota Komite Nasional Pusat kepada Presiden RI: Surat tgl. 7 April 1948 tentang usul mengangkat seorang ahli bea cukai sebagai Penasehat Delegasi RI dalam perundingan dengan pihak Belanda.
Fisik arsip tidak ada
844. Surat-surat tgl. 29 Januari 1947-21 Mei 1948 tentang usul cara-cara melawan ofensif Belanda.
Asli
2 lembar
845. Setneg kepada Suryocondro: Telegram No. 998/K-48 tgl. 24 Mei 1948 tentang belum dapat berangkatnya Then Djin Soei Tankinghien ke Amsterdam.
Fisik arsip tidak ada
846. Setneg kepada Suryocondro: Telegram-telegram tgl. 12 dan 14 Juni 1948 tentang hubungan Konsulat Kementerian Pembangunan dan Pemuda dengan Mr. Go Gien Cwan Amsterdam, disertai surat pengantar.
Pertinggal
5 lembar

847. Wakil Setneg kepada Sekretariat Perdana Menteri, Sekretariat Delegasi Indonesia dan Kementerian Luar Negeri: Surat tgl. 6 September 1948 tentang Resolusi Demonstrasi Rakyat dipimpin oleh Dewan Pemimpin Pemuda dan diberikan untuk KTN, disertai surat pengantar.
Pertinggal
3 lembar
848. Surat-surat dan telegram-telegram tgl. 10 Februari-27 November 1948 tentang perluasan penggunaan pesawat terbang yang digunakan untuk kepentingan Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda, disertai lampiran.
1 sampul
849. S.B. Ratu Yuliana: Pidato tgl. 6 Januari 1949 tentang masalah Indonesia-Belanda.
Salinan
2 lembar
850. Dewan Keamanan: Resolusi tgl. 28 Januari 1949 tentang masalah Indonesia dengan Belanda.
Salinan
5 lembar
851. Sudarsono kepada Presiden: Telegram tgl. 4 Februari 1949 tentang Konsepsi Kedaulatan Negara RIS.
Salinan
1 lembar
852. Laporan-laporan atas penyiksaan yang dilakukan oleh MID (Militaire Inlichtingen Dienst) gerombolan Militair Belanda.
N.B.: Dalam bahasa Indonesia dan Belanda
Salinan
10 lembar
853. Keterangan van Royen-Roem tgl. 7 Mei 1949 tentang perundingan Indonesia-Belanda.
Salinan
3 lembar
854. Rakyat Kota Pendudukan Surakarta kepada Presiden: Surat tgl. Juni 1949 tentang dukungannya terhadap tercapainya persetujuannya preliminair antara delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda pada tgl. 7 Mei 1949 di Jakarta, disertai lampiran.
Asli
1 sampul
855. Konperensi Inter Indonesia antara Delegasi RI dan Delegasi BFO: Laporan-laporan tgl. 21 dan 22 Juli 1949 dari Panitia Ketatanegaraan, Panitia Ekonomi dan Keuangan dan Panitia Keamanan, disertai surat pengantar.
Stensilan
17 lembar

856. Wakil Party Kemerdekaan Indonesia Irian Dalam (GAPKI): Resolusi-resolusi tgl. 23 Februari 1948-8 Agustus 1949 tentang penempatan wakil rakyat Niuew Guinea asli sebagai staf pada Delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Salinan
1 sampul
857. Telegram-telegram tgl. 6-26 Agustus 1949 tentang pemanggilan Mr. Rasyid datang ke Jogja, disertai surat pengantar.
Salinan
4 lembar
858. Telegram-telegram tgl. 1 Maret 1948-27 Agustus 1949 tentang perundingan Indonesia dengan Belanda.
7 lembar
859. Panitia Keuangan dan Perekonomian: Laporan tgl. 3 September 1949 tentang hasil rapat keuangan dan perekonomian antara Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian Delegasi Indonesia, Belanda, dan BFO, disertai surat pengantar.
Asli
16 lembar
860. Wakil Presiden kepada Presiden dan Menteri Pertahanan: Surat tgl. 12 September 1949 tentang kedudukan daerah Surakarta dan Mangkunegaran.
Salinan
1 lembar
861. PB Nahdlatul Ulama: Pedoman tgl. 14 September 1949 tentang pendapat mengenai Persetujuan Roem-Royen, disertai penjelasan.
Stensilan
5 lembar
862. Panitia Kebudayaan Delegasi Indonesia (Uni Indonesia Nederland): Laporan-laporan pekerjaan ke Konferensi Meja Bundar dari tgl. 21 Agustus-26 September 1949, disertai surat pengantar.
Asli, konsep
1 sampul
863. Masyumi: Statement tgl. 6 Oktober 1949 tentang pelaksanaan Roem-Royen.
Stensilan
2 lembar
864. Delegasi Pemerintah RI, UNCI, Presiden RI dari bekas tawanan dari Jogjakarta: Surat tgl. 9 Oktober 1949 tentang permohonan agar Delegasi Pemerintah RI dan UNCI mendesak Delegasi Pemerintah Nederland untuk melaksanakan rencana pembebasan tawanan.
Tembusan
1 lembar
865. Setneg kepada Mr. Tirtawinata, Ketua Panitia Tawanan Politik di Jogja: Surat tgl. 5 November 1949 tentang Zainudin yang ditawan Belanda di Bukit Tinggi.

Pertinggal
7 lembar

866. Organisasi Massa: Surat-surat tgl. 25 Juli-22 November 1949 tentang reaksi masyarakat berkenaan dengan persetujuan Roem-Royen.
Asli
1 sampul
867. Surat-surat, kawat-kawat dan nota tgl. 6 Februari 1948-26 November 1949 tentang perundingan Delegasi RI dengan pihak Belanda.
N.B.: Dalam bahasa Indonesia, Inggris, Belanda
1 sampul
868. Chaidir Kimin cs. di Jln. Simpang Kapuk No. 56 Jambi: Laporan tgl. 7 Desember 1949 tentang menyabot politik "Dewan Djambi Sementara (DDS)" di kota Jambi dalam pendudukan Belanda.
Asli
2 lembar
869. Menteri Kehakiman: Surat-menyurat tgl. 30 November-8 Desember 1949 tentang Pemandangan Umum Rakyat Sumatera Timur sebelum dan sesudah diduduki Belanda, disertai lampiran.
Asli
9 lembar

J. KEAMANAN DALAM NEGERI

870. Undang-undang tgl. 8 Oktober 1945 tentang pengibaran Bendera Nasional Chunghoa Min Kuo di samping Sang Merah Putih pada tiap-tiap hari raya Bangsa Tionghoa.
Kutipan
1 lembar
871. Undang-undang No. 1 tgl. 26 Februari 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.
Konsep, stensilan
1 sampul
872. Undang-undang No. 3 tgl. 10 April 1946 tentang warga negara dan penduduk negara RI.
Konsep
1 sampul
873. Undang-undang No. 6 tgl. 6 Juni 1946 tentang keadaan bahaya.
Konsep
10 lembar
874. Undang-undang No. 8 tgl. 8 Juni 1946 tentang peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara.
Konsep
6 lembar
875. Undang-undang No. 16 tgl. 27 September 1946 tentang pengesahan pernyataan keadaan bahaya di seluruh Indonesia.

- Konsep
2 lembar
876. Undnag-undang No. 20 tgl. 31 Oktober 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan hukuman tutupan.
- Konsep
2 lembar
877. Undang-undang No. 2 tgl. 15 Januari 1947 tentang pengesahan Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, No. 10, No. 12, No. 13, No. 15, No. 18, No. 19, No. 23, No. 24, No. 25, dan No. 26 tahun 1946.
- Konsep
3 lembar
878. Undang-undang No. 6 tgl. 27 Februari 1947 tentang perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1946 mengenai warga negara dan penduduk negara RI, disertai lampiran.
- Asli
1 sampul
879. Undang-undang No. 20 bulan Juni 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- Konsep
16 lembar
880. Undnag-undang No. 21 tgl. 13 Juni 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana di luar hadir terdakwa pada Pengadilan Negeri.
- Konsep
6 lembar
881. Undang-undang No. 22 tgl. 29 Agustus 1947 tentang pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksanaan.
- Konsep
6 lembar
882. Undang-undang No. 23 tgl. 29 Agustus 1947 tentang penghapusan Pengadilan Raja (Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera, disertai lampiran.
- Asli
1 sampul
883. Undang-undang No. 34 tgl. 18 Oktober 1947 tentang kecelakaan perang.
- Konsep
8 lembar
884. Undang-undang No. 36 tgl. 28 November 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara, disertai penjelasannya.
- Konsep
15 lembar
885. Undang-undang No. 1, No. 15, No. 37 tgl. 28 November 1947 tentang perpanjangan waktu berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, No. 7 jo. No. 31, No. 8, No. 9, No. 11, dan No. 16.

- Konsep
1 sampul
886. Undang-undang No. 39 tgl. 27 Desember 1947 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, disertai penjelasannya.
- Konsep
1 sampul
887. Undang-undang No. 40 tgl. 27 Desember 1947 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, disertai penjelasannya.
- Konsep
15 lembar
888. Undang-undang No. 41 tgl. 27 Desember 1947 tentang kepenjaraan tentara.
- Konsep
1 sampul
889. Undang-undang No. 1 tgl. 9 Januari 1948 tentang penambahan Undang-undang Keadaan Bahaya, disertai lampiran.
- Asli
1 sampul
890. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Presiden: Surat tgl. 9 April 1948 tentang disetujuinya Rancangan Undang-undang mengenai perpanjangan waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia, disertai lampiran.
- Asli
1 sampul
891. Undang-undang No. 8 tgl. 31 Maret 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, disertai lampiran.
- Asli
1 sampul
892. Undang-undang No. 19 tgl. 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- Konsep
1 sampul
893. Undang-undang No. 30 tgl. 20 September 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya.
- Konsep
6 lembar
894. Undang-undang tahun 1947-1948 tentang naturalisasi.
- Duplikat
1 sampul
895. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 tgl. 7 Juni 1946 tentang Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa.
N.B.: Arsip sobek
- Konsep

- 2 lembar
896. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 tgl. 7 Juni 1946 tentang penambahan pasal 4a dalam undang-undang keadaan bahaya.
Konsep
2 lembar
897. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 4 tgl. 8 Juli 1946 tentang pengubahan sementara pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1946.
Konsep
3 lembar
898. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 5 tgl. 9 Juli 1946 tentang penambahan pada pasal 3 ayat 1 sub a dan perubahan pada pasal 4a ayat 2 sub a dan pasal 4a ayat 3 Undang-undang No. 6 tahun 1946.
Konsep
6 lembar
899. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 7 tgl. 8 Agustus 1946 tentang perubahan Susunan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.
6 lembar
900. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 tgl. 30 Juli 1949 tentang Daerah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta, disertai lampiran.
Stensilan
3 lembar
901. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 72 tgl. 6 Desember 1948 tentang penetapan daerah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Salinan
1 lembar
902. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 5 tgl. 8 Agustus 1946 tentang Pengadilan Tentara Luar Biasa.
Konsep
1 lembar
903. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 8 tgl. 8 Agustus 1946 tentang berlakunya Undang-undang No. 1 tgl. 26 Februari 1946 mengenai peraturan hukum pidana di Daerah Propinsi Sumatera, disertai surat pengantar.
Tembusan, konsep
4 lembar
904. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 5 tgl. 17 Maret 1947 tentang kewarganegaraan.
Cetakan
1 lembar

905. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 22 tgl. 18 Agustus 1947 tentang fungsi rangkap tiap-tiap pengadilan negeri yang juga menjadi Pengadilan Tentara Luar Biasa (Mahkamah Tentara Sementara), disertai penjelasannya.
Konsep
1 sampul
906. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 23 tgl. 18 Agustus 1947 tentang Mahkamah Tentara Daerah Terpencil, disertai penjelasannya.
Konsep
7 lembar
907. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 18 dan No. 26 tgl. 25 Juli 1947 tentang perubahan Peraturan Pemerintah mengenai grasi.
Konsep
12 lembar
908. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. S.2 tgl. 3 Februari 1948 tentang Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Sumatera.
Konsep
3 lembar
909. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 26 tgl. 24 September 1948 tentang mempercepat pemeriksaan perkara pidana dalam keadaan bahaya.
Konsep
2 lembar
910. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 27 tgl. 24 September 1948 tentang kejahatan-kejahatan dalam keadaan bahaya yang dapat dihukum dengan hukuman mati.
Konsep, stensilan
9 lembar
911. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 33 tgl. 28 September 1948 tentang pemerintahan militer di daerah-daerah Jawa.
Salinan, stensilan
9 lembar
912. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 38 tgl. 1 Oktober 1948 tentang perubahan beberapa pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1946 mengenai peraturan hukum acara pidana pengadilan tentara.
Cetakan
1 lembar
913. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 40 dan No. 41 tgl. 1 Oktober 1948 tentang melepaskan orang-orang hukuman untuk memberikan tempat kepada orang-orang tahanan atau hukuman yang ditahan atau dihukum berhubung dengan pemberontakan Madiun.
Duplikat
1 lembar

914. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 48 tgl. 12 Oktober 1948 tentang perluasan berlakunya peraturan pidana/disiplin tentara dan kekuasaan Pengadilan Tentara.
Konsep
3 lembar
915. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 53 tgl. 26 Oktober 1948 tentang urusan tawanan dan tahanan politik/tentara yang bersangkutan dengan peristiwa Madiun.
Konsep, salinan
5 lembar
916. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan-peraturan No. S.1 dan No. 67 tgl. 5 Februari 1948 dan 15 November 1948 tentang permohonan grasi.
Konsep
5 lembar
917. Pemerintah RI Jogjakarta: Peraturan No. 70 tgl. 26 November 1948 tentang kekuasaan Komandan Sub Territorium dan Kepala Daerah Karesidenan/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
Konsep, stensilan
1 sampul
918. Presiden RI: Peraturan No. 1 tgl. 8 Agustus 1946 tentang pemberian pengampunan kepada orang-orang hukuman.
Konsep
2 lembar
919. Presiden RI: Peraturan No. 3 tgl. 28 Oktober 1946 tentang perhubungan Dewan Pertahanan Daerah dengan jawatan-jawatan Pemerintahan Sipil, disertai surat pengantar.
9 lembar
920. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 15/S.D tgl. 30 Juni 1946 tentang Susunan Dewan Pertahanan Daerah Jogjakarta.
Konsep
1 lembar
921. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 13/S.D tgl. 8 Juli 1946 tentang penempatan kedudukan Dewan Pertahanan Negara di Kota Jogjakarta.
Konsep
1 lembar
922. Presiden RI: Penetapan No. 6 tgl. 9 April 1946 tentang pembedaan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara.
Konsep
1 lembar
923. Presiden RI: Penetapan No. 1 tgl. 26 Juni 1946 tentang pembentukan Dewan Militer.
Konsep
1 lembar

924. Presiden RI: Penetapan No. 4 dan No. 5 tgl. 19 Juli 1946 dan 4 Juli 1946 tentang pengangkatan anggota-anggota pada Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa dan pelantikan Dewan Pertahanan Negara.
Konsep
1 lembar
925. Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan tgl. 5 Mei 1947 tentang pemersatu Tentara Republik Indonesia dan laskar-laskar dan pembentukan panitianya.
Fisik arsip tidak ada
926. Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang: Penetapan-penetapan tgl. 17 Juli 1947 tentang pembentukan Panitia Pembentukan Tentara Nasional Indonesia di Sumatera dan pengangkatan anggota-anggota panitia tersebut serta pengangkatan-pengangkatan Pimpinan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia di Sumatera.
Konsep
2 lembar
927. Presiden RI: Penetapan No. 14 tgl. 17 November 1949 tentang pemberian amnesti.
N.B.: Satu lembar dalam bahasa Inggris
Stensilan
2 lembar
928. Presiden RI: Penetapan-penetapan tgl. 16 September 1949-21 Desember 1949 tentang penolakan dan pemberian grasi.
Turunan, salinan
7 lembar
929. Perdana Menteri RI: Surat Keputusan No. 38/PM/II tgl. 6 November 1946 tentang pemberian kewajiban menyelesaikan urusan pengungsi-pengungsi yang akan pergi ke daerah serikat atau luar negeri dan bangsa Tionghoa yang belajar atau berobat kepada Menteri Negara Ir. Tan Po Goan.
Salinan
1 lembar
930. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat: Surat Keputusan No. 49/BP3/47 u tgl. 12 Agustus 1947 tentang rancangan Undang-undang Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer, George Wilhelm August Friederich, Wilhelm Karl Dottfried Mewes, dan Curt Ulrich Gross.
Asli
1 lembar
931. Soekarno-Hatta: Maklumat tgl. 18 Agustus 1945 tentang pemberitahuan bahwa pembangunan Negara Indonesia Merdeka sedang dilaksanakan dan himbauan agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenteram, tenang, berdisiplin.
Konsep
1 lembar
932. Soekarno-Hatta: Maklumat No. 2 tgl. 2 Oktober 1945 tentang himbauan dari Soekarno-Hatta agar semua rakyat tenteram dan tenang.
Konsep

2 lembar

933. Panglima Besar Angkatan Perang RI kepada Sutomo (Bung Tomo): Perintah Harian No. 15/PB/48/I tgl. 2 Februari 1948 tentang pencabutan kembali larangan berbicara pada Jenderal Mayor Sutomo, disertai lampiran.

Tembusan
1 sampul

934. Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI: Surat Keputusan No. 3 PT/48 tgl. 3 Maret 1948 tentang penggunaan hak mengemukakan pandangan-pandangan politik di muka umum menurut pendapat dan pendirian pribadi anggota-anggota Angkatan Perang RI, disertai penjelasannya.

Konsep
2 lembar

935. Wakil Presiden RI kepada Kolonel Hidayat, Kepala Staf Divisi I Siliwangi TNI AD: Surat Perintah tgl. 24 Februari 1948 tentang kerusuhan di Banten.

Fisik arsip tidak ada

936. Presiden/Panglima RI Angkatan Perang kepada seluruh rakyat, badan perjuangan terutama Hizbullah dan Sabilillah agar menjalankan Instruksi Pimpinan TNI.

Fisik arsip tidak ada

937. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Militer V Jawa: Peraturan No. 4/GM/1949 tgl. 23 Agustus 1949 tentang memperpanjang berlakunya peraturan keramaian.

Fisik arsip tidak ada

939. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Militer V Jawa: Peraturan No. 13/GM tgl. 3 September 1949 tentang pemberian surat bepergian.

Fisik arsip tidak ada

940. Gubernur Militer Daerah Militer V: Peraturan No. GM tgl. 1 September 1949 tentang pembatasan berkumpul dan bersidang, disertai surat pengantar.

Fisik arsip tidak ada

941. Pemerintah Militer Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Militer V Jawa: Peraturan No. 21/GM/1949 tgl. 21 Nopember 1949 tentang perubahan dalam peraturan hal gerombolan bersenjata selain Angkatan Perang RI No. 8/GM/1949.

Fisik arsip tidak ada

942. Pemerintah Front Daerah Madiun: Penetapan-penetapan tgl. 18 September 1948-28 September 1948 tentang kebijaksanaan pemerintah sipil di Madiun.

Salinan
9 lembar

943. Menteri Pertahanan: Surat Keputusan No. A/605/1948 tgl. 6 November 1948 tentang peraturan sementara mengenai jaminan kepada pegawai Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang (keluarganya) baik militer maupun sipil yang ditawan berhubung dengan tindakan politik pemerintah dalam keadaan yang genting pada dewasa ini.

Fisik arsip tidak ada

944. Gubernur Jawa Tengah: Maklumat tgl. 20 Oktober 1945 tentang keamanan di daerah Jawa Tengah.

Konsep
1 lembar

945. Sub Territorium Militer, Komando Militer Kota Jogjakarta: Pengumuman No. 20/Peng/Kmk/49 tgl. 14 November 1949 tentang berlakunya jam malam, disertai surat pengantar.

Asli, salinan
2 lembar

946. Panitia penyelenggara pertemuan keluarga Tawan: Himpunan surat-surat dari penjara.
N.B. Tanpa tanggal

Salinan
3 lembar

947. Telegram-telegram tahun 1945 tentang pengakuan rakyat terhadap pemerintah RI.

Salinan
5 lembar

948. Kiai Haji Achmad di Tangerang (a.n. masyarakat Tangerang): Maklumat No. 1 dan No. 2 tgl. 20 Oktober 1945 tentang pemerintahan Pangreh Praja dan Polisi Kabupaten Tangerang dikuasai oleh rakyat.

Konsep
2 lembar

949. Badan Keamanan Rakyat: Laporan tgl. 4 November 1945 tentang daerah Pondok Gede dan Kebayoran, disertai surat pengantar.

Fisik arsip tidak ada

950. Pengurus Partai Buruh Indonesia cabang Kediri kepada Presiden: Surat tgl. 2 Januari 1946 tentang protes terhadap tindakan percobaan pembunuhan Perdana Menteri Sjahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifoedin yang dilakukan oleh Nica, disertai surat pengantar.

Salinan
2 lembar

951. Lukman: Laporan tgl. 20 Juni 1946 tentang menghadapi serangan udara modern.

Fisik arsip tidak ada

952. Jawatan Penerangan Karesidenan Jakarta di Purwakarta kepada Kementerian Penerangan: Surat tgl. 19 Juli 1946 tentang keadaan sekitar Karesidenan Jakarta yaitu mengenai masalah mobilisasi umum dan akibat-akibatnya, disertai surat pengantar.
Salinan
6 lembar
953. Bagian Kehamikan Tentara Kementerian Pertahanan kepada MBPT: Surat tgl. 5 September 1946 tentang masalah pelaksanaan peraturan lalu lintas.
N.B. Tidak lengkap
Tembusan
1 lembar
954. Kawat-kawat tgl. 9 Januari 1947 tentang menjelek-jelekkan pemerintah dan menghina Presiden, disertai surat pengantar.
Fisik arsip tidak ada
955. Panitia Penyelidik Kekacauan di Jawa Barat: Laporan tgl. 14 Mei 1947 tentang sebab-sebab dan akibat-akibat pengacauan oleh laskar rakyat di daerah Jawa Barat.
Fisik arsip tidak ada
956. Masyarakat Jawa Barat: Resolusi-resolusi tgl. 17 Mei 1947-19 Mei 1947 tentang tidak mengakui berdirinya Negara Pasundan.
N.B. Dalam bahasa Jawa dan Sunda
Asli
1 sampul
957. Menteri Muda Kehakiman kepada Presiden: Surat tgl. 10 Juni 1947 tentang pemindahan sementara Pengadilan Tinggi Surabaya dari Jombang ke Malang karena keadaan kurang aman.
N.B. Lampiran tidak ada
Asli
1 lembar
958. Jawatan Penerangan Sunda Kecil: Laporan tgl. 21 Mei 1947 dan 20 Juni 1947 tentang keadaan dan perjuangan di Bali, disertai surat pengantar.
Fisik arsip tidak ada
959. Mansur: Laporan tgl. 24 September 1947 tentang kekalutan dalam Inspektur Buro Perjuangan Daerah XIII.
Fisik arsip tidak ada
960. Wakil Presiden kepada Presiden: Surat tgl. 10 Oktober 1947 tentang keadaan keamanan di daerah Bukit Tinggi dan Sumatera Utara.
Fisik arsip tidak ada
961. Jaksa Agung kepada Presiden RI: Surat tgl. 14 Oktober 1947 tentang tahanan politik dalam perkara 'Tan Malaka cs', disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada

962. Kementerian Pertahanan: Laporan perjalanan utusan ke Sumatera tgl. 3 Agustus 1947 dan 19 Oktober 1947 dilaporkan oleh Mayor R. Soeleman.
Tembusan
9 lembar
963. Panglima Divisi II kepada Panglima Tertinggi: Surat tgl. 19 November 1947 tentang perkaraban yang menyinggung kehormatan Panglima Divisi II.
Asli
1 lembar
964. Presiden Soekarno: Himbauan untuk bersatu padu melawan PKI yang mengadakan coup di Madiun yang dipimpin oleh Musso.
N.B. Tanpa tanggal
Stensilan
4 lembar
965. Soerjotjondro: Kawat tgl. 7 Februari 1948 tentang penghukuman Husein selama 3 minggu karena menghina pembesar pemerintah peralihan.
Salinan
1 lembar
966. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram tgl. 1 Maret 1948 tentang siaran radio untuk keperluan pers.
Salinan
1 lembar
967. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram-telegram tgl. 1 Maret 1948 dan 2 Maret 1948 tentang pembentukan negara Pasundan.
N.B. Dalam bahasa Belanda
Tembusan
6 lembar
968. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram No. 6/3 tgl. 5 Maret 1958 tentang kedatangan pers Indonesia ke Jogjakarta.
Tembusan
1 lembar
969. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram tgl. 8 Maret 1948 tentang pendaratan tentara payung dari Jogjakarta di Kalimantan pada tgl. 16 Oktober 1947.
N.B. Dalam bahasa Belanda
Salinan
1 lembar
970. Telegram-telegram tgl. 20 Maret 1948 dan 21 Maret 1948 tentang 2 orang Tionghoa dan 4 orang wartawan bangsa Tionghoa yang akan mengadakan perjalanan ke Banten.
Pertinggal
3 lembar
971. Arifin Harahap kepada Setneg: Telegram No. 260/S/del tgl. 22 Maret 1948 tentang permohonan keputusan Tetes Tjaruban.

Fisik arsip tidak ada

972. Soerjotjondro kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan: Kawat tgl. 24 Maret 1948 tentang usaha monitoring radio Bukit Tinggi.
Fisik arsip tidak ada
973. Kepada Setneg: Telegram No. 286/S/del tgl. 29 Maret 1948 tentang masalah tahanan politik.
Tembusan
1 lembar
974. Central Chinese Association kepada Presiden: Surat tgl. 10 April 1948 tentang terbunuhnya Oei Tjoei Ling oleh gerombolan pengacau, Maulana disertai lampiran.
Asli
2 lembar
975. Setneg dengan Sekjen Kementerian Pembangunan dan Pemuda: Surat-menyurat tgl. 16 April 1948 dan 21 April 1948 tentang pengiriman surat kaleng yang diatasnamakan Sekretariat Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang berisi merendahkan Dr. Soekiman dan meninggikan Mr. Amir Sjarifoeddin.
Asli, pertinggal
2 lembar
976. Wakil Presiden, Mr. Moh. Roem, Dr. Leimena, KSAP, Panglima Besar: Catatan tgl. 30 April 1948 tentang rapat informal pada tgl. 29 April 1948 mengenai keamanan dalam negeri.
Konsep
3 lembar
977. Ny. Mayor Firmansjah, dkk kepada Presiden RI, Menteri Pertahanan, dll: Surat tgl. 10 Mei 1948 tentang tindakan kekejaman/pengacauan terhadap keluarga-keluarga di Madiun oleh anggota-anggota TNI, disertai surat pengantar.
Asli
3 lembar
978. Telegram-telegram tgl. 9 Maret 1948 dan 19 Juni 1948 tentang evakuasi orang-orang Tionghoa.
Asli, salinan
4 lembar
979. Soerjotjondro kepada Setneg: Telegram No. K-130/d-3/48 tgl. 21 Juni 1948 tentang evakuasi keluarga Lanto Latumahina Suwarno dengan kereta api.
Tembusan
1 lembar
980. Sekretaris Negera kepada Dr. Sudarsono di New Delhi: Telegram-telegram tgl. 21 Juli 1948 tentang visa Tahir cs.
N.B. Dalam bahasa Inggris
Pertinggal
2 lembar

981. Sekretaris Negera kepada Sudarsono: Telegram tgl. 20 September 1948 dan pidato Mr. Hatta tentang PKI Muso.
N.B. Dalam bahasa Inggris
Pertinggal
6 lembar
982. Setneg kepada Menteri Kehakiman: Surat tgl. 20 September 1948 tentang permohonan Konrad van Emster menjadi WNI, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
983. Telegram-telegram tgl. 7 Februari 1948-7 Oktober 1948 tentang Panitia Keamanan.
Tembusan
1 sampul
984. Menteri Dalam Negeri kepada Mr. Soerjotjondro: Telegram No. ax 20/6/4 tgl. 7 Oktober 1948 tentang keselamatan Gusti Gde Rake, disertai lampiran.
Tembusan
7 lembar
985. Presiden RI dan Wakil Presiden: Pemberitahuan tgl. 19 Desember 1948 tentang pemerintah darurat di Sumatera.
Fisik arsip tidak ada
986. E. Karta Widjaj, Kepala SR Umum Cibadak I Kab. Sukabumi kepada Presiden: Surat tgl. 20 Juli 1949 tentang penahanan 2 orang anaknya yaitu Husein Kartawidjaja dan Momo Ismail di kamp. Villa van Delden Sukabumi.
Asli
1 lembar
987. Menteri Perburuhan dan Sosial: Surat tgl. 30 Juli 1949 tentang pakaian dari NIT untuk Angkatan Perang, disertai lampiran.
N.B.: Lampiran tidak ada
Asli
1 lembar
988. Bunawi a.n. masyarakat Karesidenan Cirebon kepada Presiden: Surat tgl. 4 Agustus 1949 tentang masalah penderitaan rakyat Cirebon yang disebabkan adanya pemerintahan Pasundan dan adanya pemberotakan/gerombolan DI/TII.
Asli
2 lembar
989. Tentara Nasional Indonesia, Panglima Divisi III/Gubernur Militer III: Surat tgl. 13 Agustus 1949 tentang masih tetap adanya pemerintah militer dan tetap berlakunya peraturan-peraturannya.
Fisik arsip tidak ada
990. Mr. J. Latuharhary kepada Presiden: Surat tgl. 15 Agustus 1949 tentang nama-nama tawanan politik orang Indonesia di Irian yaitu di penjara Remu Sorong Niew Guinea dan di penjara Hollandia.
Asli

- 1 lembar
991. Residen Surakarta kepada Ketua Delegasi RI: Surat tgl. 16 Agustus 1949 tentang pembunuhan dalam kota Solo.
N.B. Kertas rusak
- Tembusan
1 lembar
992. Kusno R.M. dan Lopian B.W. (Tahanan di penjara Cipinang Jatinegara) kepada Presiden: Surat tgl. 8 Agustus 1949 dan 17 Agustus 1949 tentang permohonan pengampunan, disertai surat pengantar dan lampiran.
- Asli
16 lembar
993. Sekretaris Dewan Menteri kepada Mr. Mohassan: Telegram tgl. 31 Agustus 1949 tentang pemerintahan di Sumatera dipegang oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafrudin Prawiranegara, disertai surat pengantar.
- Fisik arsip tidak ada**
994. Sekretaris Delegasi kepada Sekretaris Perdana Menteri: Kawat tgl. 13 September 1949 tentang Contra Dewan Banjar Dayak memecah persatuan, disertai surat pengantar.
- Fisik arsip tidak ada**
995. Telegram-telegram tgl. 16 September 1949-24 September 1949 tentang eksekusi vonis Sukono, Kasbun, dan Jumian.
- Tembusan
4 lembar
996. Pengurus Harian Lembaga Tionghoa Indonesia kepada Gubernur Militer: Surat tgl. 24 September 1949 tentang pengusiran Ny. Liem Tjon Kiat dari tempat tinggalnya di Jl. Magelang 5 Jogjakarta, disertai lampiran.
- Tembusan
8 lembar
997. Jawatan Kepolisian Negara kepada Presiden: Radiogram tgl. 28 September 1949 tentang serbuan umum dari Jawa Timur ke Madiun, disertai surat pengantar.
- Fisik arsip tidak ada**
998. Pengurus Harian Lembaga Tionghoa Indonesia di Jogjakarta kepada Gubernur Militer: Surat tgl. 29 September 1949 tentang keberatan Oei Thian Ik menerima salah satu badan Angkatan Perang menumpang di rumahnya, disertai lampiran.
- Tembusan
5 lembar
999. Telegram-telegram Desember 1945-11 Oktober 1949 tentang Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri.
- 12 lembar
1000. Telegram-telegram tgl. 25 Agustus-25 Oktober 1949 tentang kekeruhan yang terjadi di Kalimantan.

Salinan
18 lembar

1001. E. Zainal Arieffin di Ciburupan Garut kepada Presiden: Surat tgl. 29 Oktober 1949 tentang larangan untuk memasang bendera Merah Putih dan gambar Presiden Soekarno oleh Ass. Wedana Ciburupan.

Asli
1 lembar

1002. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Pemerintah Haminte Kota Jogjakarta: Resolusi Bersama tgl. 6 Nopember 1949 tentang desakan kepada Presiden dan BPKNIP agar Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta segera dilaksanakan, disertai surat pengantar.

Asli
2 lembar

1003. D.M. Kirpalani kepada Gubernur Militer di Jogjakarta: Surat tgl. 7 November 1949 tentang masalah pencurian di Toko Bombay Koh I Noor Pacinan 113 Jogjakarta.

Asli
3 lembar

1004. S. Raisuddin di Surabaya kepada Presiden, Wali Negara Jawa Timur, Menteri Penerangan, dll: Surat tgl. 15 November 1949 tentang masalah pungutan-pungutan yang dilakukan anggota TNI di Surabaya terhadap rakyat jelata, pekerja, dan pedagang kecil.

Asli
1 lembar

1005. Surat-surat tgl. 14-17 November 1949 tentang permohonan grasi Ny. Martokartono atas anaknya Resi Hadikartono.

Fisik arsip tidak ada

1006. Organisasi Massa dan Masyarakat: Surat-surat dan Resolusi tgl. 13 September-15 November 1949 tentang pernyataan setia kepada Pemerintah RI.

Asli, pertinggal
1 sampul

1007. Kapt. M. Lahade (TRI Sulawesi, Penjara Hogepad Makasar) kepada Presiden: Surat tgl. 2 Desember 1949 tentang penahanan beberapa anggota TRI (bentukan Sulawesi) oleh pemerintah NIT (Negara Indonesia Timur).

Salinan
4 lembar

1008. Kiai Haji Anwaroeddin di Rembang (yang diskors/nonaktif oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung) kepada Presiden: Surat tgl 2 Desember 1949 tentang penculikan dirinya oleh orang-orang Masyumi.

Asli
1 lembar

1009. Kepala Jawatan Penerangan Rakyat Karesidenan Cirebon (Pasundan) kepada Presiden: Surat tgl. 4 Desember 1949 tentang serobotan mobil-mobil opsir-opsir TNI.

Fisik arsip tidak ada

K. ORGANISASI MASSA DAN KEPARTAIAN

1010. Pemerintah RI Jogjakarta: Penetapan No. 7 tgl. 16 Desember 1948 tentang pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap Perhimpunan Palang Merah di seluruh Indonesia.

Asli, konsep
2 lembar

1011. Presiden RI: Pengumuman tgl. 31 Agustus 1945 tentang penundaan untuk sementara gerakan dan aktivitas Partai Nasional Indonesia, perintah untuk mengibarkan bendera Nasional Sang Merah Putih dan penggantian Salam Nasional "Hidoep" menjadi "Merdeka".

Konsep
1 lembar

1012. Menteri Negara RI Koordinator Keamanan: Pengumuman No. 1/7 tahun 1949 tentang pendaftaran organisasi-organisasi perjuangan dan kesatuan-kesatuan bersenjata yang tidak tergabung dalam bagian TNI atau polisi negara.

Konsep
1 lembar

1013. Palang Merah Indonesia: Maklumat tahun 1948 tentang Susunan Pengurus Harian Palang Merah Indonesia.
N.B. Arsip sobek

Turunan
3 lembar

1014. Pengurus Besar Pemuda Islam Indonesia Maluku (Peisim) kepada Presiden RI: Surat tgl. 16 Desember 1949 tentang pernyataan setuju dari P.B. Pemuda Islam Indonesia Maluku untuk keputusan Fraksi Maluku dalam KNP yang telah menetapkan keanggotaan Mohammad Padang sebagai anggota dalam Parlemen Sementara RIS.

Asli
2 lembar

1015. Sekjen Panitia Pusat Kongres Muslimin Indonesia di Jogjakarta kepada Presiden: Surat-surat tgl. November 1949, 12 Desember 1949, dan 14 Desember 1949 tentang masalah Kongres Muslimin Indonesia.

Asli
3 lembar

1016. Iman di Bogor kepada Presiden, dll: Surat tgl. 7 Desember 1949 tentang permohonan pengesahan organisasi Brigade Polisi Militer di Jawa Barat yang terdiri dari anak-anak BPRI dan SEGERA Jawa Barat.

Asli
1 lembar

1017. Kongres Persatuan Buruh Kereta Api (BPKA) di Bandung: Resolusi I, II, III, IV pada tgl. 3-5 Desember 1949, disertai surat pengantar.
Stensilan
5 lembar
1018. Wakil Setneg kepada Menteri Kehakiman: Surat tgl. 1 Desember 1949 tentang Partai Wanita Rakyat, disertai lampiran.
Pertinggal
4 lembar
1019. Pengurus Besar Barisan Pencinta Adat Sumatera Selatan (BPASS) di Palembang dan Pengurus Besar Persatuan Perstuan Adat Pembangun Masyarakat (PAPM) di Palembang: Resolusi Bersama tgl. Desember 1949 tentang masalah-masalah marga-marga dari Karesidenan Palembang dimasukkan kembali ke dalam ketatanegaraan Negara Sumatera Selatan.
Fisik arsip tidak ada
1020. Imam (eks Ketua Umum BPRI Pusat Jawa Barat dan Sentral Gerilya Rakyat) di Bogor kepada Presiden: Surat tgl. 28 November 1949 tentang permohonan agar bekas anggota-anggota BPRI dan Sentral Gerilya Rakyat dapat dipekerjakan di Bagian Kepolisian.
Asli
1 lembar
1021. Soetarjo Kartohadikoesoemo: Laporan tgl. 22 November 1949 dalam rangka menghadiri Konferensi Tani Seluruh Indonesia di Jogjakarta.
Salinan
1 lembar
1022. Masyumi Banyumas kepada Presiden RI: Konferensi tgl. 10 dan 11 November 1949 tentang politik, organisasi, pendidikan, dan sosial.
Fisik arsip tidak ada
1023. Organisasi Pemuda Madiun kepada Presiden: Telegram tgl. 9 Noember 1949 tentang setia pada Republik Indonesia.
Salinan
1 lembar
1024. Surat-surat tgl. 11 Juli 1949-20 Oktober 1949 tentang pengaktifan kembali pendirian/pembentukan partai/organisasi.
Fisik arsip tidak ada
1025. Panitia Pusat Kongres Muslimin Indonesia kepada Presiden: Surat tgl. 12 Oktober 1949 tentang kesulitan mengadakan kongres di Jogjakarta, disertai lampiran.
Asli, salinan
4 lembar
1026. Pegawai/pekerja Jawatan Kereta Api RI di Jogjakarta kepada Menteri Perburuhan dan Sosial: Resolusi tgl. 10 Oktober 1949 tentang mendesak Menteri Perburuhan dan Sosial agar selekasnya maklumat/peraturan yang telah ada dilaksanakan, disertai lampiran.

Fisik arsip tidak ada

1027. Pengurus Besar Serikat Buruh Pegadaian kepada Pengurus Ranting/Cabang dan segenap pegawai-pegawai pegadaian di seluruh Indonesia: Siaran No. 2 tgl. 6 Oktober 1949 tentang masalah-masalah Organisasi Serikat Buruh Pegadaian, disertai lampiran.

Stensilan
9 lembar

1028. Menteri Urusan Pegawai Negeri: Ringkasan pidato tgl. 1 Oktober 1949 tentang politik pemerintah terhadap pegawai negeri di wakil-wakil Serikat Buruh Pegawai Negeri.

Fisik arsip tidak ada

1029. Gerakan Pancasila kepada Setneg: Surat-menyurat tgl. 14 September 1949 dan 19 September 1949 tentang keinginan turut serta dalam kursus Pancasila, disertai lampiran.

Fisik arsip tidak ada

1030. Kongres Gerakan Muslimin Indonesia ke-I di Bandung: Keputusan tgl. 15-18 September 1949, disertai surat pengantar.

Stensilan
3 lembar

1031. Rapat Ikatan Pelaut Indonesia Cabang Jogjakarta: Keputusan tgl. 4 September 1949.

Asli
1 lembar

1032. Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) Sumatera kepada Presiden: Surat tgl. 22 Agustus 1949 tentang tinjauan organisasi pemuda, disertai surat pengantar.

N.B. Arsip rusak

Asli
2 lembar

1033. Wakil Negara Madura: Keputusan Bersama tgl. 1 Agustus 1949 tentang desakan mereka terhadap DPR dan pemerintah Negara Madura untuk menetapkan tgl. 17 Agustus sebagai Hari Kebangsaan.

Tembusan
1 lembar

1034. Panitia Penyelenggara delegasi Pemuda NIT di Makasar kepada Panitia Penyelenggara Konferensi Pemuda antara Indonesia: Surat tgl. 28 Juli 1949 tentang kesediaan menghadiri Konferensi Pemuda antara Indonesia.

Fisik arsip tidak ada

1035. Presiden RI kepada Ide Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur: Surat tgl. 21 Juli 1949 tentang penyelenggaraan Konferensi Inter Indonesia.

1 sampul

1036. Pemuda Demokrat Indonesia kepada Presiden: Surat tgl. 20 Juli 1949 tentang putusan Pusat Pimpinan Pemuda Demokrat Indonesia mengenai tidak adanya Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
N.B. Arsip tidak sesuai deskripsi
Asli
2 lembar
1037. Partai Buruh Indonesia kepada Sekretaris Negara: Surat-surat tgl. 19 Juli 1949 tentang putusan PB Partai Buruh Indonesia dan Pengurus Baru PBI.
Fisik arsip tidak ada
1038. Sekretaris Perdana Menteri kepada Sekretaris Negera: Surat tgl. 18 Juli 1949 tentang kawat dari Partai Indo Nasional mengenai permohonan supaya mereka didengar pada Konferensi Inter Indo, disertai lampiran.
Fisik arsip tidak ada
1039. Catatan dari para pemuda tgl. 18 Juli 1949 tentang rencana akan dihapuskannya Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
Konsep
1 lembar
1040. Susunan Panitia Penyambutan Permusyawaratan Antara Indonesia dan susunan acara Permusyawaratan Antara Indonesia tgl. 17 Juli 1949.
Fisik arsip tidak ada
1041. P.B. PERARI/MTKAANM di Sumatera: Resolusi tgl. 25 Juni 1949 tentang pendirian PB PERARI/MTKAANM dalam menghadapi masa sedang dan sesudah pelaksanaan statemen Roem van Royen.
Fisik arsip tidak ada
1042. Komisariat Dewan Partai Murba: Surat kuasa tgl. 6 Desember 1948 untuk murbantaka untuk mengerjakan kepentingan organisasi.
Asli
1 lembar
1043. kementerian Pembangunan dan Pemuda kepada Presiden: Surat tgl. 4 Desember 1948 tentang Wakil Pemuda NIT.
Fisik arsip tidak ada
1044. Telegram tgl. 9 Agustus 1948 tentang desakan untuk membentuk Kabinet Nasional oleh FDR cabang Pati.
Asli
1 lembar
1045. Panitia Rapat Raksasa kepada Presiden: Surat tgl. 1 Mei 1948 tentang Resolusi 1 Mei.
Fisik arsip tidak ada
1046. Organisasi-organisasi Buruh Jawa Timur: Mosi-mosi tgl. 20 April 1948 tentang penghapusan pajak tanah, upah, dan tembakau.
Fisik arsip tidak ada

1047. Telegram-telegram tgl. 10 Maret 1947 dan 23 Maret 1948 tentang masalah Kongres Pemuda.
Konsep, pertinggal
5 lembar
1048. Organisasi-organisasi massa: Resolusi-resolusi tgl. 8 Mei 1947-17 Maret 1948 tentang menentang pendirian Negara Pasundan.
Fisik arsip tidak ada
1049. Sekretaris Negara kepada Sudarsono: Telegram tgl. 28 Februari 1948 tentang pengiriman wakil misi pemuda ke Cina.
N.B. Dalam bahasa Inggris
Pertinggal
1 lembar
1050. Telegram-telegram bulan Februari 1948 tentang urusan-urusan Palang Merah Indonesia.
Tembusan
3 lembar
1051. Serikat Kerakyatan Indonesia: Mosi tgl. 28 Desember 1947 tentang permintaan hak kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan berkumpul dan bersidang.
Fisik arsip tidak ada
1052. Kementerian Penerangan kepada Presiden RI: Surat tgl. 15 Juli 1947 tentang usul dari Pengurus Partai Komunis Indonesia kepada pemerintah RI supaya merubah politiknya dari pasif menjadi aktif, disertai surat lampiran.
Asli
3 lembar
1053. Partai Politik Masyumi dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII): Resolusi tgl. 8 Juli 1946 tentang protes atas penahanan pemimpin-pemimpin pemerintahan dan rakyat.
Salinan
1 lembar
1054. Konferensi Perkumpulan Wanita Indonesia di Solo: Putusan dan notulen rapat tgl. 25 dan 26 Februari 1946.
N.B. Arsip sobek
Konsep
5 lembar
1055. Blangko kosong tanda anggota Partai Rakyat Pasundan.
N.B. Tanpa tanggal
Stensilan
1 lembar
1056. Badan Kongres Wanita Indonesia: Keputusan tentang organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam Badan Kongres Wanita Indonesia.
N.B. Tanpa tanggal
Salinan
1 lembar

INDEKS NAMA ORANG DAN WILAYAH

Aboetari, M. Dr.	179
Achmad Nanang, Chodidjah R. Ayu R.H.	85
Algadrie, Hamid	404
Alie, Husain bin	476
Almoedjahid, Amir Hoesin	544
Aminullah, Achmad	72
Ampah	425
Ampat Angkat	130
Amsterdam	845, 846
Anwar, Moh.	678
Anwaroeddin, Kiai Haji	1008
Arifin	831
Asaari, Bupati	606
Asikin, Prof.	34
Asaat, Mr.	140
Atmadji	535
Atmodipoero, Kasioen	642
August, George Wilhem	930
Baharoedin, Zainoel	251
Bali	958
Bandung	128, 1017, 1030
Banten	637, 664, 935, 970
Banyumas	320, 557, 671
Barnas, Jusuf	831
Batangharis, Ruslan	831
Bekasi	237
Besuki	176
Bereuh, Teuku Daud	70
Boediono, R.	596
Bojonegoro	176, 673, 682, 684

Brotokoesoemo, Soejono Hadinoto Mr.	252
Bukit Tinggi	865, 960, 972
Cibarusan	237
Cibinong	237
Cikampek	741
Cikarang	237
Cirebon	988
Cisurupan	1001
Colombo	49
Crowson, Ben F.	97
Danoebroto, R. Marjono	614
Danoeningrat, R. Abdoelmoettalip Ir.	653
Den Haag	856
Dewantoro, Ki Hajar	171, 590
Dijar, R.	654
Djajengsoegianto	684
Djoeanda, Ir.	619
Djojoadhisoeerjo, Achmad Soebardjo Mr.	595
Djojosoegardo, B.	684
Djojosingardo, R. Letkol.	609
Djojowidagdo, R. Soebagjio Mr.	591
Djokosalamoen, Dr.	702
Djokosutono, Prof. Mr.	251
Djoni, M.	63
Djuanda, Ir.	620
Dullah, Ainia	700
Effendi, Soetisna	645
Emster, Konrad van	982
Fathoerrachman, K.H.M	613
Fischer, Herman Oscar Gustav	930
Friedrich	930
Gani, Abdul	690

Gani, Abdul Kapten Laut	647
Gani, A.K. Dr.	287
Gani, Roeslan Abdul	730
Go, Gien Cwan Mr.	824
Goenadi, K.	675
Goenadi	535
Goenarso, Ir.	683
Gross, Curt Ulrich	930
Hadikartono, Resi	1005
Hadikusumo, Suhadi Mr.	831
Hadiwasito, R. Wisalam	660
Hamengku Buwono IX, Sultan	85, 267, 560, 585, 588, 597, 600, 601, 822
Hamid, Abdul	631
Hamid II, Sultan	831
Harahap Sutan Barat Muda, Taripa Ir.	655
Hardjasoemantri, H. Gaos	252
Hardjoprajitno, Samino	639
Hardjowardjojo, P.T.R. Soehardjo Jenderal Mayor	566
Hardjowarsito	673
Hartojo	252
Hatta, Mohammad Drs.	618, 620, 831, 981
Haulusy, Dr. Ny.	456
Havana	823
Himogiri	543
Husein	965
Ibrahim, Taher	561
Icksan, Mr.	589
Iljas, R.	639
Irian Barat	990
Iskandar, Gunung Ir.	335, 721
Ismail, Momo	986
Ismono	674

Jahja, D. Letkol.	578
Jakarta	12, 321, 323, 484, 538, 598, 602, 631, 637, 662, 678, 691, 725, 741, 854, 952
Jambi	177, 868
Jawa	296, 300, 340, 384, 409, 578, 604, 791, 879, 882, 911
Jawa Barat	559, 637, 955, 1016
Jawa Tengah	117, 303, 559, 596, 623, 636, 639, 944
Jawa Timur	176, 258, 559, 644, 701, 997
Johannes, H. Ir.	683
Jombang	232, 957
Josodiningrat, K.R.T. Soegijono	565
Jumian	995
J.A. Jajasepoetra S.	475
Kadli, Abd. Rahman Rusly	84
Kalimantan	164, 547, 969, 1000
Kaliurang	827
Karim, E-Abdul Ir.	593
Karmidi	62
Kartanegara, Raden Satochid Mr.	538
Kartasasmita, R. Didi Kolonel	579, 710
Kartawidjaja, Husein	986
Kartohadikoesoemo, M. Soetardjo	171
Kasbun	995
Kasimo, I.J.	562
Kebayoran	949
Kediri	62, 176, 487
Kedu	557
Kiswono, Pastor	471
Klaten	496
Kodijat, R. Dr.	602
Koesbini	685
Koesoema, Indra Mr.	570
Koh, I. Noor	1003

Kolopaking, Soenarjo Prof. Mr.	112
Krawang	237
Kusbini	757
Kusumaatmadja, Mr. Dr.	831
Kutaraja	282
Lampung	569, 711
Laoh, F. Ir.	619
Leimena, J.	642
Leimena, J. Dr.	828
Lengah, Ismael Kolonel	878
Lepar, J.	639
Liem, Kiem Nio Ny.	462
Liem, Tjoen Kiat Ny.	996
Lolong, A.P.	134
Lumban Tobing, Ruphinus Mr.	582
Madani, Abdoellah	454
Madiun	176, 303, 497, 647, 913, 915, 924, 964, 977, 997
Madura	176, 296, 300, 340, 879, 1033
Magelang	180, 488, 830
Makaroesoë, Amansjah	454
Malaka, Tan	961
Malang	176, 240, 496, 497, 672, 748, 797, 957
Maluku	547, 1014
Mangkoesasmito, Prawoto	251
Mangunsudiro, Sukardjo Dr.	636
Maramis, A.A. Mr.	618
Markoen	639
Martodisoemo, R. Soekarnen Mayor Jenderal	558
Martokartono, Ny.	1005
Martoekoesoemo, R. Soekarnen	537
Maulussy, M. Dr.	636
Medan	63, 705

Mewes, Wilhelm Karel Gottfried	930
Moechtar	645
Moeljatno, R. Mr.	407
Moeljowiseno, Rachmat Kapten	550
Moerdiyah, Rr.	629
Moerdjan, Dr.	142
Moetalib, Fn. M.	252
Mohamad, M. Baroen	642
Mojokerto	121
Mono, Abdul Muthalib	582
Mukti, Abdul	631
Muljatno, Mr.	623
Munandar	670
Musso	964, 981
Nasir, Mochamad	535
Natawijogja, R. King	174
Nazir, M.	548
New Delhi	839
Ngawen	543
Noor, Tadjuddin Mr.	611
Noto, Moeridan	731
Notopradjarto, R. Kadarisman	584
Oei, Thian Ik	998
Oei, Tjoei Ling	974
Oei, Tio Ngih	800
Padang, Mohamad	1014
Paku Alam VII, Sri Paduka Kolonel	560
Palembang	1019
Pamekasan	204
Pane, Armyn	650
Pardi, M.	535
Pasarean Pasar Gede	543

Pati	72, 1044
Pangemanan, Ny.	638
Poerbakawatja, R. Soegarda	726
Pondok Gede	949
Praptodihardjo, R. Singgih	252, 599
Prawiranegara, Syafrudin Mr.	993
Pringgodigdo, A.G. Mr.	131, 406, 576, 605
Pringgodigdo, A.K.	721
Pronohadikoesoemo, R. Soekardan	592, 657
Pudja, I Gusti Ktut Mr.	594
Rake, Gusti Gde	984
Rasjidi, H.	574
Rasyid, Mr.	857
Ratmokom, Mr.	65
Riau	177, 254
Rikumahu, Matheus	462
Roedjito, R.	488
Roesadi	645
Roesli, Mr.	157
Roesmi, Ny.	638
Royen, van Dr.	52
Sadjarwa	156
Sadjarwo	252
Saksono, Ir.	830
Saleh, Mas Mohamad Effendi Ir.	656
Salim, H.A.	618
Sanoesi, M. Aboe	680
Santosa, Letkol.	649
Santoso, Letkol.	717
Sardjono, S.	156
Sarjono	639
Sarwono, Prof.	467

Sastroamidjojo, Soeratno	488
Sastrodjumiko, Ngadilin	75
Sastrodjumiko, Temu	75
Sastrodjumiko, Tuginem	75
Sastrodjumiko	75
Sastrosamian	638
Sastrosoewardi	639
Sastrotenojo, A. Dr.	664
Sastrowidjojo	639
Saubari, M. Mr.	603
Semarang	232, 320, 581, 623, 838
Serang	204
Setyadjit, Drs.	287
Sewabessy, Ch.	638
Simoen, Hadireno	635
Singapura	561
Singodimedjo, Kasman Mr.	405
Sjafii, Mohamad	266
Sjah, Teukoe Moch. Daoet	546
Sjahrir, Soetan Perdana Menteri	285, 507, 552, 950
Sjarifoeddin, Amir Mr.	287, 950, 975
Slamet, R. Soetikno Mr.	584
Soeatmadji, Dr.	66
Soebagio, Raden Panji Noto Mr.	538
Soebroto, Gatot Kolonel	581
Soedradjat, M. Mr.	407
Soedibjo, Mr.	830
Soediby, M. Kolonel	580
Soedirman	535, 564
Soediro, R.	545
Soedja, Raden Mr.	661
Soegeng, Bambang Kolonel	557, 623

Soegiantari	640
Soegiri, M.	599
Soehadi	645
Soeharto, R. Dr.	577, 648
Soejadi	465
Soejoedi, R. Mr.	587
Soejono	672
Soekamto	695
Soekanto	642
Soekardjono	639
Soekardono, R. Mr.	252
Soekarnen, Jenderal Mayor	696
Soekarno, Presiden	8, 70, 74, 94, 100, 102, 105, 107, 139, 140, 508, 1001
Soekiman, Dr.	618, 831, 975
Soekoco	650
Soeleman, R. Mayor	962
Soemardjo	632
Soemarjo	645
Soemarno, R. Kolonel	723
Soemindro, Rd.	569
Soemohardjo, Oerip	718
Soenarjo, Letkol.	604
Soendoro, Piet PM.	699
Soepeno, Bambang Letkol.	555
Soepomo, I.	690
Soeradibrata, R.	252
Soerasno, Raden	179
Soeriadarma, R. Soeriadi	537
Soerodiamodjo, Idi	639
Soerono	829
Soeroso	676
Soeroto	464

Soetedjo, M. Ir.	252
Soetjipto, Hadi	537
Soetjipto, R.M.	677
Soewihjo, R.	598
Sofjan, Achmad	663
Sojas	665
Solo	312, 784, 991, 1054
Sophiaan, Manai	167
Sosrorawito	804
Stambul, R. Moh. Dr.	644
Subroto, Gatot Kolonel	623
Sudiman	838
Sudjahri, R. Imam Mr.	594
Sukabumi	986
Sukindar, R.	667
Sukono	995
Sulawesi	167, 547, 1007
Sumantri, Iwa Kusuma Ny.	54
Sumatera	193, 197, 454, 566, 576, 578, 582, 614, 620, 663, 704, 749, 882, 903, 908, 926, 985, 993
Sumatera Barat	177
Sumatera Selatan	301, 601, 901, 1019
Sumatera Tengah	177, 260, 301, 425, 559
Sumatera Timur	869
Sumatera Utara	301, 783, 960
Sunarto, Letkol.	649
Sunda Kecil	547
Suparno, Dr.	831
Supomo, Prof. Mr. Dr.	831
Surabaya	176, 232, 240, 836, 957, 1004
Surakarta	200, 203, 252, 283, 288, 313, 320, 539, 581, 623, 648, 676, 739, 762, 776, 860, 899
Surjadi, Mr.	682

Susilo, B. Letkol.	612
Sudjipto	617
Sutomo, Jenderal Mayor	933
Suarno, Lanto Latumahina	979
Tabrani, M.	488
Tahir	980
Tan, Po Goan Ir.	929
Tangerang	948
Tapanuli Selatan	254
Tapanuli Utara	254
Tarutung	474
Then, Djin Soe Tankinghien	845
Tidore	476
Tirtawinata, R. Mr.	407
Tirtoatmaja, Letkol.	647
Tirtoprodjo, Soesanto Mr.	618
Tjokroadisoemarto, R. Mr.	610, 830
Tjokroadisurjo, R. P. Iskak Mr.	545
Tjokroaminoto, A.	572
Tjokrodihardjo, B. Lasmijem	639
Tjokronegoro, A. Dr.	427
Tobing, P.H.L.	645
Toekidjah, Bok	639
Tohir, Kaslan Abd. Ir.	583
Triebel, W.L.R. Ny.	639
Wasitooetomo, Wangsit	640
Wirakartakoesoemo	645
Wiranatakusuma	172
Wiranto, Raden Mas	659
Wiejomodjojo, Dr.	464
Wirjonagoro, R. Goenoeng Iskandar Ir.	681
Wiroboemi, K.R.T.	252

Wiryaharja, Mas Rukadi	711
Wongsonegoro, Mr.	251
Wreksodiningrat, R.M. Prof. Ir.	681
Yap, Cie Ling	800
Yogyakarta	1, 12, 21, 70, 79, 180, 198, 232, 246, 288, 294, 303, 312, 313, 319, 322, 330, 331, 334, 335, 416, 426, 428, 471, 475, 490, 495, 539, 540, 557, 560, 636, 638, 643, 649, 659, 661, 664, 670, 681, 683, 685, 745, 759, 761, 776, 800, 804, 806, 810, 811, 822, 829, 830, 857, 900, 917, 920, 921, 938, 968, 996, 1002, 1003, 1021, 1025, 1031
Zainuddin	865

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
BFO	: Bijeenkomst Voor Federal Overleg
BKPRI	: Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia
BPASS	: Badan Pencinta Adat Sumatera Selatan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKN	: Badan Pemeriksa Keuangan Negara
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPPGN	: Badan Pengurus Penjualan Gula Negara
CPU	: Cursus Pengetahuan Umum
DDS	: Dewan Djambi Sementara
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPPBM	: Djawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
GPI	: Gabungan Patriot Indonesia
GPII	: Gabungan Pemuda Islam Indonesia
HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KNP	: Komite Nasional Pusat
KPG	: Kantor Penjualan Gula
KSAP	: Kepala Staf Angkatan Perang
KTN	: Komite Tiga Negara
KUBRI	: Kantor Urusan Barang-barang Republik Indonesia
MID	: Militaire Inlichtingen Dienst
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NIT	: Negara Indonesia Timur
ORI	: Oeang Republik Indonesia

PAPM	: Persatuan Adat Pembangun Masyarakat
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PBH	: Pemberantasan Buta Huruf
BPI	: Partai Buruh Indonesia
PBKA	: Persatuan Buruh Kereta Api
PB. PGRI	: Persatuan Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
PEISIM	: Pemuda Islam Indonesia Maluku
PGP	: Peraturan Gaji Pegawai
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PM	: Polisi Militer
PMBA	: Pengawasan Milik Bangsa Asing
PMI	: Palang Merah Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPBM	: Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan
PPK	: Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SBPI	: Sarekat Buruh Percetakan Indonesia
SEKDELINDON	: Sekretaris Delegasi Indonesia
SETNEG	: Sekretaris Negara
SK	: Surat Keputusan
SK. JAVA POST	: Surat Kabar Java Post
SR	: Sekolah Rakyat
TKR	: Tentara Keselamatan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
UNCI	: United Nations Commissions for Indonesia
USA	: United State of America
UUD '45	: Undang-Undang Dasar '45
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
WNI	: Warga Negara Indonesia